



**IRPIA**

**VOLUME 9 NOMOR 8; JANUARI - MARET 2024**

# **Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan**

**PENERBIT:**

*Institut Riset dan Pengembangan Indonesia*

2023

**[ejournal.irpia.or.id](http://ejournal.irpia.or.id)**

## DAFTAR ISI

### **Perbandingan Sistem Administrasi Negara Indonesia Dengan Sistem Administrasi Negara Thailand**

Afifah Dina Fatin, Djoko Siswanto M. ....1-12

### **Perbandingan Administrasi Negara Indonesia Dengan Negara Selandia Baru**

Sherly Anggraeni, Djoko Siswanto M.....13-22

### **Perbandingan Administrasi Negara Indonesia Dengan Korea Selatan**

Nur Wahyuni.....23-36

### **Evaluasi Program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Wiyung**

Rosa Indah Febriana, Ika Devi Pramudiana, Widyawati .....37-46

### **Perbandingan Sistem Administrasi Negara Indonesia Dengan Brunei Darussalam**

Aizah Dien Putri Ambarizki.....47-57

### **Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Kota Tanjung Pinang**

Amelia Frista Meliyana, Totok Minto Leksono, Andi Nashwa Intan Salam Indah Syifa Rahma Sari, Metasari Putri.....58-63

## PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA DENGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA THAILAND

Afifah Dina Fatin<sup>1</sup>, Djoko Siswanto M.<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Hang Tuah Surabaya

[dina.fisip20@hangtuah.ac.id](mailto:dina.fisip20@hangtuah.ac.id)<sup>1</sup>, [djoko.siswanto@hangtuah.ac.id](mailto:djoko.siswanto@hangtuah.ac.id)<sup>2</sup>

Correspondence Author: [djoko.siswanto@hangtuah.ac.id](mailto:djoko.siswanto@hangtuah.ac.id)

### ABSTRAK

#### Histori Artikel

**Submitted**

4 September 2023

**Reviewed**

17 September 2023

**Accepted**

20 September 2023

**Published**

30 Maret 2024

Di dalam studi Perbandingan Administrasi Negara terkandung aspek yang relevan, yakni aspek Administrasi Negara yang mengandung pengertian umum tentang bagaimana lembaga-lembaga negara tumbuh dan hidup didalam suatu negara menjalankan fungsinya. Administrasi negara bukan merupakan bidang studi yang memiliki pengertian serta sifat yang umum dan berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu bidang studi yang tidak diterapkan di dalam suatu negara dengan multidisipliner. Administrasi negara pada hakikatnya merupakan salah satu aspek dari administrasi yang menekankan pembahasan pada bidang kenegaraan. Berbagai pendapat mengemukakan tentang pengertian atau batasan administrasi yang merupakan induk dari administrasi negara, namun secara umum dapat diidentifikasi pengertian atau batasan tersebut,

mengandung unsur-unsur: unsur proses penyelenggaraan, unsur kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dan unsur pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Susunan pemerintahan dapat diartikan sebagai permintaan lengkap yang terdiri dari berbagai bagian pemerintah yang bekerja sama mengandalkan dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan unsur-unsur pemerintahan. Terlepas dari kenyataan bahwa sistem pemerintahan masing-masing negara ada kalanya berbeda satu sama lain. Wawasan kita juga bisa dijadikan bahan perbandingan bagi negara kita karena kita akan memperoleh pemahaman tentang sistem pemerintahan negara lain. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui persamaan dan perbedaan antara berbagai sistem pemerintahan, kita dapat merancang sistem yang dianggap lebih unggul.

**Kata kunci:** pemerintah, perbandingan, administrasi negara

### ABSTRACT

In the study of Comparative Public Administration, there is a relevant aspect, namely the aspect of Public Administration which contains a general understanding of how state institutions grow and live in a country carrying out their functions. State administration is not a field of study that has a general understanding and nature and stands alone, but is a field of study that is not applied in a country with multidisciplinary. State administration is essentially one aspect of administration that emphasizes discussion in the field of statehood. Various opinions have suggested the definition or limits of administration which is the parent of state administration, but in general it can be identified that the definition or limits contain elements: elements of the organizing process, elements of cooperation carried out by more than one person and elements of achieving predetermined goals. The structure of government can be interpreted as a complete request consisting of various parts of government that work together relying on and influencing in achieving the objectives and elements of government. Despite the fact that each country's system of government may differ from one another. Our insights can also be used as a comparison for our country because we will gain an understanding of other countries' government systems. Therefore, once we know the similarities and differences between the various systems of government, we can design a system that is considered superior.

**Keywords:** government, comparison, public administration

## PENDAHULUAN

Negara merupakan suatu organisasi dalam wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang diakui oleh rakyatnya, dimana terbagi atas beberapa unsur yaitu adanya wilayah, adanya pemerintahan, adanya rakyat dan adanya pengakuan/kedaulatan. Sedangkan administrasi adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama dan untuk perbandingan adalah dua hal atau lebih yang di bandingkan dengan hal yang lainnya. Administrasi negara perbandingan merupakan perbandingan administrasi di dua negara atau lebih yang berbeda. Mengingat pula pendekatan terhadap administrasi negara itu berbeda-beda, maka akan melahirkan pandangan yang berbeda pula. Dari perbedaan tersebut maka lahirlah perbandingan. Pada dasarnya perbandingan dilakukan untuk mengetahui berbagai macam organisasi kenegaraan serta kegiatan setiap organisasi dalam mencapai tujuan negaranya.

Dapatlah diberikan pengertian ataupun batasan bahwa administrasi negara mengandung suatu pengertian kolektif yang meliputi segenap proses penyelenggaraan negara sebagai suatu organisasi yang meliputi organ/lembaga berikut fungsi masing-masing yang tumbuh dan hidup dalam suatu negara, dan semuanya itu diarahkan kepada pencapaian tujuan negara yang bersangkutan.

Di Indonesia proses desentralisasi sudah dimulai sejak tahun 1903, ketika Pemerintah Belanda mengeluarkan suatu undang-undang Desentralisasi yang disebut dengan "*Decentralizatie Wet*", di mana daerah dibagi-bagi menjadi Karesidenan dan Kota (*Gementee*). Kemudian pada tahun 1922, Pemerintah Hindia Belanda berusaha menyempurnakan pemerintahan daerah dengan mengeluarkan Undang-undang Restrukturisasi Administrasi, di mana gementee dibagi menjadi Kota dan Kabupaten.

Sementara itu perkembangan pemerintahan daerah di Thailand, yang merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak mendapatkan kemerdekaannya dari tangan penjajah, sesuai dengan perkembangan pemerintah yang menganut sistem monarki absolut. Sejak itu Thailand telah melaksanakan sistem pemerintah daerah selama 70 tahun dengan mengambil contoh-contoh dari negara-negara Eropa, dimana keluarga kerajaan banyak belajar dan mengadopsinya melalui pembuatan konstitusi yang dapat diterima oleh rakyat Thailand. Selama ini Thailand telah 16 kali merubah konstitusinya dan terakhir konstitusi baru telah dibuat pada tahun 1998, di mana banyak hal-hal yang mengatur pemerintah daerah.

## METODE

Metodologi yang digunakan pada artikel ini yaitu studi pustaka. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui jurnal penelitian, internet, buku dan *e-book* yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

## HASIL

Menurut Dwight Waldo, administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Gerald E. Caiden dalam bukunya *Public Administration* memberikan patokan bahwa untuk menemukan patokan untuk menentukan apakah suatu organisasi tersebut termasuk pemerintah adalah dengan melihat tiga hal, yaitu organisasinya dibentuk dengan peraturan pemerintah, karyawannya disebut pegawai negeri, dan pembiayaannya berasal dari uang rakyat.

Dari definisi-definisi diatas mengenai sistem, administrasi, negara, dan administrasi negara dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi negara adalah kegiatan yang didalamnya terdapat bagian-bagian yang saling berkaitan dan berinteraksi di dalam suatu organisasi tertinggi yaitu negara untuk mencapai tujuan bersama.

Secara singkat SANKRI/SANRI membahas tentang administrasi negara indonesia sebagai suatu sistem mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang didalamnya membahas tentang koordinasi dan hubungan kerja dalam pemerintahan negara.

Menurut E. Utrecht, administrasi negara adalah aparat atau gabungan jabatan-jabatan administrasi yang berada di bawah pimpinan pemerintah, dan melaksanakan tugas yang tidak

ditugaskan kepada badan-badan pengadilan dan legislatif. Sedangkan Prof. Prayudi Atmosudirdjo mengemukakan tiga arti administrasi negara, yaitu :

- a. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah atau instansi politik (kenegaraan) artinya meliputi organ yang berada di bawah pemerintah mulai dari presiden, menteri (termasuk gubernur, bupati dan sebagainya). Intinya adalah semua organ yang menjalankan administrasi negara.
- b. Sebagai fungsi aktifitas yakni sebagai kegiatan pemerintahan artinya sebagai kegiatan mengurus kepentingan negara.
- c. Sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang artinya meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menjalankan undang-undang.

Unsur-unsur administrasi negara:

1. Manusia; pejabat kenegaraan atau pemerintahan dan masyarakat yang dilibatkan.
2. Tujuan; mewujudkan kebijakan negara, memecahkan permasalahan negara,
3. memenuhi kebutuhan masyarakat dan melayani masyarakat.
4. Kerja sama; berbagai mekanisme dan cara kerja (rencana program, prosedur, briefing, rapat dan sebagainya).
5. Sarana; dana, gedung, kantor, perabotan, kendaraan, dsb.

Negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat tentu memiliki suatu konstitusi, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”, sebagai negara kesatuan dan memiliki konstitusi yang jelas tentu kewajiban negara adalah memperkuat bentuk negara, cara memperkuat bentuk negara tersebut dinyatakan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 37 ayat (5) bahwa “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disampaikan bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi tujuh kunci pokok, yaitu: Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum.

1. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Ini berarti bahwa antara pengertian hukum dengan pengertian kekuasaan dipertentangkan.
2. Sistem konstitusional
3. Pemerintahan Indonesia berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tidak terbatas). Ketentuan ini memberi ketegasan bahwa cara pengendalian pemerintah dibatasi dan dipagari oleh ketentuan konstitusi. Ketentuan ini mencakup secara otomatis ketentuan hukum lain yang merupakan produk konstitusional.
4. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan MPR.
5. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah MPR.
6. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
7. Menteri ialah pembantu Presiden.
8. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas.

Mengenai sistem ekonomi Indonesia, saat ini Indonesia menganut sistem ekonomi pancasila (demokrasi otonomi) yang dalam prakteknya cenderung liberal.

Negara Thailand secara resmi disebut Kerajaan Thailand (*The Kingdom Of Thailand*), didalam bahasa Thailand sendiri disebut ราชอาณาจักรไทย dibaca *Rātcha-āṅāchak Thai, Rāja-ādnyācakra Thai, atau Prathēt Thai, Pradēsa Thai*, atau *Mueang Thai* dibaca: "meng-thai", dimana persis dengan versi bahasa Inggrisnya, yang berarti "Negeri Thai".

Ditinjau dari segi geografis negara Thailand terbagi menjadi enam bagian antara lain, di bagian utara terdapat perbukitan dimana gajah-gajah bekerja di hutan dan udara musim dinginnya cukup baik. Disebelah timur laut terdapat plateau yang luas yang berbatasan dengan Sungai Mekong, dataran tengah yang sangat subur, daerah pantai timur dengan resor-resor musim panas di atas hamparan pasir putih, pegunungan dan lembah di barat, serta daerah selatan yang sangat cantik. Disebelah barat dan utara berbatasan dengan Myanmar, di timur laut berbatasan dengan Laos, di timur berbatasan dengan Kamboja dan sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia. Kekuasaan tertinggi negara ini dipegang oleh seorang Raja. Sistem pemerintahannya adalah konstitusional Monarki absolute. Dalam pemerintahannya negara Thailand dipimpin oleh Perdana Menteri dari anggota-anggota parlemen dari pemimpin partai yang

mayoritas. Semenjak pembaharuan politik dari negara raja mutlak pada tahun 1932, Thailand telah mengalami 17 perlembagaan dan piagam. Selama ini, bentuk kerajaan sering berubah-ubah dari diktator tentera ke demokrasi berpilihan raya, namun semua kerajaan ini mengiktiraf raja turun-temurun sebagai ketua negara.

Perlembagaan 1997 adalah perlembagaan pertama yang digubal oleh Perhimpunan Mendraf Perlembagaan yang dipilih orang ramai, maka itu digelaranya "Perlembagaan Rakyat". Perlembagaan 1997 mewujudkan satu perundangan dwidewan yang terdiri daripada Dewan Rakyat (สภาผู้แทนราษฎร, *Sapha Phutan Ratsadon*) 500 kerusi dan Senat (วุฒิสภา, *Wuthisapha*) 200 kerusi. Buat julung kalinya dalam sejarah Thai, kedua-dua dewan ini dipilih melalui undian orang ramai. Banyak hak asasi manusia yang diakui dengan jelas sekali, dan langkah-langkah diambil untuk meningkatkan kestabilan kerajaan terpilih. Ahli-ahli Dewan Rakyat dipilih melalui sistem *first-past-the-post*, iaitu hanya seorang calon dengan majoriti mudah boleh dipilih dalam satu kawasan undian. Ahli-ahli Senat pula dipilih berdeasarkan sistem wilayah, yaitu satu wilayah boleh memberikan lebih daripada seorang Senator bergantung kepada bilangan penduduknya. Ahli-ahli Dewan Rakyat berkhidmat dalam penggal empat tahun, sementara ahli Senat pula penggal enam tahun. Sistem mahkamah (ศาล, *saan*) mernagkumi sebuah mahkamah perlembagaan yang bidang kuasanya meliputi keperlembagaan akta-akta parlimen, titah raja, dan hal-hal politik.

Faktor – Faktor Ekologis yang Mempengaruhi Administrasi Negara Thailand:

#### 1. Faktor Ekonomi

Ekonomi Thailand tidak didasarkan pada sistem pasar, tetapi berdasarkan pada sistem redistribusi. Kegiatan export-import dikendalikan oleh Raja. Barang yang dihasilkan dihimpun dalam satu pusat penimbunan pusat, kemudian pusat membagi ke dalam sektor- sektor tertentu dalam jumlah tertentu. Jabatan-jabatan administrasi negara didistribusikan oleh Raja kepada pegawai-pegawainya dalam melakukan distribusi barang dan jasa. Oleh karena itu terdapat percampuran antara ekonomi dengan administrasi. Sehingga tidak dapat dibedakan antara tindakan Raja sebagai administrator atau sebagai ekonomi.

Dalam modernisasinya sistem redistribusi berangsur berubah menjadi sistem pasar yang diperkenalkan melalui pandangan baru dan pengaruh dari dunia luar. Demikian pula dengan fungsi administrasi negara yang berkembang dari fungsi sebagai aparat Raja untuk menguasai rakyatnya, kemudian berfungsi sebagai public service. Namun tugas dan fungsi yang dikerjakan oleh administrasi bertambah banyak dan semakin kompleks, sehingga menambah anggaran belanja. Pertambahan anggaran tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas di bidang ekonomi, hal ini menyebabkan administrasi negara mengalami keterbatasan alat-alat dan fasilitas.

Terdapat persamaan ciri-ciri antara ekonomi redistribusi dengan ekonomi pasar. Hal ini juga mempengaruhi administrasi negara dilihat dari jabatan-jabatan yang diisi dengan seleksi melalui ujian kompetensi, terdapat juga jabatan-jabatan yang tersedia untuk kalangan-kalangan tertentu.

Mata Pencapaian penduduk Thailand sebagian besar adalah bertani (Agralis) hasil pertanian yang utama adalah beras. Thailand merupakan lumbung beras dikawasan Asia Tenggara. Hasil Tambang yang utama adalah timah dan mangan. Pariwisata Merupakan sumber Penghasilan Devisa yang besar bagi Thailand. Mata Uang Thailand adalah Bath; Hasil pertanian, Beras, Karet, Jagung, tapioca, Gula, Rami, Kelapa; Hasil tambangnya Antimonium, Timah, Besi, Manggan; Hasil Industri dari Thailand Elektronik, Berlian, Pakian, dan Teksti; dan Pendapatan Perkapita \$ 2750 (2005).

Pendapatan Perkapita US \$ 2750 (2005) Setelah menikmati rata-rata pertumbuhan tertinggi di dunia dari tahun 1985 hingga 1995 - rata-rata 9% per tahun - tekanan spekulatif yang meningkat terhadap mata uang Kerajaan Thai, Baht, pada tahun 1997 menyebabkan terjadinya krisis yang membuka kelemahan sektor keuangan dan memaksa pemerintah untuk mengambangkan Baht. Setelah sekian lama dipatok pada nilai 25 Baht untuk satu dolar AS, Baht mencapai titik terendahnya pada kisaran 56 Baht pada Januari 1998 dan ekonominya melemah sebesar 10,2% pada tahun yang sama. Krisis ini kemudian meluas ke krisis finansial Asia.

Kerajaan Thai memasuki babak pemulihan pada tahun 1999; ekonominya menguat 4,2% dan tumbuh 4,4% pada tahun 2000, kebanyakan merupakan hasil dari ekspor yang kuat - yang

meningkat sekitar 20% pada tahun 2000. Pertumbuhan sempat diperlambat ekonomi dunia yang melunak pada tahun 2001, namun kembali menguat pada tahun-tahun berikut berkat pertumbuhan yang kuat di RRC dan beberapa program stimulan dalam negeri serta Kebijakan. Dua Jalur yang ditempuh pemerintah Thaksin Shinawatra. Pertumbuhan pada tahun 2003 diperkirakan mencapai 6,3%, dan diperkirakan pada 8% dan 10% pada tahun 2004 dan 2005. Sektor pariwisata menyumbang banyak kepada ekonomi Kerajaan Thai, dan industri ini memperoleh keuntungan tambahan dari melemahnya Baht dan stabilitas Kerajaan Thai. Kedatangan wisatawan pada tahun 2002 (10,9 juta) mencerminkan kenaikan sebesar 7,3% dari tahun sebelumnya (10,1 juta).

## 2. Faktor Sosial

Di Thailand organisasi-organisasi sosial tidak didasarkan atas kepentingan-kepentingan khusus dan keanggotaannya pun tidak didasarkan atas sukarela. Organisasi sosialnya didasarkan pada particularistic, yaitu berdasar pada hal-hal tertentu saja seperti agama, keturunan, status dan sebagainya dan dijalankan sesuai dengan fungsinya. Pengaruh faktor sosial terhadap administrasi negara, administrasi tidak berperan dalam pembuatan kebijakan yang tepat untuk rakyat, melainkan berperan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut untuk rakyat dan menilai apakah kelompok-kelompok sosial berpartisipasi untuk Raja atau sebaliknya.

Negara Thailand struktur kelasnya tidak tertutup atau terbuka, melainkan diantara tertutup dan terbuka meskipun sifatnya lebih berat. Seperti keluarga Raja atau bangsawan- bangsawan dari generasi ke generasi dapat menjadi orang biasa. Sebaliknya orang-orang biasa yang mendapat penghargaan dari Raja dapat naik ke tingkat atas. Walaupun demikian terdapat keluarga Raja yang tidak mendapat posisi, tetapi adapula keluarga orang biasa yang menduduki posisi-posisi yang relatif tinggi.

Setelah mengalami modernisasi masyarakat yang semula tergabung dalam organisasi sosial yang berdasar pada asas particularistic kemudian berhimpun dalam organisasi baru yang bercorak *association* (atas dasar kepentingan bersama). Yang mempunyai peranan dan mempengaruhi administrasi Negara yaitu organisasi yang bersifat particularistic, karena organisasi baru yang bercorak *association* belum meresap di kalangan masyarakat sehingga belum mempunyai pengaruh terhadap administrasi Negara.

Dalam struktur kelasnya, Negara Thailand berangsur bersifat terbuka, yang mempunyai dampak terhadap administrasi Negara. Dengan sifat struktur yang terbuka maka terdapat kemungkinan adanya perpindahan dari satu kelas ke kelas yang lain. Sehingga terdapat kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang tadinya tidak dapat menduduki jabatan tertentu, setelah adanya struktur terbuka ini kelompok tersebut dapat menduduki jabatan tertentu bahkan yang tertinggi sekalipun.

## 3. Faktor Jaringan Komunikasi

Dalam bidang komunikasi, Negara Thailand bermasalah pada penggunaan bahasa yang masih beraneka ragam. Karena bahasa yang digunakan oleh Kerajaan/Istana berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat sehingga kebijakan-kebijakan yang dirumuskan tidak dapat dipahami oleh rakyat karena perbedaan bahasa yang digunakan. Dampaknya terhadap administrasi negara, yaitu perilaku administrasi negara yang kurang responsif terhadap permintaan publik karena adanya *communication-gap* tersebut. Perilaku administrasi negara kurang mencerminkan keinginan-keinginan dari masyarakat begitu pun sebaliknya. Administrator negara cenderung bertindak arbiter (sewenang-wenang).

Pada perkembangannya masyarakat Thailand sedikit demi sedikit sudah mulai mobilisasi dan terasimilasikan. Dengan adanya komunikasi terbuka tersebut dan administrasi Negara dengan alat-alat terbatas, maka dengan bahasa yang sudah cukup dimengerti dapat menyampaikan program-programnya dan harapan-harapan rakyat disampaikan kepada pemerintah. Namun karena komunikasi yang sangat terbatas, maka masyarakat belum dapat mengontrol secara efektif administrasi negara begitupun sebaliknya.

## 4. Faktor Simbol Sistem

Thailand memiliki simbol tradisional yaitu raja mempunyai dasar yang sakral dan kerajaan merupakan ciptaan Tuhan yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun. Hal yang bersifat sakral

diwujudkan pada diri Raja yang dianggap sebagai keturunan yang memperoleh mandat dari Tuhan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Lambat laun negara Thailand mendapat pengaruh dari luar symbol tersebut berubah menjadi simbol baru yaitu kedaulatan rakyat. Pemerintahan tidak dilakukan lagi oleh Raja seorang diri tetapi perlu didampingi oleh badan yang mewakili rakyat yang menjalankan kedaulatan rakyat.

#### 5. Faktor politik

Negara Thailand sistem pemerintahan bersifat otokratis, kekuasaan penuh dijalankan atau diatur sepenuhnya oleh Raja. Keadaan seperti ini kurang atau tidak berpartisipasi dalam pemerintahan atau politik. Tindakan-tindakan Raja tidak hanya di bidang politik saja namun disemua bidang, sehingga sulit untuk melihat pengaruh politik terhadap administrasi negara. Dalam konteks administrasi negara Thailand yang bersifat otokratis, maka inputnya adalah Raja. Raja yang terlibat dalam pembuatan keputusan dan hanya Raja saja yang mempunyai bahan untuk membuat keputusan. Sedangkan outputnya berupa policy dan Raja yang melaksanakannya. Jadi administrasi Negara Thailand merupakan produk dari lingkungan sosialnya.

## DISKUSI

Mengenai pembahasan tentang sistem administrasi negara Indonesia dengan Thailand, maka ada beberapa perbedaan atau perbandingan yang bisa kita peroleh, yaitu:

#### 1. Bentuk Negara

Bentuk negara Indonesia adalah republik. Hal ini tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yakni, "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik." Keseluruhan negara dikuasai hanya oleh satu pemerintah pusat saja.

Bentuk negara Thailand secara resmi disebut Kerajaan Thailand (*The Kingdom Of Thailand*), didalam bahasa Thailand sendiri disebut ราชอาณาจักรไทย dibaca *Rāṭcha- āṇāchak Thai*, *Rāja-ādnyācakra Thai*, atau *Prathēt Thai*, *Pradēsa Thai*, atau *Mueang Thai* dibaca: "meng-thai", dimana persis dengan versi bahasa Inggrisnya, yang berarti "Negeri Thai".

#### 2. Kekuasaan

Kekuasaan negara Indonesia yang tertinggi di tangan MPR. MPR (mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah). Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah MPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri ialah pembantu Presiden. Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan yang tertinggi. BPK (memeriksa semua keuangan negara). Komisi Yudisial (mengangkat dan mengurus citra hakim). Mahkamah Konstitusi (menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan). DPR (persetujuan dalam pembentukan dan pengawasan pelaksanaan UU). DPD (membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan).

Kekuasaan negara Thailand yaitu Monarki Konstitusional. Menganut trias politika dalam mana ada pembagian kewenangan jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Monarki Thailand menjalankan fungsi legislatif lewat parlemen, eksekutif lewat kabinet, dan yudikatif lewat peradilan. Namun, Monarki tidak mengintervensi pembuatan keputusan pemerintah sehari-hari.

#### 3. Sistem Pemerintah

Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan atas hukum. Sistem Administrasi Negara di Indonesia di pengaruhi oleh sistem Administrasi Negara Perancis melalui Belanda. Sistem Konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tidak terbatas). Para penyelenggara pemerintah dalam melakukan tugasnya harus berdasarkan hukum/peraturan, dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, para penyelenggara/pelaksana administrasi negara tidak diperkenankan melakukan tugas hanya atas dasar kekuasaan yang dimilikinya (tidak bertindak semena-mena).

Sistem pemerintahan Thailand adalah sistem parlementer. Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan, yang dilantik sang raja dari anggota-anggota parlemen dan biasanya adalah



pemimpin partai mayoritas. Lembaga legislatif, gedung parlemen terdiri dari Senat, memegang posisi selama 5 tahun dari pemilihan dan pengangkatan juga Dewan Perwakilan Rakyat, memegang posisi selama 4 tahun dari pemilihan daerah. (NSO, 2020). Sistem pemerintahan bersifat otokratis, kekuasaan penuh dijalankan atau diatur sepenuhnya oleh Raja.

#### 4. Parlemen

Parlemen negara Indonesia menurut Konstitusi RIS atau setelah reformasi dan setelah UUD 1945 diamandemen (periode 2004-sekarang) yang dianut adalah Bikameral (DPR RI dan DPD RI). Anggota DPR dipilih rakyat melalui pemilu dengan sistem proposional terbuka. DPD dipilih rakyat secara langsung melalui pemilu yang berasal dari masing-masing provinsi dengan sistem pemilihan distrik perwakilan terbanyak. MPR menunjuk Presiden sebagai mandataris MPR untuk menjalankan tugas MPR. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara, kekuasaan, dan tanggung jawab di tangan Presiden. Kedudukan Presiden tidak tergantung DPR (Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan begitu pula sebaliknya DPR tidak bisa menjatuhkan Presiden). Presiden sebagai kepala pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri negara.

Parlemen negara Thailand menggunakan sistem dua kamar dinamakan Majelis Nasional atau Rathasapha, yang terdiri dari Dewan Perwakilan (Sapha Phuthaen Ratsadon) yang beranggotakan 480 orang dan Senat (Wuthisapha) yang beranggotakan 150 orang. Anggota Dewan Perwakilan menjalani masa bakti selama empat tahun, sementara para senator menjalani masa bakti selama enam tahun. Badan kehakiman tertinggi adalah Mahkamah Agung (Sandika). Bidang Kehakiman meliputi pengadilan negeri, mahkamah konstitusi, dan peradilan tata usaha negara, yang anggotanya berasal dari sistem selektif. Saat ini Thailand berada di bawah Konstitusi 2017. Administrasi Publik Thailand memiliki tiga tingkatan pemerintahan: Administrasi Pusat yang terdiri dari kementerian dan birokrasi. Administrasi Provinsi yang terdiri dari 76 provinsi kecuali Bangkok, dan Administrasi Lokal yang terdiri dari organisasi administrasi provinsi, organisasi administrasi kota, organisasi administrasi distrik, Bangkok dan Daerah Administratif Khusus Pattaya. Bangkok berperan sebagai pusat administrasi publik negara, Bangkok juga merupakan ibu kota dan kota terbesar di negara itu yang punya sejarah panjang (NSO, 2020).

#### 5. Ekonomi

Saat ini Indonesia menganut sistem ekonomi pancasila (demokrasi otonomi) yang dalam prakteknya cenderung liberal. Pada laman Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPPI) dijelaskan bahwa SEP merupakan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai kebangsaan seperti gotog royong dan saling menguatkan. Perekonomian Indonesia tahun 2022 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta atau US\$4.783,9.

Sistem ekonomi Thailand tidak didasarkan pada sistem pasar, tetapi berdasarkan pada sistem redistribusi. Dalam modernisasinya sistem redistribusi berangsur berubah menjadi sistem pasar yang diperkenalkan melalui pandangan baru dan pengaruh dari dunia luar. Gambaran keseluruhan ekonomi Thailand pada tahun 2019, PDB negara adalah 16,879.0 miliar baht. Untuk ekspor nilainya sebesar 7.627,7 miliar baht, sedangkan nilai impornya sebesar 7.437,3 miliar baht.

#### 6. Militer

Indeks kekuatan militer Indonesia menempati peringkat 16 dari 140 negara. Jika merujuk situs GFP, Indonesia bahkan menjadi negara yang terkuat secara militer di kawasan ASEAN. Dengan begitu Indonesia jauh berada di atas Singapura yang berada di peringkat 40, di mana notabene merupakan negara paling maju di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, unggulnya kekuatan militer Indonesia dibandingkan Spanyol, Australia, dan Israel juga karena ditopang oleh jumlah personel tentara yang besar yakni 1.080.000. Adapun jumlah personel militer aktif Indonesia tercatat sebesar 400.000, jumlah personel cadangan tercatat sebesar 400.000, dan jumlah paramiliter tercatat sebanyak 280.000. Luasnya Indonesia juga turut mempengaruhi banyaknya jumlah alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang dimiliki oleh matra darat, laut, dan udara. Banyaknya jumlah alutsista turut menunjang peringkat kekuatan militer Indonesia yang dirilis GFP. Dalam situs GFP, kekuatan matra udara Indonesia memiliki 458 unit armada yang terdiri dari pesawat angkut, pesawat tempur, dan helikopter. Adapun jumlah pesawat tempur Indonesia hanya 41 unit.

Militer negara Thailand berada pada peringkat 26 militer terkuat dari 140 negara yang dipertimbangkan. Posisinya berada diatas negara Turki dan dibawah negara Indonesia. Thailand tercatat mempunyai 361,000 personel aktif dan 200,000 personel cadangan. Pasukan udara Thailand mempunyai total 587 unit personel, yaitu 75 jet tempur, 18 pesawat pengebom, 50 pesawat pengangkut, 163 pesawat latihan, 20 jet misi special, 261 helikopter, dan 7 helikopter penyerang. Pasukan darat Thailand mempunyai 840 tank, 2,500 kendaraan lapis baja, 53 artileri swagerak, 583 artilery biasa, dan 17 proyektor roket. Pasukan Laut Thailand mempunyai 292 aset, yaitu 1 kapal pengangkut helicopter (kapal induk), 7 kapal pengawal, 7 unit korvet, 49 kapal patrol, dan 5 *mine warfare*

## 7. Politik

Sistem politik negara Indonesia yaitu demokrasi (didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis). Politik Indonesia adalah kedaulatan rakyat/masyarakat yang termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap lima tahun. Negara Indonesia menganut demokrasi konstitusional. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan di Indonesia yang berdasarkan pada asas-asas Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Pemerintahan ini dibangun dengan cara musyawarah dan pengambilan keputusan berdasarkan mufakat. Infrastruktur politik terdiri dari:

- a. Partai Politik;
- b. *Interest group* (kelompok kepentingan);
- c. *Pressure group* (kelompok penekan);
- d. *Media of political communication* (media komunikasi politik);
- e. *Journalism Group* (kelompok jurnalis);
- f. *Student Group* (kelompok pelajar);
- g. *Political figure* (figure-figure politik).

Supra struktur politik, yaitu suasana kehidupan politik di dalam pemerintahan dan berhubungan dengan peran dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan. Suprastruktur politik terdiri dari:

- a. Lembaga eksekutif (pemerintahan/presiden);
- b. Lembaga Legislatif (parlemen, DPR);
- c. Lembaga yudikatif (peradilan, Mahkamah Agung).

Sistem politik negara Thailand saat ini dilakukan dalam rangka sebuah monarki konstitusional yang demokratis, dimana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja turun temurun adalah kepala negara. peradilan independen dari eksekutif dan legislatif. Raja adalah kepala angkatan bersenjata dan penegak semua agama. Raja yang terlibat dalam pembuatan keputusan dan hanya Raja yang mempunyai bahan bahan untuk membuat keputusan. Output berupa policy dan Raja yang melaksanakannya. Administrasi negara Thailand merupakan produk dari lingkungan sosialnya.

## 8. Sosial

Sistem sosial budaya Indonesia adalah sebagai totalitas nilai, tata sosial, dan tata laku manusia Indonesia harus mampu mewujudkan pandangan hidup dan falsafah negara Pancasila ke dalam segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan sosial-budaya masyarakat di Indonesia berjalan secara rukun dan tentram. Semua daerah di Indonesia memiliki kehidupan sosial-budaya yang berbeda-beda namun tetap menghormati satu sama lain dan hidup berdampingan tanpa ada perpecahan dan perebutan kebudayaan.

Di Thailand organisasi-organisasi sosial tidak dasarkan atas kepentingan-kepentingan khusus dan keanggotaannyapun tidak didasarkan atas sukarela. Organisasi sosialnya didasarkan pada particularistic, yaitu berdasar pada hal-hal tertentu saja seperti agama, keturunan, status dan sebagainya dan dijalankan sesuai dengan fungsinya. Pengaruh faktor sosial terhadap administrasi

negara, administrasi tidak berperan dalam pembuatan kebijakan yang tepat untuk rakyat, melainkan berperan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut untuk rakyat dan menilai apakah kelompok-kelompok sosial berpartisipasi untuk Raja atau sebaliknya.

Negara Thailand struktur kelasnya tidak tertutup atau terbuka, melainkan diantara tertutup dan terbuka meskipun sifatnya lebih berat. Seperti keluarga Raja atau bangsawan- bangsawan dari generasi ke generasi dapat menjadi orang biasa. Sebaliknya orang-orang biasa yang mendapat penghargaan dari Raja dapat naik ke tingkat atas. Walaupun demikian terdapat keluarga Raja yang tidak mendapat posisi, tetapi adapula keluarga orang biasa yang menduduki posisi-posisi yang relatif tinggi.

Dalam struktur kelasnya, Negara Thailand berangsur bersifat terbuka, yang mempunyai dampak terhadap administrasi Negara. Dengan sifat struktur yang terbuka maka terdapat kemungkinan adanya perpindahan dari satu kelas ke kelas yang lain. Sehingga terdapat kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang tadinya tidak dapat menduduki jabatan tertentu, setelah adanya struktur terbuka ini kelompok tersebut dapat menduduki jabatan tertentu bahkan yang tertinggi sekalipun.

#### 9. Jaringan Komunikasi

Sistem komunikasi Indonesia merupakan sebuah kajian ilmiah yang dikembangkan di perguruan tinggi sebagai upaya pengindonesiaan atau pribumisasi ilmu komunikasi dengan menggunakan wawasan keindonesiaan. Segala hubungan komunikasi manusia atau jaringan yang saling terhubung dan memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya.

Dalam bidang komunikasi, Negara Thailand bermasalah pada penggunaan bahasa yang masih beraneka ragam. Karena bahasa yang digunakan oleh Kerajaan/Istana berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat sehingga kebijakan-kebijakan yang dirumuskan tidak dapat dipahami oleh rakyat karena perbedaan bahasa yang digunakan. Dampaknya terhadap administrasi negara, yaitu perilaku administrasi negara yang kurang responsif terhadap permintaan publik karena adanya communication-gap tersebut. Perilaku administrasi negara kurang mencerminkan keinginan-keinginan dari masyarakat begitu pun sebaliknya. Administrator negara cenderung bertindak arbiter (sewenang-wenang).

Pada perkembangannya masyarakat Thailand sedikit demi sedikit sudah mulai mobilisasi dan terasimilasikan. Dengan adanya komunikasi terbuka tersebut dan administrasi Negara dengan alat-alat terbatas, maka dengan bahasa yang sudah cukup dimengerti dapat menyampaikan program-programnya dan harapan-harapan rakyat disampaikan kepada pemerintah. Namun karena komunikasi yang sangat terbatas, maka masyarakat belum dapat mengontrol secara efektif administrasi negara begitupun sebaliknya.

#### Kekurangan dan Kelebihan Sistem Administrasi Negara Thailand dan Indonesia:

1. Dengan sistem pemerintahan yang konstitusional monarki absolut kekuasaan pada raja tidak terbatas dengan kekuasaan tertinggi negara adalah raja sehingga pemerintahan bersifat otokratis, ini perlu diwaspadai karena khawatir terjadi penyelewengan kekuasaan, sistem ini condong ke arah sentralisasi. Tetapi ada nilai positifnya dari sistem ini karena dalam menentukan kebijakan pemerintah lebih simpel. Sedangkan sistem di Indonesia berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolut dengan kekuasaan tertinggi di tangan MPR, dan bersifat demokratis. Disini dalam melakukan kebijakan terdapat pembagian kekuasaan sehingga akan meminimalisir penyelewengan kekuasaan, tetapi dalam menentukan kebijakan lebih ribet dari pada sentralisasi karena harus mendapatkan persetujuan dari badan- badan lain.
2. Di bidang sosial, organisasi sosial berdasar pada particularistic yaitu berdasar pada hal-hal tertentu saja seperti agama, keturunan, dan sebagainya dan dijalankan sesuai fungsinya. Negatifnya pengaruh faktor sosial terhadap administrasi negara, ini berperan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut untuk rakyat dan menilai apakah kelompok- kelompok sosial berpartisipasi untuk Raja atau sebaliknya. Tetapi dengan modernisasi dari particularistik kemudian berhimpun ke organisasi yang bercorak association (atas dasar kepentingan bersama).
3. Struktur kelas di Thailand berangsur terbuka, yaitu kemungkinan adanya perpindahan dari kelas satu ke kelas lain, dari yang rendah ke tinggi ataupun sebaliknya. Hal ini berdampak positif, karena ini artinya pemerintah memberikan kebebasan untuk memperoleh derajat yang tinggi dengan

prestasi-prestasi, pengabdian-pengabdian kepada negara yang ia peroleh dan ia lakukan. Di Indonesia pun sama seperti ini, namun terkadang perilaku nepotisme dari aparat pemerintah sering terjadi.

4. Di bidang jaringan komunikasi, dalam pengorganisasian penggunaan bahasa kurang baik dibandingkan dengan Indonesia. Karena di Indonesia walaupun memiliki bahasa yang beragam tetapi memiliki bahasa nasional yakni bahasa Indonesia sedangkan di Thailand antara bahasa yang digunakan di istana dengan masyarakat berbeda, maka dampaknya perilaku administrasi negara kurang responsif terhadap permintaan publik (administrator negara cenderung sewenang-wenang).

## KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi negara adalah kegiatan yang didalamnya terdapat bagian-bagian yang saling berkaitan dan berinteraksi di dalam suatu organisasi tertinggi yaitu negara untuk mencapai tujuan bersama.

Faktor-faktor yang dapat dijadikan perbandingan sistem administrasi negara Indonesia dengan Thailand, yaitu:

1. Bentuk Negara

Bentuk negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik dan bentuk negara Thailand secara resmi disebut Kerajaan Thailand (*The Kingdom Of Thailand*).

2. Kekuasaan

Kekuasaan negara Indonesia yang tertinggi di tangan MPR. MPR (mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah). Kekuasaan negara Thailand yaitu Monarki Konstitusional. Menganut trias politika dalam mana ada pembagian kewenangan jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Monarki Thailand menjalankan fungsi legislatif lewat parlemen, eksekutif lewat kabinet, dan yudikatif lewat peradilan. Namun, Monarki tidak mengintervensi pembuatan keputusan pemerintah sehari-hari.

3. Sistem Pemerintah

Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan atas hukum sedangkan sistem pemerintahan Thailand adalah sistem parlementer. Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan yang dimana sistem pemerintahan bersifat otokratis, kekuasaan penuh dijalankan atau diatur sepenuhnya oleh Raja.

4. Parlemen

Parlemen negara Indonesia menurut Konstitusi RIS atau setelah reformasi dan setelah UUD 1945 diamandemen (periode 2004-sekarang) yang dianut adalah Bikameral (DPR RI dan DPD RI). Parlemen negara Thailand menggunakan sistem dua kamar dinamakan Majelis Nasional atau Rathasapha, yang terdiri dari Dewan Perwakilan (Sapha Phuthaen Ratsadon) yang beranggotakan 480 orang dan Senat (Wuthisapha) yang beranggotakan 150 orang.

5. Ekonomi

Saat ini Indonesia menganut sistem ekonomi pancasila (demokrasi otonomi) yang dalam prakteknya cenderung liberal. Perekonomian Indonesia tahun 2022 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta atau US\$4.783,9.

Sistem ekonomi Thailand tidak didasarkan pada sistem pasar, tetapi berdasarkan pada sistem redistribusi. Gambaran keseluruhan ekonomi Thailand pada tahun 2019, PDB negara adalah 16,879.0 miliar baht. Untuk ekspor nilainya sebesar 7.627,7 miliar baht, sedangkan nilai impornya sebesar 7.437,3 miliar baht.

6. Militer

Indeks kekuatan militer Indonesia menempati peringkat 16 dari 140 negara. Adapun jumlah personel militer aktif Indonesia tercatat sebesar 400.000, jumlah personel cadangan tercatat sebesar 400.000, dan jumlah paramiliter tercatat sebanyak 280.000. Luasnya Indonesia juga turut mempengaruhi banyaknya jumlah alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang dimiliki oleh matra darat, laut, dan udara. Banyaknya jumlah alutsista turut menunjang peringkat kekuatan militer Indonesia yang dirilis GFP. Dalam situs GFP, kekuatan matra udara Indonesia memiliki 458 unit armada yang

terdiri dari pesawat angkut, pesawat tempur, dan helikopter. Adapun jumlah pesawat tempur Indonesia hanya 41 unit.

Militer negara Thailand berada pada peringkat 26 militer terkuat dari 140 negara yang dipertimbangkan. Thailand mempunyai total 587 unit personel, yaitu 75 jet tempur, 18 pesawat pengebom, 50 pesawat pengangkut, 163 pesawat latihan, 20 jet misi special, 261 helikopter, dan 7 helikopter penyerang. Pasukan darat Thailand mempunyai 840 tank, 2,500 kendaraan lapis baja, 53 artileri swagerak, 583 artilery biasa, dan 17 proyektor roket. Pasukan Laut Thailand mempunyai 292 aset, yaitu 1 kapal pengangkut helicopter (kapal induk), 7 kapal pengawal, 7 unit korvet, 49 kapal patrol, dan 5 *mine warfare*.

#### 7. Politik

Sistem politik negara Indonesia yaitu demokrasi (didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis). Politik Indonesia adalah kedaulatan rakyat/masyarakat yang termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap lima tahun.

Sistem politik negara Thailand saat ini dilakukan dalam rangka sebuah monarki konstitusional yang demokratis, dimana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja turun temurun adalah kepala negara. Raja adalah kepala angkatan bersenjata dan penegak semua agama. Raja yang terlibat dalam pembuatan keputusan dan hanya Raja yang mempunyai bahan-bahan untuk membuat keputusan. Output berupa policy dan Raja yang melaksanakannya. Administrasi negara Thailand merupakan produk dari lingkungan sosialnya.

#### 8. Sosial

Sistem sosial budaya Indonesia adalah sebagai totalitas nilai, tata sosial, dan tata laku manusia Indonesia harus mampu mewujudkan pandangan hidup dan falsafah negara Pancasila ke dalam segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan sosial-budaya masyarakat di Indonesia berjalan secara rukun dan tentram. Semua daerah di Indonesia memiliki kehidupan sosial-budaya yang berbeda-beda namun tetap menghormati satu sama lain dan hidup berdampingan tanpa ada perpecahan dan perebutan kebudayaan.

Di Thailand organisasi-organisasi sosial tidak didasarkan atas kepentingan-kepentingan khusus dan keanggotaannya pun tidak didasarkan atas sukarela. Organisasi sosialnya didasarkan pada *particularistic*, yaitu berdasar pada hal-hal tertentu saja seperti agama, keturunan, status dan sebagainya dan dijalankan sesuai dengan fungsinya.

#### 9. Jaringan Komunikasi

Sistem komunikasi Indonesia merupakan sebuah kajian ilmiah yang dikembangkan di perguruan tinggi sebagai upaya pengindonesian atau pribumisasi ilmu komunikasi dengan menggunakan wawasan keindonesiaan.

Dalam bidang komunikasi, Negara Thailand bermasalah pada penggunaan bahasa yang masih beraneka ragam. Karena bahasa yang digunakan oleh Kerajaan/Istana berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat sehingga kebijakan-kebijakan yang dirumuskan tidak dapat dipahami oleh rakyat karena perbedaan bahasa yang digunakan.

Kekurangan dan Kelebihan Sistem Administrasi Negara Indonesia dan Negara Thailand yaitu dengan sistem pemerintahan yang konstitusional monarki absolut kekuasaan pada raja tidak terbatas dengan kekuasaan tertinggi negara adalah raja sehingga pemerintahan bersifat otokratis, ini perlu diwaspadai karena khawatir terjadi penyelewengan kekuasaan, sistem ini condong ke arah sentralisasi. Tetapi ada nilai positifnya dari sistem ini karena dalam menentukan kebijakan pemerintah lebih simpel. Sedangkan sistem di Indonesia berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolut dengan kekuasaan tertinggi di tangan MPR, dan bersifat demokratis. Disini dalam melakukan kebijakan terdapat pembagian kekuasaan sehingga akan meminimalisir penyelewengan kekuasaan, tetapi dalam menentukan kebijakan lebih ribet dari pada sentralisasi karena harus mendapatkan persetujuan dari badan-badan lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Utama, Putra. 2020. *Analisis Perbandingan Administrasi Negara Antara Indonesia Dengan Malaysia*. Tersedia: [https://www.academia.edu/43512032/ANALISIS\\_PERBANDINGAN\\_ADMINISTRASI\\_NEGARA\\_ANTARA\\_INDONESIA\\_DENGAN\\_MALAYSIA\\_TUGAS\\_MANDIRI](https://www.academia.edu/43512032/ANALISIS_PERBANDINGAN_ADMINISTRASI_NEGARA_ANTARA_INDONESIA_DENGAN_MALAYSIA_TUGAS_MANDIRI) Diajukan untuk memenuhi Tugas Mata kuliah perbandingan administrasi negara Program studi administrasi negara Dosen pengampu h. [Mei 2023].
- Salsabila, Siti Aulia dan Muhammad Nur Ali. 2023. *Makalah Perbandingan Sistem Administrasi Negara (PSAN) Perbandingan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dan Negara Jepang*. Tersedia: [https://www.researchgate.net/publication/369229250\\_MAKALAH\\_PERBANDINGAN\\_SISTEM\\_ADMINISTRASI\\_NEGARA\\_PSAN](https://www.researchgate.net/publication/369229250_MAKALAH_PERBANDINGAN_SISTEM_ADMINISTRASI_NEGARA_PSAN). [Mei 2023].
- Johari. 2014. *Perbandingan Administrasi Negara*. Tersedia: <https://www.kompasiana.com/johari-upb/54f7ab8aa333119a1d8b46b6/perbandingan-administrasi-negara>. [Mei 2023].
- Ayammahasiswa. 2014. *Makalah Sistem Administrasi dan Perbandingan Antara Negara Thailand dan Negara Indonesia*. Tersedia: <http://ayammahasiswa.blogspot.com/2015/01/perbandingan-antara-negara-thailand-dan.html>. [Mei 2023].
- Repository. *Gambaran Umum Negara Thailand*. Tersedia: <http://repository.radenfatah.ac.id/18481/6/3.pdf>. [Mei 2023].
- Finaka, Andrean W. dan Rosi Oktari. 2022. *Kekuatan Militer Indonesia Peringkat 16 Dunia*. Tersedia: <https://indonesiabaik.id/videografis/kekuatan-militer-indonesia-peringkat-16-dunia>. [Mei 2023].

## PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA SELANDIA BARU

Sherly Anggraeni<sup>1</sup>, Djoko Siswanto M.<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Hang Tuah Surabaya

[sherly.fisip20@hangtuah.ac.id](mailto:sherly.fisip20@hangtuah.ac.id)<sup>1</sup>, [djoko.siswanto@hangtuah.ac.id](mailto:djoko.siswanto@hangtuah.ac.id)<sup>2</sup>

Correspondence Author: [djoko.siswanto@hangtuah.ac.id](mailto:djoko.siswanto@hangtuah.ac.id)

### ABSTRAK

#### Histori Artikel

**Submitted**

4 September 2023

**Reviewed**

17 September 2023

**Accepted**

20 September 2023

**Published**

30 Maret 2024

*Di dalam studi Perbandingan Administrasi Negara terkandung aspek yang relevan, yakni aspek Administrasi Negara yang mengandung pengertian umum tentang bagaimana, lembaga-lembaga negara tumbuh dan hidup didalam suatu negara menjalankan fungsinya. Administrasi Negara merupakan konsep yang memiliki berbagai macam definisi. Merujuk kesepakatan komite ahli administrasi negara di organisasi Perserikatan Bangsa- Bangsa dalam rangka menyamakan persepsi bersama tentang administrasi negara, terdapat setidaknya empat definisi yang berbeda tentang administrasi negara (Committee of Experts on Public Administration, 2006). Pertama, administrasi negara sebagai pengorganisasian kebijakan dan program pemerintah juga perilaku pegawai (yang*

*bukan dipilih secara politis) yang secara formal memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pelaksanaan kebijakan dan program tersebut. Kedua, administrasi negara adalah semua proses, organisasi, dan individu (yang bertindak menduduki jabatan dan memiliki peran) terkait pelaksanaan hukum dan peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dari definisi tersebut diatas, dapat ditarik garis besar, bahwa administrasi negara bukanlah lembaga negara eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, melainkan, keseluruhan pelaksanaan dari apa yang diputuskan oleh lembaga-lembaga negara tersebut dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. Lebih tepatnya, administrasi negara merupakan keseluruhan instrumen lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan dasar hukum dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik, melalui berbagai dimensinya yang meliputi bidang manajemen, anggaran, sumber daya manusia, struktur dan prosedur.*

**Kata kunci:** pemerintah, perbandingan, administrasi negara

### ABSTRACT

*The Comparative Study of State Administration contains relevant aspects, namely aspects of State Administration which contain a general understanding of how state institutions grow and live within a country to carry out their functions. State Administration is a concept that has various definitions. Referring to the agreement of the expert committee on state administration in the United Nations organization in order to equate a common perception on state administration, there are at least four different definitions of state administration (Committee of Experts on Public Administration, 2006). First, state administration as the organizer of government policies and programs as well as the behavior of employees (who are not politically elected) who formally have responsibility in carrying out the task of implementing these policies and programs. Second, state administration is all processes, organizations and individuals (who act in positions and have roles) related to the implementation of laws and other regulations issued by the legislature, executive and judiciary. From the definition above, an outline can be drawn, that state administration is not an executive, legislative, or judicial state institution, but rather, the overall implementation of what is decided by these state institutions in the context of administering public services. More precisely, state administration is the entire instrument of government institutions formed on the basis of law in the context of implementing public services, through its various dimensions covering the fields of management, budget, human resources, structure and procedures.*

*Keywords: government, comparison, state administration*

## PENDAHULUAN

Dalam mengatur pemerintahan sebuah negara harus memiliki cara yang sesuai demi berjalannya negara tersebut. Cara itulah yang sering disebut sebagai sistem pemerintahan. Sehingga sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Walaupun sistem pemerintahan diartikan hampir sama di setiap negara, namun ada kalanya sistem pemerintahan yang diterapkan setiap negara berbeda satu sama lain. Dengan memahami sistem pemerintahan negara-negara lain, akan menambah wawasan kita sekaligus bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi negara kita. Oleh karena itu, setelah mengetahui persamaan dan perbedaan antara sistem pemerintahan, maka kita dapat mengembangkan suatu sistem pemerintahan yang dianggap lebih baik.

Perbedaan penerapan sistem pemerintahan antar negara disebabkan oleh banyak hal, seperti kondisi sosial budaya dan politik yang berkembang di negara yang bersangkutan. Faktor lain yang sangat berpengaruh adalah komitmen elite politik terhadap sistem politik yang hendak diwujudkan, sistem kepartaian yang berkembang di negara yang bersangkutan, tradisi politik yang telah berkembang di negara yang bersangkutan, serta budaya politik dominan di masyarakat yang bersangkutan.

Pertama adalah sistem pemerintahan politik, hal ini perlu diidentifikasi, dalam penerapan perbandingan suatu negara sebab bentuk dan sistem pemerintah adalah faktor utama atas berjalannya suatu negara. Kedua adalah pertumbuhan ekonomi negara yang berkembang di negara yang bersangkutan, hal ini juga sangat berkaitan erat dengan sistem pemerintahan negara yang bersangkutan. Ketiga adalah kesejahteraan sosial dimana hal tersebut lebih berkaitan dengan rakyat. Dari semua faktor di atas terlihat jelas jika masing-masing negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda sekali pun sama tetap ada yang berbeda. Begitu pula, sistem pemerintahan Indonesia terhadap sistem pemerintahan negara lain. Maka penulis menganalisis perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan salah satu negara yaitu Selandia Baru dalam suatu makalah dengan judul, "Perbandingan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dengan negara Selandia Baru", yang akan menjelaskan lebih jauh mengenai perbandingan keduanya.

## METODE

Teknik pengumpulan data adalah proses penting dalam suatu penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data yang andal. Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Internet Searching.

*Internet Searching* adalah proses pencarian data melalui media internet untuk memperoleh informasi berdasarkan referensi, jurnal, artikel ataupun perundang-undangan secara online yang berkaitan objek penelitian.

## HASIL

Negara adalah suatu daerah atau wilayah di permukaan bumi yang memiliki pemerintah yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan sebagainya. Dalam suatu negara minimal ada unsur negara, seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Berikut beberapa pengertian mengenai Negara :

- a. Menurut Roger F. Soltau, Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikannya persoalan bersama atas nama masyarakat.
- b. Menurut Georg Jellinek, Negara adalah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu.



- c. Menurut Prof. R. Djokosoetono, Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.
- d. Menurut Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Negara adalah organisasi kesesuaian sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal.
- e. Menurut Roelof Karannenburg, Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau kehendaknya sendiri.
- f. Menurut H.J Laski, Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah, lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.

Dari uraian di atas pengertian administrasi negara mengandung pengertian kolektif yang meliputi segenap proses penyelenggaraan negara sebagai suatu organisasi yang terdiri dari lembaga-lembaga beserta fungsi masing-masing yang tumbuh dan hidup di dalam suatu negara dan semuanya diarahkan untuk pencapaian tujuan negara. Setiap negara tidak menggunakan cara yang sama. Demikian pula yang menjadi cita-cita atau tuntutan dari warga negara, hal ini didasarkan kepada kebutuhan masing-masing negara sebagai konsekuensi logis adanya perbedaan kebutuhan tersebut. Dengan sendirinya terdapat perbedaan pula dalam pengaturan administrasi masing-masing negara baik dalam mempersiapkan alat pelengkap sebagai sarana pencapaian tujuan maupun cara pencapaian tujuannya sendiri maupun cara pencapaian tujuannya sendiri. Adanya perbedaan atau ketidaksamaan itulah yang menjadikan ruang lingkup yang menonjol dari disiplin cabang ilmu pengetahuan perbandingan administrasi negara karena ruang lingkup pembahasannya tidak terlepas dari sistem administrasi negara dengan berbagai hal berkenaan pemikiran, masalah serta segala institusi yang terdapat di dalamnya.

## DISKUSI

### 1. Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang sempit, pemerintah adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan karena nyatunduk dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya. Inilah ciri penting upaya pemurnian dan penguatan yang dilakukan terhadap sistem pemerintah presidensial berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi. Namun demikian, dalam praktik pada masa reformasi dewasa ini, sering timbul anggapan umum bahwa sistem presidential yang dianut dewasa ini masih beraroma parlementer. Bahkan ada juga orang yang berpendapat bahwa sistem pemerintah yang sekarang kita anut justru semakin memperlihatkan gejala sistem parlementer. Jika pada masa Orde Baru, pusat kekuasaan berada sepenuhnya di tangan Presiden, maka sekarang pusat kekuasaan itu dianggap telah beralih ke DPR. Sebagai akibat pendahulu perubahan dari sistem yang sebelumnya memperlihatkan gejala "executive heavy", sekarang sebaliknya timbul gejala "legislative heavy" dalam setiap urusan pemerintahan yang berkaitan dengan fungsi parlemen. Sistem Pemerintahan Indonesia terdiri dari legislatif, eksekutif dan yudikatif.

### 2. Sistem pemerintahan Selandia Baru

Selandia Baru merupakan negara berbentuk pemerintahan Monarki Konstitusional dengan sistem parlemen. Setelah kedaulatan Inggris di wilayah ini dijalankan pada tahun 1840, Undang-Undang tahun 1852 kemudian menciptakan sistem pemerintahan pertama, termasuk sistem

legislatif bikameral (dua kamar) dan dewan provinsi. Legislasi tambahan seperti eliminasi majelistinggi kemudian memodifikasi kebanyakan provinsi. Seperti halnya Kerajaan Inggris, Selandia Baru tidak memiliki Undang-Undang Dasar khusus. Legislasi konstitusional merupakan akumulasi dari undang-undang dan hukum-hukum tambahan. Selama seratus tahun pertama, kebijakan politik Selandia Baru selalu mengikuti arah kebijakan Inggris. Dalam pernyataan perang dengan Jerman ditahun 1939, Perdana Menteri Michael Savage menyatakan “*Where she goes, we go; where she stands, we stand*”.

Susunan Lembaga Pemerintahan Selandia Baru:

- a. Eksekutif
- b. Legislatif
- c. Yudikatif
- d. Partai Politik
- e. Pemerintahan Lokal
- f. Pertahanan
- g. Organisasi Internasional

### 3. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang, penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan. Di dalam ilmu ekonomi terdapat tiga sektor utama yaitu :

- a. Sektor primer.
- b. Sektor sekunder.
- c. Sektor tersier
- Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
  - a. Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional sebagai sistem paling konvensional dengan dua elemen utama didalamnya yaitu menghargai tradisi dan minimnya jumlah limbah yang dihasilkan. Sistem ekonomi tradisional sendiri identik diterapkan di masyarakat pedesaan dengan hasil ekonomi berupa pertanian. Cara transaksi yang digunakan dengan cara bertukar barang sebab hasil dari alam dan tenaga manusia adalah modal utama di masyarakat saat itu. Dalam sistem ekonomi tradisional Pemerintah tidak berhubungan langsung dalam aktivitas ekonomi, ia hanya berperan sebagai penjaga ketertiban. Tujuan utama sistem ekonomi ini sendiri hanya sampai kepada kebutuhan hidup sehari-hari masyarakatnya yang terpenuhi bukan mencari keuntungan.

- b. Sistem Ekonomi Komando

Sistem ekonomi komando memiliki sistem yang terpusat, dan terdominasi. Sebagian besar sistemnya akan dikendalikan oleh pemerintah yang terlibat dalam proses produksi mulai dari peralatan hingga ke fasilitasnya. Faktor dominasi sendiri jelas terlihat pada sumber daya berharga, karena sesuatu yang mampu menghasilkan keuntungan terbesar akan dikuasai oleh pemerintah dan sumber daya lainnya akan dikelola oleh rakyat.

- c. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran atau dikenal juga dengan istilah dual economy sebab mengkombinasikan sistem ekonomi pasar dan komando. Hasilnya pemerintah dan pasar kemudian bekerja sama dalam mengelola sumber daya yang ada. Pemerintah mengakui hak milik perorangan dengan catatan tidak merugikan kepentingan umum. Pemerintah berperan dalam memberikan batasan dan dapat melakukan intervensi, Pemerintah membuat perencanaan, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan

dengan perekonomian, Persaingan kemudian terjadi di pasar dalam batas yang wajar dan bersih dimana pemerintah turut melakukan pengawasan.

Mekanisme pasar akan menentukan jenis dan jumlah barang yang diproduksi. Pemerintah menguasai semua sumber daya vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pihak pemerintah dan swasta memiliki peran yang sama dalam kegiatan perekonomian. Meski demikian sistem ini juga rawan mengalami masalah khususnya saat kekuatan pemerintah meningkat.

d. Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis adalah sistem yang masyarakatnya memiliki kesetaraan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi (Pekerja, pengusaha, modal dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat tapi pengelolaannya diatur oleh negara secara penuh). Pemerintah juga berperan penuh dalam mengatur distribusi dan hasil produksi. Di Indonesia sendiri terdapat satu bentuk ekonomi Pancasila yang berlandaskan kepada ideologi Pancasila dengan makna ekonomi demokrasi dan menganut asas kekeluargaan serta gotong royong dengan konsep dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam sistem Pancasila tersebut, koperasi juga dijadikan salah satu ujung tombak oleh pemerintah Indonesia dalam memajukan perekonomian.

e. Sistem Ekonomi Pasar

Sistem Ekonomi pasar terlihat lebih identik dengan pasar bebas. Dalam sistem ini, organisasi yang dijalankan oleh masyarakatlah yang menentukan bagaimana perekonomian akan berjalan, bagaimana pasokan dihasilkan hingga tuntutan apa saja yang diperlukan. Faktanya, tidak ada satupun negara di dunia yang menerapkan sistem ini secara penuh. Keuntungan terbesar dari sistem pasar ini adalah terpisahnya pasar dan pemerintah. Hal ini mengurangi dominasi pemerintah dan kemajuan serta inovasi bisa berkembang dengan lebih cepat. Dengan adanya sistem ini, maka pebisnis juga harus dapat menyikapi dengan cepat berbagai resiko dari pasar bebas seperti kemungkinan adanya inflasi dan pahami dengan cepat penyebab dari inflasi tersebut.

f. Sistem Ekonomi Liberal

Sistem ekonomi liberal adalah sebuah sistem ekonomi yang di mana semua anggota masyarakat diberikan kebebasan oleh negara untuk melakukan kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, sistem ekonomi yang satu ini sering juga disebut dengan istilah sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi liberal bisa dibilang sebagai sistem ekonomi yang lebih mengutamakan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga pengusaha akan selalu berusaha untuk selalu produktif agar keuntungan tetap terjaga.

g. Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berlandaskan demokrasi ekonomi. Dengan kata lain, semua kegiatan ekonomi di bawah kendali setiap anggota masyarakat, sehingga kemakmuran dan kesejahteraan anggota masyarakat menjadi hal yang utama. Oleh sebab itu, sistem ekonomi ini sering disebut juga dengan nama ekonomi pancasila.

Pertumbuhan ekonomi bertambah untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir, naik menjadi persen pada tahun 2016 dari 4,9 persen pada 2015, meski ketidakpastian kebijakan global masih tinggi. Rupiah yang stabil, inflasi yang rendah, turunnya angka pengangguran dan naiknya upah riil mengangkat kepercayaan konsumen dan konsumsi swasta. Sebaliknya, belanja pemerintah dan pertumbuhan investasi melambat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi untuk 2016 secara keseluruhan. Fondasi ekonomi Indonesia tetap kokoh, diukung tingkat pertumbuhan ekonomi yang kuat, defisit neraca berjalan dan tingkat pengangguran beberapa tahun terakhir yang rendah dalam, defisit fiskal yang terjaga baik, serta inflasi yang rendah. Kemiskinan dan ketimpangan juga menurun pada tahun 2016.

Defisit neraca berjalan saat ini berada di tingkat terendah dalam 5 tahun terakhir, yaitu 0.8% dari PDB pada kuartal keempat 2016, karena ekspor manufaktur menguat. Untuk tahun 2016 secara keseluruhan, defisit neraca berjalan berkurang dari 1,8% dari 2.0% pada tahun 2015. Pertumbuhan PDB riil diproyeksikan naik menjadi 5,2 persen ditahun 2017, dan mencapai 5,3 persen

pada 2018. Konsumsi rumah tangga diproyeksikan semakin baik dengan adanya Rupiah yang stabil, upah riil lebih tinggi dan terus menurunnya angka pengangguran. Pertumbuhan investasi swasta diproyeksikan naik seiring pulihnya harga-harga komoditas, serta dampak kemudahan moneter pada tahun 2016 dan mulai berdampak reformasi ekonomi belakangan ini. Harga komoditas yang lebih tinggi juga akan mengurangi hambatan fiskal dan mengangkat belanja pemerintah, sementara pertumbuhan global yang lebih kuat akan mendorong ekspor.

- Pertumbuhan Ekonomi Selandia Baru  
Selandia Baru memiliki sistem ekonomi liberalis maupun kapitalis karena memiliki ciri-ciri:
  - a. Semua sumber produksi adalah milik masyarakat individu.
  - b. Masyarakat di beri kebebasan dalam memiliki sumber – sumber produksi.
  - c. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
  - d. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya dan masyarakat buruh.
  - e. Barang – barang yang dihasilkan bermutu tinggi.
  - f. Selandia baru tidak termasuk sistem perekonomian Etatisme maupun Sosialis karena :
  - g. Pemerintahan di Selandia Baru tidak menguasai langsung dalam kegiatan ekonominya.
  - h. Semua alat produksi tidak dikuasai oleh negara.

Berikut perkembangan ekonomi di Selandia Baru :

- a. Ekonomi Selandia Baru melebihi ekspektasi menjadi tumbuh 0,8% poin pada kuartal September karena Piala Dunia Rugby mendorong produk domestik bruto
- b. Kekuatan baru di sektor manufaktur juga mengangkat pertumbuhan, yang berarti ekonomi tumbuh 1,3% dalam 12 bulan hingga 30 September 2017
- c. Statistik Selandia Baru (SNZ) mengatakan. Hasil kuartalan menunjukkan perekonomian memantul kembali dari pertumbuhan hanya 0,1 poin dalam tiga bulan sampai Juni dan melampaui prakiraan pasar naik 0,6 poin.
- d. Penggerak besar di manufaktur adalah dari makanan, minuman, dan tembakau, yang telah meningkat terbesar sejak 2002 Manufaktur naik 2,3 poin selama kuartal tersebut, dengan makanan, minuman, dan tembakau melonjak 6,3 poin didukung kenaikan produksi daging dan susu dalam ekonomi yang mengandalkan pertanian
- e. Pertumbuhan Selandia baru di pengaruhi dengan di adakannya sistem pasar bebas, dengan adanya sistem ini perekonomian disana dapat meningkatkan karena didukung oleh faktor kekayaan alam yang dimiliki oleh selandia baru.

#### 4. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan adalah suatu sistem yang terorganisir dari usaha-usaha dan lembaga sosial yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan mereka untuk membangun hubungan pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan mereka secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

- i. Kesejahteraan Pendidikan Indonesia

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang dalam posisinya masih dikatakan sebagai Negara berkembang sedang mencari bentuk tentang bagaimana cara dan upaya agar menjadi negara maju terutama dibidang pendidikan. Berbagai upaya telah dilakukan Indonesia dalam mencapai tujuan tersebut. Salah satunya dengan ditetapkannya kebijakan wajib belajar 12 tahun yang diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Segala upaya dalam penerapan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa hingga kini masih dijalankan. Bahkan, Indonesia telah mengeluarkan berbagai inovasi mengenai bantuan-bantuan pendidikan guna menunjang pencapaian tujuan tersebut. Terdapat Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Operasional Siswa (BOS), hingga Program Indonesia Pintar pun juga direalisasikan.

ii. Kesejahteraan Pendidikan Selandia Baru

Kurikulum di New Zealand sifatnya adalah kurikulum umum yang memfokuskan pada pembelajaran secara individual dan dalam kelompok kecil. Karena sifatnya hanya mencakup hal-hal yang umum saja, maka sekolah diberi kesempatan untuk melakukan modifikasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Tidak ada ujian nasional yang diselenggarakan di sekolah-sekolah di New Zealand hingga siswa berusia 15 tahun, ketika siswa belajar di secondary school. Penilaian lebih banyak dilakukan secara formatif. Selain itu, outdoor education juga menjadi salah satu titik fokus pada kurikulum yang berlaku di New Zealand. Kebanyakan sekolah di New Zealand adalah sekolah negeri, sehingga dukungan dari pemerintah dan masyarakat merupakan faktor pendukung utama penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

*Primary Education* dimulai dari Kindergarten (TK/Taman Kanak-Kanak) sampai Year 8 (kelas 8). Usia yang ada di jenjang ini mulai dari anak usia 5 – 12 tahun. Jadi ini bisa disebut jenjang TK sampai SD. *Secondary Education* dimulai dari Year 9 – Year 10 (SMP) terus lanjut ke Year 11 – Year 13 (SMA), dan Jenjang Year 11 – Year 13 juga biasa disebut NCEA Level 1 – NCEA Level 3. NCE (National Certificate of Education Achievement) adalah kurikulum dari pemerintah Selandia Baru. Kurikulum ini telah diakui di negara lain seperti di Inggris, Australia, Amerika, dll. Jadi ini adalah jenjang SMP nyampe SMA di Selandia Baru. Ya, mereka memang sampai kelas 13 beda dengan Indonesia yang hanya sampai kelas 12. *Tertiary Education* ini jenjang setelah lulus kelas 13. Di mulai dari Certificate Education, Diploma, Bachelors Degree, Graduate Certificate/Graduate Diploma, Honours Bachelors Degree, Post Graduate Certificate/Post Graduate Diploma, Master, Doctorate.

## 5. Jaminan Sosial

Jaminan sosial ialah salah satu bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

- Jaminan Sosial Indonesia

Berdasarkan Pasal 18 UU 40/2004 yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja ini, terdapat beberapa jenis program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial meliputi:

1. Jaminan kesehatan

Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.

2. Jaminan kecelakaan kerja

Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja.

3. Jaminan hari tua

Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

4. Jaminan pensiun

Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Manfaat jaminan pensiun berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan sebagai:

- a. Pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun sampai meninggal dunia;
- b. Pensiun cacat, diterima peserta yang cacat akibat kecelakaan atau akibat penyakit sampai meninggal dunia;
- c. Pensiun janda/duda, diterima janda/duda ahli waris peserta sampai meninggal dunia atau menikah lagi;
- d. Pensiun anak, diterima anak ahli waris peserta sampai mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah; atau
- e. Pensiun orang tua, diterima orang tua ahli waris peserta lajang sampai batas waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan

5. Jaminan kematian

Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Manfaat jaminan kematian berupa uang tunai dibayarkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah klaim diterima dan disetujui BPJS.

6. Jaminan kehilangan pekerjaan

Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan. Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

7. Jaminan Sosial Selandia Baru

Program jamsos yang diberikan meliputi jaminan kesehatan (JK)komprehensif seperti Jamkesmas di Indonesia. JK juga memberikan manfaatuang tunai bagi orang yang sementara tidak bisa bekerja karena sakit, cacat, ataukecelakaan. Kemudian jaminan pengangguran (*unemployment benefit*) bagi penduduk yang berusia diatas 18 tahun dan belum memiliki pekerjaan (kecuali bagi mahasiswa) yang secara otomatis berhenti bila sudah mendapat pekerjaan. Juga jaminan kecacatan (*invalid's benefit*) bagi penyandang cacat permanen akibat kecelakaan atau sakit yang kronis, dan jaminan pensiun bagi penduduk berusia diatas 65 tahun. Selain ke 4 jamsos tersebut tersebut, masih ada beberapa jaminan lainnya antara lain santunan untuk para pejuang dan veteran, bantuan untuk lansia yang tinggal sendiri, bantuan anak (*child benefit*) serta bantuan biaya hidup bagi mahasiswa. Sebagai badan pelaksana *Ministryof Social Devement, Ministry of Health, Ministry of Labour*, dan Badan Kompensasi Kecelakaan (*Accident Compensation Corporation*).

**6. Perbandingan Sistem Administrasi Negara Indonesia dengan Sistem Administrasi Negara Selandia Baru**

No	Kategori	Indonesia	Selandia Baru
1.	Bentuk Negara	Kesatuan dengan otonomi luas mempunyai 33 provinsi	25 wilayah, 13 dewan kota, 53 dewan distrik
2.	Bentuk Pemerintahan	Republik	Monarki Konstitusional
3.	Sistem Pemerintahan	Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun	Parlementer
4.	Eksekutif	Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dipilih oleh rakyat secara langsung ( pemilu )	Ratu sebagai Kepala Negara, Gubernur jenderal
5.	Legislatif	Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota	Majelis Perwakilan

		MPR	
6.	Yudikatif	MA dan badan peradilan di bawahnya dan MK	Mahkamah Distrik, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Banding, dan Mahkamah Agung,
7.	Pendidikan	Wajib belajar 12 tahun Terdapat berbagai jaminan pendidikan (BOS, BSM, Program Siswa Pintar)	Wajib belajar 20 tahun Kurikulum fleksibel Anggaran wajib belajar 20 tahun gratis
8.	Jaminan Sosial	Jaminan Kesehatan (BPJS, KIS) Jaminan Cacat Jaminan Kecelakaan Jaminan Hari Tua Jaminan Ketenagakerjaan Jaminan Kematian	Jaminan Pengangguran Jaminan Kecacatan Jaminan Kesehatan Jaminan Pensiun Segala anggaran dana ditanggung oleh pemerintah.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan sistem pemerintahan Indonesia dan Selandia Baru, penulis dapat menyimpulkan bahwa keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Ini memiliki sistem presidensial di Indonesia dan sistem parlementer di Selandia Baru. Di Indonesia, kepala negara adalah presiden, sedangkan di Selandia Baru, ratu/raja adalah kepala negara. Bentuk pemerintahan di Indonesia adalah republik, di Selandia Baru monarki konstitusional. Tentunya setiap orang memiliki pro dan kontra dalam melaksanakan program dan kebijakan yang ada. Dimana Indonesia lebih ingin melakukan inovasi kebijakan di bidang perlindungan sosial namun tertahan oleh kondisi ekonomi, sedangkan Selandia Baru memiliki program yang cukup percaya diri dengan anggaran yang sangat besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- PKN-STAN. 2018. *Seri Ekonomi makro – teori Pertumbuhan ekonomi*. Tersedia: <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/klc1-seri-ekonomi-makro-teori-pertumbuhan-ekonomi/detail/>. [Mei 2023].
- Learninghub. *Jaminan Sosial Apa Saja Yang Diberikan Oleh Indonesia Kepada Warganya*. Tersedia: <https://learninghub.id/jaminan-sosial-apa-saja-yang-diberikan-oleh-indonesia-kepada-warganya/>. [Mei 2023].
- Ermawati, Eli. 2017. *Perbedaan Sistem Pemerintahan di Negara Indonesia Dengan di Negara Selandia Baru*. Tersedia: <https://elitugasku.blogspot.com/2017/03/bab-i-pendahuluan-1.html>. [Mei 2023].
- Kurniasih, Wida. 2021. *Apa Itu Sistem Pemerintahan? Berikut Penjelasannya*. Tersedia: <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-sistem-pemerintahan/>. [Mei 2023].
- Ahmad. 2021. *7 Sistem Ekonomi Beserta Kelebihan dan Kekurangannya*. Tersedia: <https://www.gramedia.com/literasi/macam-sistem-ekonomi/>. [Mei 2023].
- Indonesia Investments. *Ikhtisar Struktur Politik Indonesia*. Tersedia: <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/ikhtisar-struktur-politik/item385>. [Mei 2023].
- Kompas. 2021. *Produksi Sektor Primer dan Sekunder*. Tersedia:

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/11/130225969/produksi-sektor-primer-sekunder-dan-tercier?page=all>. [Mei 2023].

Adminkeperintahan. 2020. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Tersedia:

<https://pemerintahan.uma.ac.id/2020/10/sistem-pemerintahan-indonesia/>. [Mei 2023].



## PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN

Nur Wahyuni<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Hang Tuah Surabaya

[wahyuninur656@gmail.com](mailto:wahyuninur656@gmail.com)<sup>1</sup>

Correspondence Author: djoko.siswanto@hangtuah.ac.id

### ABSTRAK

#### Histori Artikel

**Submitted**

4 September 2023

**Reviewed**

17 September 2023

**Accepted**

24 September 2023

**Published**

30 Maret 2024

Istilah "Perbandingan" dalam Ilmu Administrasi Negara Perbandingan, terkandung pengertian menjajarkan serta menarik segi persamaan dan/atau perbedaan dari gejala-gejala atau fenomena- fenomena atau sasaran-sasaran. Sedang Administrasi dalam pengertiannya yaitu sebagai salah satu gejala kehidupan dalam masyarakat di dalam mana sekelompok manusia atau warga negara beraktivitas untuk mewujudkan atau mencapai tujuan tertentu. Penelitian yang dilaksanakan menggunakan penelitian kepustakaan sehingga metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi pustaka. Fokus penelitian ini adalah pada Membandingkan Birokrasi dan Sistem Administrasi Negara Indonesia dengan Korea Utara. Dimana teknik yang digunakan dalam

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan aspek yang diperbandingkan adalah Sistem Birokrasi dan Sistem Administrasi Negara Indonesia dengan Korea Selatan. Perbandingan Sistem Birokrasi di Negara Indonesia dengan Negara Korea Selatan meliputi Birokrasi Berdasarkan Golongan dan Manajemen Birokrasi. Dan Perbandingan Sistem Administrasi di Negara Indonesia dengan Korea Selatan berdasarkan budaya negara tersebut, meliputi Sistem Presidensial, Sistem Hukum, Sistem Administrasi Keuangan dan Sistem Pemerintahan Daerah.

**Kata kunci:** Perbandingan, Sistem Administrasi, Birokrasi

### ABSTRACT

The term "comparison" in the Science of Comparative State Administration contains the meaning of juxtaposing and drawing terms of similarities and/or differences from symptoms, phenomena, or goals. Administration, in its sense, is one of the symptoms of life in society in which a group of people or citizens act to realize or achieve certain goals. Research is carried out using library research, so the method used in research is literature study. The focus of this research is on comparing Indonesia's bureaucracy and state administration system with those of North Korea. The technique used in collecting data in this study uses secondary data. Data analysis used descriptive and qualitative analysis through a literature study. The results of the study show that the aspects being compared are the Indonesian bureaucratic system and state administration system with South Korea. A comparison of the bureaucratic systems in Indonesia and South Korea includes bureaucracy based on groups and bureaucratic management. And a comparison of the administrative systems in Indonesia and South Korea based on the country's culture, including the presidential system, legal system, financial administration system, and regional government system.

**Keywords:** Comparison, Administration System, Bureaucracy

## PENDAHULUAN

Negara Perbandingan Administrasi Negara adalah ilmu yang baru bila dibandingkan dengan Ilmu Perbandingan Politik yang merupakan ilmu yang ditemukan asalnya pada zaman Aristoteles. Pada masa awalnya sebelum permulaan abad ke-20 studi Administrasi Negara Perbandingan itu terjalin di dalam studi Pemerintahan. Kemudian, setelah Perang Dunia II dengan pernyataan Robert E. Dahl (1947) ilmu ini mulai mendapatkan perhatian dan tahun itu, kemudian dinyatakan sebagai awal kelahiran Ilmu Administrasi Negara Perbandingan, kemudian berlanjut dengan diadakannya konferensi Princeton tahun 1952 guna membahas lebih lanjut masalah penelitian dan metode pengajaran yang sistematis dari Administrasi Negara Perbandingan tersebut. Setelah diselenggarakannya Konferensi Princeton tahun 1952 tersebut perhatian terhadap Administrasi Negara Perbandingan semakin meningkat terbukti dengan semakin banyaknya karya tulis dalam bidang tersebut dengan dipelopori oleh William J. Siffin pada tahun 1957, dan sejak tahun 1957 itulah sampai dewasa ini Ilmu Perbandingan Administrasi Negara terus mengalami perkembangannya.

Dilihat dari judul dan istilah “Perbandingan” dalam Ilmu Administrasi Negara Perbandingan, terkandung pengertian menjajarkan serta menarik segi persamaan dan/atau perbedaan dari gejala-gejala atau fenomena-fenomena atau sasaran-sasaran. Sedangkan Administrasi dalam pengertian yang lazim pada literature (kepuustakaan) tentang hal ini, khususnya tentang Administrasi Negara dan Ilmu Politik umumnya, dimaksudkan sebagai William J. Siffin kemukakan tentang Administrasi Negara, yaitu sebagai salah satu gejala kehidupan dalam masyarakat di dalam mana sekelompok manusia atau warga negara beraktivitas untuk mewujudkan atau mencapai tujuan tertentu.

Dengan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa perbandingan administrasi negara adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji sistem pelayanan negara dan penyelenggaraan negara dengan pendekatan perbandingan. Perbandingan ini bertujuan membandingkan pola-pola administrasi dari berbagai sudut pandang, antara lain membandingkan administrasi penyelenggaraan negara sebelum dan sesudah kemerdekaan, perbandingan administrasi tradisional dengan modern, perbandingan administrasi negara monarki dan republik, dan sebagainya. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa perbandingan administrasi negara juga mengkaji administrasi negara dengan pendekatan perbandingan antar-berbagai aliran, antar-kebudayaan yang berbeda, antar-orde yang berbeda, misalnya antara orde lama dan orde baru, orde baru dan orde reformasi sebagaimana yang dialami di negara republik Indonesia.

Perbandingan administrasi negara juga mengkaji perbandingan institusional dalam penyelenggaraan negara. Perbandingan institusional dilakukan seperti perbandingan administrasi di lingkungan sipil dengan administrasi di lingkungan institusi militer. Kedua institusi yang terdapat di dalam negara memiliki perbedaan yang signifikan, di antaranya membandingkan pola penerimaan pegawai baru di lingkungan sipil dengan militer.

Perbandingan administrasi negara juga mengkaji administrasi dengan melihat unsur-unsur kebudayaan yang terdapat di dalamnya. Hal yang diperbandingkan adalah sistem administrasi negara yang berada pada dua negara atau lebih lingkungan kebudayaan yang berbeda. Hal itu karena setiap negara mempunyai kebudayaan berbeda yang memengaruhi pola penyelenggaraan negaranya masing-masing. Misalnya, membandingkan administrasi negara Indonesia dengan Korea Selatan. Meskipun kedua negara tersebut sama-sama negara ASEAN, pola penyelenggaraan negaranya sangat berbeda karena kebudayaan masing-masing pun berbeda, misalnya meskipun negara Indonesia dan Korea Selatan sama-sama berpegang pada prinsip presidensial, namun masa menjabat sebagai presiden berbeda. Di Indonesia masa jabatan Presiden maksimal dua priode sedangkan di Korea Selatan presiden yang memimpin hanya bias memimpin dalam satu priode saja.

Dalam artikel Perbandingan Administrasi Negara ini, penulis akan menguraikan perbedaan dalam Perbandingan Administrasi Negara. Aspek yang diperbandingkan adalah Sistem Birokrasi dan Administrasi Negara Indonesia dengan Korea Selatan sebagai fokus Perbandingan Administrasi Negara.

## METODE

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan penelitian kepustakaan sehingga metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi pustaka. Mendes, Wohlin, Felizardo dan Kalinowski, (2020) menyatakan proses penelitian kepustakaan dilakukan dengan meninjau literatur dan menganalisis topik relevan yang digabungkan. Penelusuran pustaka dapat memanfaatkan sumber berupa jurnal, buku, kamus, dokumen, majalah dan sumber lain tanpa melakukan riset lapangan. Fokus penelitian ini adalah pada Membandingkan Birokrasi dan Sistem Administrasi Negara Indonesia dengan Korea Utara. Dimana teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni dengan mengumpulkan data secara tidak langsung dengan meneliti objek yang bersangkutan.

Selanjutnya menganalisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, hasil dari analisis berupa data deskriptif berupa kalimat tertulis dan hasil perilaku yang diamati dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Meninjau (Miles dan Huberman, 2014), terdapat beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL

Berikut Perbandingan Sistem Birokrasi di Negara Indonesia dengan Negara Korea Selatan meliputi; Birokrasi Berdasarkan Golongan dan Manajemen Birokrasi. Dan Perbandingan Sistem Administrasi di Negara Indonesia dengan Korea Selatan berdasarkan budaya negara tersebut, meliputi; Sistem Presidensial, Sistem Hukum, Sistem Administrasi Keuangan dan Sistem Pemerintahan Daerah.

### PERBANDINGAN SISTEM BIROKRASI ANTARA INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN

Indonesia memiliki kesamaan karakter budaya birokrasi dengan Korea Selatan. Karakter bangsa yang bercirikan paternalism telah mempengaruhi budaya birokrasi yang bersifat tertutup dan memiliki orientasi senioritas yang sangat kuat. Akibatnya, sistem prestasi (merit), kompetisi terbuka dan kompetensi relatif terabaikan. Dalam sistem yang tertutup seperti itu, koneksi, kronisme dan nepotisme menjadi tumbuh subur.

#### 1. Birokrasi Berdasarkan Golongan

Birokrasi Indonesia mempunyai empat Golongan (I-IV) dengan 17 pangkat : tiga golongan (I-III) masing-masing mempunyai empat pangkat (A-D) dan golongan tertinggi (IV) dengan lima golongan (A-E). Indonesia mempunyai empat eselon (IV), secara langsung berhubungan dengan posisi-posisi struktur yang berarti posisi yang mempunyai otoritas dalam pengambilan keputusan. Eselon I adalah posisi tertinggi dan mempunyai posisi-posisi seperti direktur jenderal, para deputy, sekretaris jenderal.

Sedangkan karir Pegawai negeri sipil Korea mempunyai sistem golongan dengan Sembilan peringkat/pangkat berbeda. Para menteri dan wakil-wakil menteri merupakan orang-orang yang ditunjuk secara politik dan didalam kepangkatan pegawai negeri sipil karir menteri pembantu mempunyai golongan tertinggi. Dibawah pengawasan para menteri pembantu, para direktur jenderal membawahi para kepala divisi, tetapi terkadang diantara direktur jenderal dan kepala divisi juga ada deputy direktur jenderal.

#### 2. Manajemen Birokrasi

##### a) Proses Rekrutmen

Korea mempertahankan proses rekrutmen tersentralisasi untuk para pejabat daerah dan pusat. Ada tiga proses untuk masing-masing tes.

- Tes pertama, tes pilihan ganda, umum untuk semua bidang layanan dan subyek-subyek tes adalah Public Service Attitude, Konstitusi dan TOEFL.
- Ujian kedua menawarkan tes tertulis hanya untuk orang-orang yang lulus tes pertama dan diantara subyek-subyek wajibnya adalah Hukum Administrasi, Administrasi Publik, Ekonomi dan Politik, sementara Undang-undang Perdata, Manajemen Informasi, Metode

Survei, Kebijakan Publik dan Administrasi Daerah selektif.

- Ujian ketiga adalah wawancara yang setelah secara virtual tidak berarti tetapi memperoleh kepentingan sebagai perbaikan transparansi.

Sedangkan di Indonesia Kewenangan untuk melaksanakan proses rekrutmen calon PNS diserahkan kepada masing-masing Kementerian. Walaupun terdiri dari beberapa tahap, namun hal ini menimbulkan beberapa masalah :

- Tes pada rekrutmen CPNS tidak memilih orang yang tepat.
- Timbulnya biaya administrasi pada proses rekrutmen yang berlebihan.
- Proses rekrutmen yang tidak transparan, terutama pada sesi wawancara yang dapat membuka peluang nepotisme.

b) Rotasi Pekerjaan

Indonesia dan Korsel memiliki masalah yang berbeda dalam pelaksanaan rotasi pekerjaan. Di Korsel, rotasi pekerjaan terlalu sering dilakukan yaitu setiap 14 bulan sekali, yang menyebabkan rendahnya akuntabilitas karena orang yang menduduki jabatan sering berganti-ganti.

Sedangkan di Indonesia, rotasi pekerjaan masih belum memiliki standar yang jelas, ada beberapa orang yang terlalu lama untuk menduduki jabatannya, sehingga menimbulkan demotivasi bagi yang bersangkutan karena terlalu lama melaksanakan pekerjaan yang sama, namun disisi lain, hal tersebut efektif untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pada jabatan tersebut.

c) Penilaian

Pada akhir setiap tahun, hasil penilaian tersebut dimasukan kedalam rangkaian daftar yang disebut Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Namun pada kenyataannya indikator penilaian yang ada dalam DP3 tidak dapat diukur dan bersifat subyektif.

Sedangkan di Korea Selatan telah menggunakan metode penilaian 360o , sehingga penilaian tersebut dapat diukur dan obyektif. Kriteria yang dinilai adalah kompetensi, sikap dan kinerja dengan sedikit spesifikasi yang lebih rinci.

d) Komunikasi di Dalam Pemerintahan

Di Indonesia untuk komunikasi dengan supervisor atau jabatan-jabatan yang setara, orang harus mengisi formulir tertulis yang disebut Memo atau Nota Dinas. Alat-alat komunikasi elektronik seperti e-mail atau e-otororitasi belum dipertimbangkan sebagai alat-alat formal.

Sedangkan di Korea Selatan komunikasi yang bersifat horizontal di dalam organisasi pemerintahan cukup menggunakan email atau telepon. Sedangkan untuk komunikasi vertikal terutama yang bersifat resmi, harus menggunakan surat dinas.

## PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA DONESIA DENGAN KOREA SELATAN

### Berikut Perbandingan Sistem Presidensial di Negara Indonesia dan Korea Selatan:

#### A. Sistem Presidensial di Indonesia

Indonesia adalah negara yang menganut sistem Presidensial. Walau sejak awal Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum amandemen) telah menjadi pedoman pelaksanaan pemerintahan, namun dikarenakan situasi dan kondisi Indonesia yang baru merdeka membuat keadaan tidak kondusif, sehingga pelaksanaannya pun belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. UUD 1945 telah dilakukan amandemen sebanyak 4 (empat) kali dari tahun 1999 hingga 2002.

Secara Konstitusional Negara Republik Indonesia menganut sistem Presidensial yang memiliki arti pemegang kendali dan penanggungjawab jalannya pemerintahan negara adalah Presiden sedangkan Menteri hanyalah sebagai pembantu Presiden, hal tersebut tertuang dalam batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya Indonesia menganut prinsip pemisahan kekuasaan dengan penerapan check and balances antar lembaga. Indonesia menganut pembagian kekuasaan trias politica ala Montesqueieu yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Selain itu, Indonesia memiliki lembaga tinggi negara, yaitu lembaga negara yang berkedudukan

di tingkat pusat yang pembentukannya diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Lembaga tinggi negara tersebut ialah, lembaga Kepresidenan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pengawas Keuangan. Karena lembaga-lembaga tersebut dibentuk berdasarkan amanah konstitusi maka kerap disebut sebagai lembaga konstitusional, lembaga konstitusional memiliki derajat yang sama, semenjak amandemen Undang-Undang dasar maka tidak ada lagi lembaga tertinggi negara yang tadinya dimiliki oleh MPR, namun sekarang hanya dibedakan berdasarkan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Presiden yang didampingi oleh Wakil Presiden dalam memegang kekuasaan eksekutif. Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemilihan umum dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak satu kali untuk masa jabatan yang sama. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang tergabung dalam satu kabinet yang disusun berdasarkan hak prerogatif Presiden sendiri. Segala hal yang berkaitan dengan Presiden dan Wakil Presiden termaktub dalam pasal 4 sampai pasal 16 UUD NRI 1945.

Melihat fakta sejarah, dalam UUD 1945 yang pertama (Sebelum amandemen), Indonesia menganut sistem presidensial, dengan Presiden Soekarno selaku Presiden pertama RI adalah pemegang kekuasaan pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Saat itu, Presiden secara prerogatif mengumumkan 12 menteri pemimpin departemen dan 4 menteri negara. Pada saat yang bersamaan Presiden juga mengangkat Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, dan Juru Bicara Negara. Namun demikian, dikarenakan situasi dan kondisi Indonesia yang baru merdeka membuat keadaan tidak kondusif, sehingga pelaksanaannya pun belum dapat dijalankan secara murni dan konsekwen.

Kabinet pertama dengan sistem quasi Presidensial sesuai UUD 1945 yang dibentuk pada 2 September 1945 tersebut mengalami perubahan pada dua bulan setelahnya. Meski mengalami perubahan pada sistem ketatanegaraan dalam praktiknya namun hal tersebut tidak merubah (mengamandemen) UUD 1945. Menurut Mahfud MD, perubahan sistem pemerintahan ini tanpa mengamandemen Undang-Undang Dasar,<sup>6</sup> mengakibatkan terjadi perbedaan antara landasan Konstitusional dengan praktik pelaksanaannya. Perubahan sistem ketatanegaraan ini terjadi setelah dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tahun 1945. Inti dari maklumat ini adalah penyerahan kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (karena pada saat itu belum ada DPR dan MPR).

Pada tanggal 14 November 1945 dikeluarkan lagi Maklumat Pemerintah yang menjadikan dimulainya sistem pemerintahan parlementer, dengan dibentuknya kabinet parlementer pertama yang dipimpin oleh Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Pada saat itu Kabinet dan Perdana Menteri bertanggungjawab kepada KNIP. Sejak saat itulah, sistem pemerintahan presidensial berganti dengan sistem pemerintahan parlementer. Selama berjalannya sistem ini, UUD 1945 tidak mengalami perubahan secara tekstual. Oleh karena itu sebagian orang berpendapat bahwa perubahan dalam sistem pemerintahan ini melanggar UUD 1945.

Kabinet Parlementer Syahrir hanya bertahan sampai 29 Juni 1946 ketika Soekarno kembali mengambil alih kekuasaan saat terjadi keadaan darurat. Pada 29 Januari 1948 Soekarno kembali membentuk Kabinet Presidensial dan mengutus Mohammad Hatta selaku Wakil Presiden untuk memimpin kabinet sehari-hari. Dikarenakan kondisi keamanan negara yang masih belum kondusif akibat tekanan dari pihak Belanda, Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia harus bergabung menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Hal ini menyebabkan adanya dua konstitusi yang berlaku secara bersamaan, yaitu Konstitusi RIS dan UUD 1945. Pada tanggal 27 Desember 1949, Presiden RI Soekarno menyerahkan secara resmi kekuasaan pemerintahan RI kepada Mr. Asaat Datuk Mundo yang sebelumnya menjadi Ketua Badan Pekerja KNI setelah Soekarno menjadi Presiden Negara Federasi. Sedangkan Mohammad Hatta terpilih sebagai perdana Menteri Federasi.

Namun pada tanggal 19 Mei 1950 RI dan RIS mencapai kesepakatan untuk bergabung kembali dalam bentuk Negara Kesatuan. pada 15 Agustus 1950 proklamasi berdirinya kembali NKRI menggantikan Federasi RIS diumumkan di depan DPR dan Senat. Konstitusi RIS diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dan pada hari itu juga, pemangku jabatan Presiden RI

diserahkan kembali dari Assat kepada Soekarno.

Perdana menteri dalam era UUDS 1950 ternyata tidak menjamin keberlangsungan kabinet menjadi kondusif dan bertahan lama. Ketidakcocokan pun tetap terjadi baik dari segi kebijakan dan program yang dinilai kurang berhasil atau gagal dilaksanakan. Hingga ketidakcocokan ideologi antar pejabat. Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 menjadi titik awal kembalinya Indonesia sebagai penganut sistem pemerintahan presidensial dengan membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

## **B. Sistem Presidensial Korea Selatan**

Kemerdekaan Korea pada 15 Agustus 1945 tidak serta merta memiliki pemerintahan mandiri. Kemerdekaan yang diperoleh Korea disebabkan oleh kekalahan Jepang atas sekutu. Seiring berakhirnya Perang Dunia II semenanjung Korea berada dalam kekuasaan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Oleh karena itu PBB membuat rencana administrasi bersama Uni Soviet dan Amerika Serikat, namun rencana tersebut tidak terlaksana. Pada tahun 1948 terbelahlah Korea Menjadi Korea Selatan yang beraliran politik demokrasi liberal, dan Korea Utara yang berideologi komunis.

Korea Selatan juga merupakan negara yang menganut sistem Presidensial. Dalam urusan ketatanegaraannya Korea Selatan adalah Negara Kesatuan sama halnya dengan Indonesia. Korea-pun memiliki sistem pemerintahan yang sama yaitu Presidensial.

Republik Korea dipimpin oleh seorang Presiden yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali dan hanya boleh menjabat selama satu periode saja. Oleh karena itu Presiden petahana ataupun Presiden yang pernah menjabat sebelumnya tidak dapat mengajukan diri kembali di pemilihan umum selanjutnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Korea Selatan dibantu oleh Perdana Menteri. Pemilihan Perdana Menteri dilakukan dengan cara ditunjuk oleh Presiden atas persetujuan dari Majelis Nasional.

Korea Selatan juga menggunakan sistem presidensial campuran. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh-pengaruh parlementer dalam sistem ketatanegaraannya. Untuk kekuasaan eksekutif dimiliki oleh lembaga kepresidenan yang dipimpin oleh Presiden yang didampingi oleh Perdana Menteri. Adapun untuk kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Nasional (National Assembly) yang berkedudukan sebagai parlemen. Presiden dan Perdana Menteri tidak sepenuhnya bertanggungjawab kepada parlemen. Dalam pemilihan umum, Presiden dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun tanpa pemilihan kembali. Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Presiden juga sebagai Panglima tertinggi angkatan bersenjata (militer).

Dalam pelaksanaan pemerintahan, Korea Selatan berpedoman pada Konstitusi Korea Selatan (The Constitution of the Republic of Korea; 대한민국 헌법 [Daehanminggug Heonbeob) hasil amandemen tahun 1987. Konstitusi ini terdiri atas 130 pasal dan 6 aturan tambahan. Kesemuanya dibagi menjadi 10 bab yaitu: Ketentuan Umum, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Majelis Nasional, Lembaga Eksekutif, Lembaga Peradilan, Mahkamah Konstitusi, Manajemen Pemilu, Kekuasaan Lokal, Lembaga Ekonomi, dan Amandemen Konstitusi itu sendiri. Konstitusi Korea Selatan mengatur secara lengkap fungsi, kedudukan, tugas dan wewenang tiap lembaga negara, termasuk dalamnya lembaga kepresidenan sebagai eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden yang dipilih melalui pemilihan umum dan menjabat selama lima tahun dan hanya dapat memimpin dalam satu periode saja. Dalam menjalankan tugasnya Presiden dibantu oleh Perdana Menteri yang dipilihnya berdasarkan persetujuan Majelis Nasional. Perdana Menteri bertugas mengawasi para menteri dan mengelola koordinasi kebijakan pemerintah dibawah arahan Presiden. Presiden dan Perdana Menteri dibantu oleh State Council yang anggotanya ditunjuk oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Perdana Menteri. State Council berhak untuk memimpin dan mengawasi menteri-menteri administratif, merundingkan urusan-urusan penting dalam negeri, serta mewakili pemerintah di Majelis Nasional. State Council bertanggung jawab hanya kepada Presiden.

**Berikut Perbandingan Sistem Hukum di Negara Indonesia dan Korea Selatan:**

### A. Sistem Hukum di Indonesia

Sistem hukum di Indonesia, Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan pemegang kendali atas suatu perkara yang telah melalui proses penyidikan oleh kepolisian sesuai dengan asas dominus litis (Pasal 140 KUHAP). Berdasarkan asas dominus litis, JPU adalah pihak yang berwenang untuk menentukan apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan atau tidak (Surachman, 1996: 83). Meski juga terdapat anggapan bahwa penguasa perkara yang sebenarnya menurut KUHAP adalah Kepolisian, bukan Kejaksaan. Karena tahap pertama penegakan hukum di Indonesia di tingkat penyidikan dilakukan oleh Kepolisian yang kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan (Afandi, 2023).

Perlu diketahui bahwa Jaksa sebagai pemegang kendali penuh atas suatu perkara utamanya sejak tingkat penyidikan memang banyak diterapkan negara-negara di dunia. Hal tersebut sesuai dengan Guidelines on the Role of Prosecutors yang diadopsi menjadi Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (1990) yang menyatakan bahwa Jaksa merupakan Leading Sector dalam penindakan sebuah kasus pidana (Latifah, 2012: 109).

Berbeda dengan yang berlaku di kebanyakan negara lainnya, Jaksa di Indonesia tidak mengawasi penyidikan oleh polisi secara langsung (supervisor), Jaksa juga tidak melakukan penyidikan sejak awal bersama kepolisian. Akan tetapi Jaksa bisa melakukan pemeriksaan hasil penyidikan melalui Berkas Perkara (BP) yang didalamnya memuat Berita Acara Penyidikan (BAP), sehingga berkas itulah yang nantinya akan menjadi dasar bagi Jaksa untuk memutuskan apakah akan melakukan penuntutan atau tidak. Meskipun tidak jarang dalam praktiknya apabila terdapat berkas yang tidak lengkap akan dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Polisi.

Di Indonesia, Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Indonesia juga pemegang kendali atas suatu perkara yang telah melalui proses penyidikan oleh kepolisian sesuai dengan asas dominus litis (Pasal 140 KUHAP). Berdasarkan asas dominus litis, JPU adalah pihak yang berwenang untuk menentukan apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan atau tidak (Surachman, 1996: 83). Dari sini dapat dipahami bahwa Jaksa di Indonesia tidak menerapkan asas dominus litis secara mutlak, melainkan hanya bisa menguasai perkara setelah mendapat pelimpahan perkara dari polisi. Sehingga proses pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan oleh penyidik dari polisi tanpa campur tangan dari JPU (Riyanto, 2021:486).

Meski demikian, terdapat aturan pengecualian yang membuat Jaksa di Indonesia bisa melakukan penyidikan namun terbatas pada tindak pidana khusus saja, misalnya kewenangan JPU melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 serta kasus pelanggaran HAM berat sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Di Indonesia hubungan keduanya lebih menekankan pada hubungan koordinatif-ajudikatif. Menurut model koordinatif, keduanya adalah institusi yang setara dan masing-masing institusi memiliki tugas yang berbeda (Choe, 2018). Sehingga pengambilan keputusan yang independen dianggap sebagai nilai penting meski terdapat konsekuensi tidak ada ruang bagi kejaksaan untuk mengawasi secara langsung terhadap proses penyidikan.

Apabila dilihat dari segi ajudikatif, Jaksa di Indonesia akan menuntut sesuai dengan alat bukti yang telah diajukan polisi dalam berkas perkara. Apabila jaksa menyimpulkan sudah cukup alat bukti, maka tersangka akan dilakukan penuntutan meski dalam diri Jaksa Penuntut Umum belum memiliki keyakinan bersalah (Worboys, 1985: 764).

Peran Jaksa yang menitikberatkan pada aspek ajudikatif di Indonesia sedikit mirip dengan yang diterapkan The Crown Prosecution Service (CPS) di Inggris dan Wales yang sistem peradilan pidananya adalah sistem adversarial, berbeda dengan Indonesia yang menganut inquisitorial. Peran CPS yang juga terbatas melakukan investigasi tersebut adalah sebagai filter atas penyidikan yang dilakukan polisi (Pakes, 2015). Sehingga tidak mengherankan apabila CPS akan lebih banyak berkonsentrasi pada upaya ajudikasi ketimbang melakukan investigasi.

Dari uraian di atas bisa dipahami mengapa dalam praktik penegakan hukum di Indonesia kita tidak pernah menjumpai Jaksa di Indonesia melakukan pengawasan atas penyidikan yang dilakukan kepolisian. Karena secara regulasi Jaksa menjalankan model ajudikasi sesuai asas dominus litis-nya, bukan melakukan investigasi.

## B. Sistem Hukum di Korea Selatan

Sistem hukum di Korea Selatan, Jaksa di Korsel secara hierarkis melakukan pengawasan atas investigasi yang dilakukan polisi ataupun memimpin dan turut melakukan investigasi secara langsung (model hierarkis-investigasi). Jika dilihat dari segi wewenang penyidikan yang berlaku di Korea Selatan, Polisi memang tidak mempunyai wewenang investigasi secara independen, karena penyidikan yang dilakukan polisi berada di bawah arahan dan pengawasan Jaksa sesuai dengan Criminal Procedure Act (CPA)—yang merupakan Hukum Acara Pidana Korea Selatan. Berdasarkan Pasal 195 dan Pasal 196 Criminal Procedure Act (CPA), Jaksa bisa terlibat aktif sejak tahap awal penyidikan, baik menguasai perkara secara keseluruhan dengan cara melakukan investigasi sendiri atau sekedar mengawasi polisi yang menjadi penyidik. Oleh karenanya Kepolisian Korsel dapat disebut sebagai subsidiary organ Kejaksaan, dan Kejaksaan sebagai supervisor of investigation (Cho, 2010: 62-64).

Kelebihan dari sistem ini yakni Jaksa bisa mendapatkan keterangan/pengakuan langsung dari tersangka dan dicatat di berkas mereka sendiri (Choe, 2018: 93). Sehingga tidak heran apabila Jaksa yang digambarkan dalam Bad Prosecutor lebih banyak berkonsentrasi pada tahapan penyidikan ketimbang memainkan peran adjudikatif di pengadilan.

Keuntungan dari sistem di Korsel tersebut juga tentunya akan membuat Jaksa lebih mudah dalam memahami detail perkara secara utuh karena sejak awal telah terlibat aktif dalam penyidikan. Sehingga nantinya Jaksa juga akan lebih mudah dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan di pengadilan (Hukumonline.com, 2022).

Meski demikian, sistem yang berlaku di Korsel tersebut juga memiliki sisi kelemahan karena dianggap menghilangkan filtrasi jaksa untuk menilai hasil penyidikan. Berbeda dengan penyidikan polisi yang diawasi oleh kejaksaan, hasil penyidikan oleh kejaksaan ketika beralih ke pengadilan tidak memiliki mekanisme peninjauan (review). Sekalipun di Kejaksaan Korsel terdapat mekanisme peninjauan secara internal oleh atasan Jaksa melalui konsultasi dan persetujuan (Choe, 2018: 94), akan tetapi hal itu pun tidak menjamin filtrasi jaksa bisa berjalan efektif.

## Berikut Perbandingan Sistem Administrasi Keuangan di Negara Indonesia dan Korea Selatan :

### A. Sistem Administrasi Keuangan Indonesia

- **Sistem Anggaran** : Anggaran Berimbang dimana anggaran diusahakan agar penerimaan dan pengeluaran seimbang. Sistem penganggaran yang dipakai Anggaran Berbasis Kinerja.
- **Siklus Anggaran** : 1. Penyusunan RAPBN, 2. Pembahasan RUU APBN, 3. Pelaksanaan UU APBN, 4. Pengawasan UU APBN, 5. Pertanggungjawaban Anggaran Negara *meliputi*: 1) Penyusunan RAPBN, 2) Pembahasan RUU APBN, 3) Pelaksanaan UU APBN, 4) Pengawasan UU APBN, 5) Pertanggung jawaban Anggaran Negara Tahun Anggaran Tahun anggaran pada masa Orde baru dimulai 1 April – 31 Maret. Sedangkan tahun anggaran pada masa Reformasi dimulai 1 Januari – 31 Desember.
- **Sumber APBD** : 1. Pendapatan Asli Daerah, 2. Dana Perimbangan, 3. Lain-lain pendapatan yang sah.

### B. Sistem Administrasi Keuangan Korea Selatan

Korea Selatan muncul sebagai kekuatan ekonomi utama dan masuk dalam jajaran 11 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang cepat sejak wala tahun 1960-an dikarenakan faktor pemilihan strategi industrialisasi yang berorientasi pada pertumbuhan, industri, dan ekspor. Pemerintah Korea Selatan juga meluncurkan empat langkah strategis meliputi reformasi sektor keuangan (restrukturisasi dan privatisasi lembaga keuangan), reformasi korporasi, reformasi di bidang tenaga kerja (kebijakan ketenagakerjaan antara pengusaha, pemerintah, dan buruh), dan reformasi di bidang pertahanan (menjaga stabilitas dalam negeri) (Soekro, 2008:65).

Pilihan terpenting yang dimiliki Korea Selatan kemudian adalah penekanan pada mobilisasi secara efisien dan pengendalian pada sumber daya domestik, serta penekanan kebijakan eksternal pada promosi perdagangan luar negeri. Orientasi pertumbuhan Korea Selatan dilandasi oleh kebutuhan mendesak untuk menyaingi Korea Utara pada tahun 1960-an, dan juga untuk memotong lingkaran setan penangguran dan kemiskinan melalui upaya modernisasi. Kemiskinan sumber daya alam Korea



Selatan mengharuskannya untuk lebih berorientasi pada industri yang sesuai dengan kebutuhan negara berkembang untuk secara terus menerus mentransformasi struktur produksinya.

Kebijakan ekonomi Korea Selatan ini dirancang dalam suatu konteks ekonomi global sehingga dapat memperkuat posisi daya saing internasional. Sejak krisis keuangan melanda Asia pada 1997, Korea Selatan telah mengalami kemajuan berarti dalam mereformasi sektor ekonomi dan keuangan, meski sejumlah “pekerjaan rumah” masih tetap perlu digarap, khususnya di sektor publik, BUMN, dan pasar tenaga kerja. Ekonomi Korea telah tumbuh kembali dengan kuat ditandai dengan ekspor yang besar rata-rata meningkat 10% per-tahun.

## **Berikut Perbandingan Sistem Pemerintahan Daerah di Negara Indonesia dan Korea Selatan:**

### **A. Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia**

Praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia saat ini didasarkan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. UU ini mengatur hal-hal tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, kepegawaian daerah, perda dan peraturan kepala daerah, dan perencanaan otonomi.

Istilah Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 Pemerintah Pusat, Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Desentralisasi Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI.

Dekonsentrasi Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal wilayah tertentu. Tugas pembantuan Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Otonomi daerah merupakan Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Daerah otonom Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam NKRI.

### **B. Sistem Pemerintahan Daerah Korea Selatan**

Dari segi administrasi daerah, Korea Selatan dibagi ke dalam 9 propinsi dan 7 kota dengan status setara provinsi. Kesembilan provinsi tersebut adalah Gyeonggi, Gangwon, Chungcheong Utara dan Selatan, Gyeongsang Utara dan Selatan Jeolla Utara dan Selatan serta Jeju. Ketujuh kota tersebut adalah Incheon, Kwangju, Busan, Daegu, Daejeon, Seoul dan Ulsan. Gubernur provinsi dan walikota dipilih oleh rakyat setiap 4 tahun sekali.

Dengan adanya UU otonomi daerah tanggal 6 april 1988, pemerintahan Korea selatan tidak terpusat, dimana hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki masing-masing pembagian tugas administrasi. Korea selatan menerapkan sistem distrik. Secara singkat, dalam sistem distrik, sebuah daerah pemilihan hanya bisa memiliki seorang wakil terpilih. artinya, dalam sistem distrik, akan terjadi situasi di mana calon yang mendapatkan suara terbanyak akan mewakili daerah pemilihan tersebut, dan hanya dia yang mewakili daerah pemilihan tersebut, meskipun selisih suara dengan peringkat dua hanya satu suara.

**DISKUSI**

**Tabel 1. Mapping Perbandingan Sistem Birokrasi Antara Indonesia dengan Korea Selatan**

Perbandingan Sistem Birokrasi	Indonesia	Korea Selatan
<b>Birokrasi Berdasarkan Golongan</b>	Mempunyai empat (I-IV) golongan dengan 17 pangkat.	Mempunyai Sembilan (9) peringkat/pangkat berbeda.
<b>Manajemen Birokrasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1) Proses Rekrumen</b> Kewenangan untuk melaksanakan proses rekrutmen calon PNS diserahkan kepada masing-masing Kementerian.</li> <li><b>2) Rotasi Pekerjaan</b> Rotasi pekerjaan masih belum memiliki standar yang jelas, sehingga menimbulkan demotivasi.</li> <li><b>3) Penilaian</b> Hasil penilaian tersebut dimasukan (DP3). Namun indikator penilaian yang ada dalam DP3 tidak dapat diukur dan bersifat subyektif.</li> <li><b>4) Komunikasi</b> Untuk komunikasi dengan supervisor atau jabatan-jabatan yang setara, orang harus mengisi folmulir tertulis yang disebut Memo atau Nota Dinas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1) Proses Rekrumen</b> Korea mempertahankan proses rekrutmen tersentralisasi untuk para pejabat daerah dan pusat.</li> <li><b>2) Rotasi Pekerjaan</b> Rotasi pekerjaan terlalu sering dilakukan yaitu setiap 14 bulan sekali, yang menyebabkan rendahnya akuntabilitas.</li> <li><b>3) Penilaian</b> Menggunakan metode penilaian 360o, sehingga penilaian tersebut dapat diukur dan obyektif.</li> <li><b>4) Komunikasi</b> Komunikasi bersifat horizontal cukup menggunakan email atau telepon. Sedangkan untuk komunikasi vertikal terutama yang bersifat resmi, harus menggunakan surat dinas.</li> </ol>

**Tabel 2. Mapping Perbandingan Sistem Administrasi Antara Indonesia dengan Korea Selatan**

Perbandingan Sistem Administrasi Negara	Indonesia	Korea Selatan
<b>Sistem Presidensial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam melaksanakan sistem presidensialnya, Indonesia berpedoman pada ketentuan UUD 1945 yang telah dilakukan amandemen sebanyak 4 (empat) kali dari tahun 1999 hingga 2002.</li> <li>• Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia memiliki masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali dengan maksimal jabatan selama 2 periode.</li> <li>• Di Indonesia, dalam melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh Menteri dan Menteri ditunjuk secara prerogratif oleh Presiden. Menteri bertanggungjawab langsung kepada Presiden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam melaksanakan sistem presidensialnya, Korea Selatan, berpedoman pada Konstitusi Korea Selatan (The Constitution of the Republic of Korea; 대한민국 헌법 [Daehanminggug Heonbeob]) hasil amandemen tahun 1987.</li> <li>• Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Korea Selatan hanya memiliki masa jabatan selama lima tahun dan hanya dapat memimpin dalam satu periode saja.</li> <li>• Di Korea Selatan, dalam menjalankan tugasnya Presiden dibantu oleh Perdana Menteri yang dipilihnya berdasarkan persetujuan Majelis Nasional. Perdana Menteri bertugas mengawasi para menteri dan mengelola koordinasi kebijakan pemerintah dibawah arahan Presiden. Presiden dan Perdana Menteri dibantu oleh State Council yang anggotanya ditunjuk oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Perdana Menteri. State Council berhak untuk memimpin dan mengawasi menteri-menteri administratif, merundingkan urusan-urusan penting dalam negeri, serta mewakili pemerintah di Majelis Nasional. State Council bertanggung jawab hanya kepada Presiden.</li> </ul>

<p><b>Sistem Hukum</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di Indonesia hubungan jaksa dan kepolisian lebih menekankan pada hubungan koordinatif-ajudikatif. Menurut model koordinatif, keduanya adalah institusi yang setara dan masing-masing institusi memiliki tugas yang berbeda. Sehingga pengambilan keputusan yang independen dianggap sebagai nilai penting meski terdapat konsekuensi tidak ada ruang bagi kejaksaan untuk mengawasi secara langsung terhadap proses penyidikan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jaksa di Korsel secara hierarkis melakukan pengawasan atas investigasi yang dilakukan polisi ataupun memimpin dan turut melakukan investigasi secara langsung (model hierarkis-investigasi).</li> </ul>
<p><b>Sistem Administrasi Keuangan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi Indonesia saat ini telah cukup stabil. Sistem penganggaran yang dipakai Anggaran Berbasis Kinerja, dimana hal ini Meliputi :             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan RAPBN</li> <li>2. Pembahasan RUU APBN</li> <li>3. Pelaksanaan UU APBN</li> <li>4. Pengawasan UU APBN</li> <li>5. 5.Pertanggungjawaban Anggaran Negara.</li> </ol> <p>Bersumber dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pendapatan Asli Daerah</li> <li>7. Dana Perimbangan</li> <li>8. Lain-lain pendapatan yang sah.</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korea Selatan mengadopsi sistem kedekatan antara sektor pemerintahan dan bisnis yang termasuk juga kredit yang terarah, pembatasan impor, dan pensponsoran industri-industri khusus. Pemerintah Korea Selatan mendorong impor bahan-bahan baku mentah dan teknologi dengan mengorbankan barang konsumtif serta mendorong masyarakat untuk menabung dan melakukan investasi.</li> </ul>
<p><b>Sistem Pemerintahan Daerah</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang yang mengatur mengenai praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Undang-Undang ini mengatur hal-hal tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, kepegawaian daerah, perda dan peraturan kepala daerah, perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, kerja sama serta penyelesaian perselisihan, kawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan adanya Undang-Undang otonomi daerah tanggal 6 april 1988, pemerintahan Korea Selatan tidak terpusat, dimana hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki masing-masing pembagian tugas administrasi. Korea selatan menerapkan sistem distrik. Selain itu, dari segi administrasi daerah, Korea Selatan dibagi ke dalam 9 propinsi dan 7 kota dengan status setara provinsi.</li> </ul>

	<p>perkotaan, desa, pembinaan dan pengawasan, pertimbangan dalam kebijakan otonomi daerah. Selain itu dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah, dikenal tiga prinsip, yaitu prinsip Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Perbantuan (Medebewind).</p>	
--	--	--

## KESIMPULAN

Negara Perbandingan Administrasi Negara adalah ilmu yang baru bila dibandingkan dengan Ilmu Perbandingan Politik yang merupakan ilmu yang ditemukan asalnya pada zaman Aristoteles. Dilihat dari judul dan istilah “Perbandingan” dalam Ilmu Administrasi Negara Perbandingan, terkandung pengertian menjajarkan serta menarik segi persamaan dan/atau perbedaan dari gejala-gejala atau fenomena-fenomena atau sasaran-sasaran. Sedang Administrasi dalam pengertiannya yaitu sebagai salah satu gejala kehidupan dalam masyarakat di dalam mana sekelompok manusia atau warga negara beraktivitas untuk mewujudkan atau mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan uraian di atas dalam perbandingan Sistem Birokrasi dan Sistem Administrasi Negara Indonesia dengan Korea Selatan sebagai berikut:

### Pada Sistem Birokrasi

- Indonesia mempunyai empat (I-IV) golongan dengan 17 pangkat. Sedangkan Korea Selatan mempunyai Sembilan (9) peringkat/pangkat berbeda.
- Di Indonesia proses rekrutmen calon PNS diserahkan kepada masing-masing Kementerian. Sedangkan di Korea Selatan proses rekrutmen tersentralisasi untuk para pejabat daerah dan pusat.
- Di Indonesia rotasi pekerjaan masih belum memiliki standar yang jelas. Sedangkan Korea Selatan rotasi pekerjaan terlalu sering dilakukan yaitu setiap 14 bulan sekali.
- Di Indonesia hasil penilaian tersebut dimasukan (DP3). Sedangkan di Korea Selatan menggunakan metode penilaian 360 derajat.
- Di Indonesia komunikasi dengan supervisor mengisi formulir tertulis yang disebut Memo atau Nota Dinas. Sedangkan di Korea Selatan komunikasi bersifat horizontal menggunakan email atau telepon. Komunikasi vertical menggunakan surat dinas.

### Pada Sistem Administrasi

- Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia memiliki masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali dengan maksimal jabatan selama 2 periode. Sedangkan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Korea Selatan hanya memiliki masa jabatan selama lima tahun dan hanya dapat memimpin dalam satu periode saja. Di Indonesia, dalam melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh Menteri dan Menteri ditunjuk secara prerogratif oleh Presiden. Sedangkan Di Korea Selatan, Presiden dibantu oleh Perdana Menteri yang dipilihnya berdasarkan persetujuan Majelis Nasional. Presiden dan Perdana Menteri dibantu oleh State Council yang anggotanya ditunjuk oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Perdana Menteri.

- Di Indonesia dalam sistem hukum hubungan jaksa dan kepolisian lebih menekankan pada hubungan koordinatif-ajudikatif. Sedangkan di Korea Selatan jaksa dan kepolisian lebih menekankan pada hubungan hierarkis-investigasi).
- Di Indonesia dalam sistem administrasi keuangan, Indonesia memakai sistem penganggaran dan yang dipakai Anggaran Berbasis Kinerja. Sedangkan Korea Selatan mengadopsi sistem kedekatan antara sektor pemerintahan dan bisnis.
- Dalam sistem pemerintahan daerah, Indonesia dikenal dengan tiga prinsip, yaitu prinsip Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan (Medebewind). Sedangkan pemerintahan Korea Selatan tidak terpusat, dimana hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki masing-masing pembagian tugas administrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Byprojustice. (2022). *Perbandingan Sistem Presidensial Indonesia Dengan Korea Selatan*. Retrieved from Projustice.id: <https://projustice.id/perbandingan-sistem-presidensial-indonesia-dengan-korea-selatan/>
- Idembassy\_Seoul. (2018). *Profil Negara dan Hubungan Bilateral*. Retrieved from KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA : [https://kemlu.go.id/seoul/id/pages/hubungan\\_bilateral/558/etc-menu](https://kemlu.go.id/seoul/id/pages/hubungan_bilateral/558/etc-menu)
- Perbandingan Administrasi Negara Indonesia Dengan Korea Selatan*. (2023). Retrieved from 123dok.com: <https://123dok.com/document/z3mggj8y-perbandingan-administrasi-negara-indonesia-dengan-korea-selatan.html>
- RI, H. K. (2019). *Kemenko Polhukam Bertukar Ilmu Birokrasi dengan Pemerintah Korea Selatan*. Retrieved from polkam.go.id: <https://polkam.go.id/kemenko-polhukam-bertukar-ilmu-birokrasi-pemerintah-korea-selatan/>
- Rizki Kurniasih, d. (2013). *PERBANDINGAN REFORMASI BIROKRASI ANTARA INDONESIA DENGAN KOREASELATAN*. Retrieved from slideshare.net: <https://www.slideshare.net/kikiabie/01-perbandingan-msdm-indonesia-dan-korea-selatan>

## EVALUASI PROGRAM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) DALAM PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI KECAMATAN WIYUNG

Rosa Indah Febriana<sup>1</sup>, Ika Devi Pramudiana<sup>2</sup>, Widyawati<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya  
Correspondence Author: [febrianarosa2@gmail.com](mailto:febrianarosa2@gmail.com)

### ABSTRAK

#### Histori Artikel

**Submitted**

26 Maret 2024

**Reviewed**

27 Maret 2024

**Accepted**

28 Maret 2024

**Published**

30 Maret 2024

*Kebijakan Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Surabaya berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB). Program ini bertujuan sebagai tempat khusus bagi warga Surabaya yang ingin mengatasi masalah, baik terkait kenakalan anak maupun seputar masalah keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis data sebagai berikut: 1) Menilai evaluasi program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam menangani anak putus sekolah di Kecamatan Wiyung Kota Surabaya; serta 2) Menilai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat program Pusat Pembelajaran Keluarga dalam menangani*

*anak putus sekolah di Kecamatan Wiyung Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan indikator evaluasi yang mencakup efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketetapan menurut William N. Dunn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan program PUSPAGA dalam menangani anak putus sekolah telah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa aspek dalam indikator evaluasi yang perlu ditingkatkan yang meliputi beberapa faktor penghambat seperti: 1) Pihak dinas maupun pemerintah kota kurang memberikan sosialisasi terhadap masyarakat sehingga mereka masih asing dengan kehadiran PUSPAGA sendiri; serta 2) Pandangan orangtua terhadap pendidikan, sebagian pendidikan orang tua yang anaknya mengalami putus sekolah tergolong orangtua yang berpendidikan rendah.*

**Kata Kunci:** Evaluasi Program, Putus Sekolah, PUSPAGA

### ABSTRACT

*The Surabaya Family Learning Center (PUSPAGA) Program policy is under the auspices of the Office of Women's Empowerment and Child Protection as well as Population Control and Family Planning (DP3APPKB). This program aims to be a special place for Surabaya residents who want to overcome problems, both related to child delinquency and family problems. This research aims to describe and analyze the data as follows: 1) Assess the evaluation of the Family Learning Center (PUSPAGA) program in handling school dropouts in Wiyung Sub-district, Surabaya City; and 2) Assess the factors that support and hinder the Family Learning Center program in handling school dropouts in Wiyung Sub-district, Surabaya City. The research method used is descriptive qualitative, with evaluation indicators including effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and fixity according to William N. Dunn. This research uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, documentation, and observation. The results showed that the policy evaluation of the PUSPAGA program in handling out-of-school children has been running well, but there are several aspects in the evaluation indicators that need to be improved which include several inhibiting factors such as: 1) The agency and the city government do not provide enough socialization to the community so that they are still unfamiliar with the presence of PUSPAGA itself; and 2) Parents' views on education, some of the education of parents whose children have dropped out of school are classified as low-educated parents.*

**Keywords:** Program Evaluation, Dropout, PUSPAGA

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha yang disengaja dan direncanakan untuk menciptakan lingkungan dan proses pembelajaran dimana peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri mereka. Tujuannya adalah untuk menjadi individu yang memiliki keagamaan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan untuk keberhasilan pribadi, kontribusi pada masyarakat, negara, dan bangsa (Fitriati et al., 2023). Dalam era modernitas dan globalisasi yang kita alami saat ini, pendidikan telah menjadi salah satu aspek kehidupan yang sangat penting. Banyak orang yang bersedia melakukan segala upaya untuk meraih tingkat pendidikan tertinggi (Amini et al., 2020). Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa status sosial sering kali terkait erat dengan tingkat pendidikan seseorang. Individu yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi cenderung dihormati dan diutamakan dalam masyarakat. Selain itu, pendidikan juga memberikan pengetahuan dan informasi yang luas tentang berbagai fenomena baru yang mungkin jarang dibahas di tengah-tengah masyarakat. Mulai dari hal-hal sederhana seperti dinamika hubungan antar individu hingga kompleksitas hubungan multilateral antarnegara. Semua ini mencerminkan betapa krusialnya peran pendidikan dalam kehidupan manusia.

Dalam era *society 5.0*, masyarakat memerlukan kemampuan untuk menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan yang semakin kompleks dan menyeluruh. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi pusat perubahan bersama masyarakat untuk menciptakan komunitas pembelajaran dan mendorong pembelajaran dengan menggunakan berbagai sumber belajar dalam platform teknologi dan informasi, serta mengembangkan kurikulum secara global dengan inovasi digital (Putra, 2019). Akan tetapi, di era modern saat ini tak sedikit pula orang yang masih buta aksara, berpendidikan rendah, ditambah lagi dengan faktor tingginya anak putus sekolah di berbagai daerah serta dibarengi dengan rendahnya minat anak dan juga orang tua untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, masih terjadi perdebatan mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kondisi tersebut. Hal ini sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga menjadi tugas masyarakat secara menyeluruh. Dari uraian yang telah dijelaskan diatas mengenai anak putus Sekolah Pemerintah melakukan terobosan dengan meluncurkan program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Secara khusus, terkait dengan kebutuhan pelayanan keluarga yang masih kurang dikenal oleh masyarakat sebagai upaya untuk melindungi anak dan orang tua, Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas urusan wajib non pelayanan dasar, yaitu urusan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA), melaksanakan kewenangan teknis dengan menyediakan layanan guna menciptakan keluarga yang setara gender dan sesuai dengan hak anak, seperti penyediaan layanan PUSPAGA (Manurung & Simanjuntak, 2021).

PUSPAGA adalah ruang khusus bagi orang-orang Surabaya yang ingin menyelesaikan masalah mereka, baik terkait kenakalan anak maupun masalah keluarga. Diharapkan kehadiran PUSPAGA akan selaras dengan janji Surabaya untuk menjadi kota yang ramah anak, yang mengedepankan kesetaraan gender, memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan melawan perdagangan manusia (Rosita et al., 2021). Berbagai layanan disediakan untuk membantu klien dan konseli menemukan pribadi, mengenal lingkungan, merencanakan masa depan, menentukan karir, dan mengatasi masalah pribadi, keluarga, dan sosial. Layanan ini termasuk dalam sistem kegiatan dan layanan lembaga secara keseluruhan. Pelayanan Program PUSPAGA ditujukan kepada anak, orang tua, wali, calon orang tua, dan orang lain yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Surabaya ini berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) (Ramadhan & Diniyah, 2022).

Kecamatan Wiyung adalah kecamatan di Kota Surabaya dengan luas 12,46 km<sup>2</sup>. Terletak di bagian Selatan kota, pada ketinggian  $\pm 8$  meter di atas permukaan air laut. Kelurahan di Wiyung adalah Balas Klumprik, Babatan, Wiyung, dan Jajar Tunggal. Dalam Kecamatan Wiyung, ada beberapa jenis sekolah dan status yang dapat dipilih untuk membantu siswa melanjutkan pendidikan mereka sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka ambil. Kecamatan Wiyung memiliki 32 sekolah, terdiri dari 10 sekolah swasta dan 22 sekolah negeri. Data terbaru menunjukkan bahwa sebanyak 42 anak putus sekolah di Kecamatan Wiyung belum direalisasikan, dan 20 anak telah direalisasikan pada Oktober 2023. Munculnya program berkaitan dengan apa yang dibutuhkan oleh Masyarakat, dengan adanya hal tersebut sebagai umpan untuk mensejahterakan Masyarakat khususnya anak-anak. memulainya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak.



Hal inilah yang membuat penulis ingin melakukan penelitian lebih jauh mengenai apakah yang sudah dilakukan dari PUSPAGA sudah efektif serta saya tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “Evaluasi Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Wiyung Kota Surabaya”.

## LANDASAN TEORITIS

### Kebijakan Publik

Secara umum, kata “kebijakan” atau “*policy*” mengacu pada perilaku seorang aktor (seperti seorang pejabat, kelompok, atau lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor yang terlibat dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan publik biasanya didefinisikan sebagai salah satu tindakan pemerintah yang dihasilkan dari tanggung jawab pemerintah dalam bentuk pengaturan dan keputusan.

Menurut Thomas R. Dye, konsep kebijakan publik mencakup segala tindakan atau keputusan, baik yang diambil maupun yang tidak diambil, dengan tujuan menyelesaikan masalah-masalah yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup bersama. Kebijakan publik harus diambil dengan pertimbangan yang menyeluruh agar memberikan dampak yang positif bagi seluruh masyarakat, tanpa menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, pemerintah perlu bijaksana dalam mengambil keputusan kebijakan.

William N. Dunn menguraikan bahwa dalam konteks kebijakan publik, terdapat berbagai alternatif saling berhubungan yang dipilih oleh para pemangku kepentingan atau pejabat pemerintah dalam hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintahan, seperti menjaga keamanan, mengatur energi, meningkatkan kesejahteraan, mengelola pendidikan, memberikan instruksi, memberikan bantuan pemerintah, menangani kriminalitas, mengelola perkotaan, dan sebagainya.

### Proses Kebijakan Publik

William N. Dunn merinci proses atau tahapan kebijakan publik sebagai berikut:

a) *Agenda Setting* (Penyusunan Agenda)

Penyusunan agenda atau agenda setting adalah langkah pertama dalam proses kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah untuk menetapkan dan menetapkan suatu kebijakan yang akan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Pembentukan agenda merupakan proses yang sangat efektif untuk memahami kebutuhan prioritas masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang dipilih dan ditetapkan adalah kebutuhan yang sejalan dengan prioritas masyarakat secara keseluruhan, bukan prioritas kelompok atau golongan tertentu.

b) *Policy Formulating* (Formulasi Kebijakan)

Langkah kedua yang diambil oleh pemerintah dalam pengembangan kebijakan publik adalah formulasi kebijakan. Isu-isu utama yang telah diidentifikasi dan dirinci oleh pemerintah kemudian dibahas lebih lanjut dalam forum khusus untuk merumuskan kebijakan yang akan berlaku di tingkat nasional atau daerah. Dalam proses perumusan atau formulasi kebijakan publik, terjadi dialog dan diskusi di antara para pemangku kebijakan. Oleh karena itu, setiap peserta dialog atau diskusi perlu memperhatikan cara menyampaikan pendapat secara terbuka agar proses formulasi yang dilakukan tidak menimbulkan konflik di antara anggota forum.

c) *Policy Adoption* (Pengadopsian Kebijakan)

Proses pengadopsian kebijakan merupakan langkah ketiga yang diambil oleh pemerintah untuk menetapkan kebijakan publik yang akan berlaku secara umum bagi masyarakat. Adopsi kebijakan ini bertujuan memberikan legitimasi untuk memberikan otoritas atau wewenang pada proses dasar pemerintahan dalam penetapan kebijakan publik. Otoritas atau wewenang yang diberikan kepada pemerintah bertujuan agar hanya pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan atau perbaikan dalam kebijakan publik. Selain itu, pada tahap ini, pemerintah juga memiliki kemungkinan untuk mengadopsi kebijakan dari negara atau daerah lain yang dianggap sesuai untuk diterapkan di wilayah negaranya sebagai langkah untuk merawat keberagaman di Indonesia.

d) *Policy Implementation* (Implementasi Kebijakan)

Pelaksanaan kebijakan merupakan langkah yang dapat dianggap sebagai penerapan dan percobaan kebijakan publik yang telah diadopsi oleh pemerintah dan diberlakukan secara umum di masyarakat. Pada tahap ini, pemerintah menjalankan peran sebagai pengawas untuk memantau pelaksanaan kebijakan publik di lingkungan masyarakat.

e) *Policy Evaluation* (Evaluasi Kebijakan)

Evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah setelah berlakunya periode tertentu dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menilai aspek substansi, implementasi, dan dampak yang dihasilkan dari penerapan kebijakan publik. Melalui tahapan evaluasi inilah pemerintah dapat melakukan perbaikan terhadap kebijakan publik yang berlaku berdasarkan pengalaman yang telah dilalui selama kebijakan publik tersebut terlaksana.

### **Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai penilaian atau hasil penilaian. Bryan & White (1987) mendefinisikan evaluasi sebagai usaha untuk mendokumentasikan dan menilai apa yang terjadi, serta mengapa hal tersebut terjadi. Dalam konteks yang lebih sederhana, evaluasi melibatkan pengumpulan informasi mengenai kondisi sebelum dan setelah pelaksanaan suatu program atau rencana.

Menurut Situmorang (sebagaimana dikutip oleh Amanda, 2020), evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan kebijakan dan menilai apakah kebijakan tersebut mencapai dampak yang diinginkan. Oleh karena itu, evaluasi dianggap sebagai kegiatan yang bersifat fungsional, bukan hanya dilakukan pada akhir proses, tetapi juga pada setiap tahap kebijakan. Sementara itu, menurut Dunn (2003), evaluasi merupakan tahap terakhir dari kebijakan publik, yang dilakukan setelah implementasi kebijakan. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah kebijakan yang telah diimplementasikan sesuai dengan harapan masyarakat dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses penilaian terhadap nilai suatu objek atau hal berdasarkan kriteria tertentu. Dalam konteks pemerintahan, evaluasi dapat diartikan sebagai langkah untuk mengukur efektivitas strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan suatu program atau kebijakan.

### **Kriteria Evaluasi Kebijakan**

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik memerlukan formulasi kriteria yang dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan program atau kebijakan tersebut. Kriteria-kriteria yang telah dirumuskan dapat dijadikan sebagai indikator untuk menilai apakah suatu kebijakan dapat dianggap berhasil atau gagal. Definisi evaluasi menurut William N. Dunn memberikan pemahaman bahwa: “Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003).

Menurut Dunn (2003), untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan atau program, perlu adanya kriteria yang mencakup:

a) Efektivitas (*Effectiveness*)

Efektivitas berasal dari kata efektif, yang merujuk pada pencapaian keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga dikenal sebagai hasil guna, dan selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang ditetapkan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan tersebut dianggap.

b) Efisiensi (*Efficiency*)

Efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi, yang juga merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, mengacu pada hubungan antara efektivitas dan usaha, yang umumnya diukur dengan ongkos moneter. Efisiensi dapat diidentifikasi ketika suatu kebijakan mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terendah, dan kondisi ini dinamakan efisiensi.

c) Kecukupan (*Adequacy*)

Kecukupan dalam kebijakan publik mencakup pencapaian yang merata dalam memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan saat mengatasi masalah tertentu. Berdasarkan konsep tersebut,

kecukupan masih terkait dengan efektivitas dengan cara mengukur atau memperkirakan sejauh mana alternatif dapat memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang dalam mengatasi persoalan yang muncul.

d) Pemerataan (*Equity*)

Pemerataan dalam kebijakan publik mencerminkan distribusi yang merata dari manfaat dan penerimaan yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut. William N Dunn menyatakan bahwa kriteria pemerataan mencakup aspek kenegaraan, sosial, dan mengindikasikan penyampaian hasil dan upaya yang tidak memihak. Kebijakan dianggap berhasil jika hasil atau upaya didistribusikan secara merata. Sebuah program dianggap layak dan memadai ketika biaya dan manfaatnya seimbang. Kunci pemerataan adalah kesetaraan dan keadilan.

e) Responsivitas (*Responsiveness*)

Responsivitas dalam konteks kebijakan publik dapat diartikan sebagai tanggapan atau respon yang diberikan oleh sasaran kebijakan terhadap implementasi suatu kebijakan. Responsivitas ini mengacu pada sejauh mana suatu kebijakan dapat memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai dari kelompok masyarakat tertentu.

f) Ketepatan (*Appropriateness*)

Ketepatan mengacu pada nilai atau signifikansi dari tujuan program dan sejauh mana pendapat dasar dari tujuan-tujuan tersebut diakui. Ketepatan mencakup langkah-langkah yang digunakan untuk memilih bahan atau alternatif dengan mengevaluasi apakah dampak samping dari opsi yang diusulkan merupakan keputusan objektif yang dapat dicapai. Karena aturan ini berkaitan dengan substansi tujuan, seperti dampak yang tidak terduga sebelumnya, baik positif maupun negatif, atau kemungkinan bahwa opsi yang berbeda dianggap lebih baik daripada implementasi kebijakan, maka pendekatan yang lebih kokoh diperlukan.

### **Pendidikan di Indonesia**

Pendidikan adalah usaha yang disengaja untuk mewujudkan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini membuat generasi saat ini menjadi pewaris dan penjaga tradisi dari pengajaran generasi sebelumnya. Sampai saat ini, definisi lengkap pendidikan belum dapat dibatasi karena sifatnya yang kompleks, terutama karena sasaran utamanya adalah manusia. Efektivitas pendidikan di Indonesia mengalami tingkat keberhasilan yang rendah. Menurut penelitian dan survei yang dilakukan oleh praktisi pendidikan setelah melakukan penelitian di lapangan, salah satu faktor penyebab rendahnya efektivitas tersebut adalah ketidakjelasan tujuan pendidikan sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran (Agustang, 2021). Kurangnya kejelasan ini mengakibatkan kurangnya pemahaman oleh peserta didik dan pendidik mengenai tujuan yang akan dicapai, sehingga tidak terbentuk gambaran yang jelas dalam proses pendidikan.

Selama ini, banyak pendapat yang beranggapan bahwa pendidikan formal hanya dianggap sebagai formalitas untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia tanpa memperhatikan hasil pembelajaran yang diperoleh. Terlepas dari hasil pembelajaran formal tersebut, yang dianggap penting adalah telah menempuh pendidikan di jenjang yang tinggi dan diakui oleh masyarakat. Pandangan semacam ini dapat menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya efektivitas pengajaran di Indonesia.

Pendidikan nonformal pada saat ini sangatlah besar dalam berkontribusi bagi pengembangan masyarakat, serta dalam persoalan ini dapat dilihat bahwa dalam masyarakat antusiasmenya dan kebersamaannya yang sangat begitu erat. Dalam perkembangannya pendidikan nonformal mengalami perluasan yang sangat signifikan sehingga berdampak bagi kehidupan Masyarakat. Disamping itu, pendidikan nonformal bukan hanya sebagai substitusi pendidikan, suplemen pendidikan, dan bahkan komplemen pendidikan namun sudah menjadi pilihan kebutuhan masyarakat, hal ini mensejajarkan pendidikan nonformal dengan pendidikan formal.

Tugas pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia melibatkan upaya untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan di seluruh daerah menjadi merata, sehingga setiap daerah memiliki standar kualitas yang setara dengan daerah lainnya.

### **Program PUSPAGA**

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Surabaya, yang diresmikan oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada 9 Januari 2017, berfungsi sebagai ruang khusus bagi warga Surabaya yang menghadapi permasalahan terkait kenakalan anak atau masalah keluarga. PUSPAGA diimplementasikan sebagai unit layanan keluarga sesuai dengan mandat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak adalah urusan wajib non-pelayanan dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2, yang mencakup sub urusan kualitas keluarga dan sub urusan pemenuhan hak anak.

PUSPAGA berfungsi sebagai tempat pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Upaya ini dilakukan oleh tenaga profesi dengan peningkatan kapasitas orang tua, keluarga, atau individu yang bertanggung jawab terhadap anak. Fokusnya adalah memberikan pemahaman dan keterampilan kepada orang tua dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk melibatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

## **METODE**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, bukan angka, dan digunakan sebagai bahan analisis terhadap suatu peristiwa atau gejala sosial. Pemilihan penelitian kualitatif sesuai dengan konteks judul penelitian, yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai gejala sosial yang ada di wilayah penelitian. Sehingga data tersebut sesuai dengan penelitian kualitatif tidak bisa dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif yang merujuk pada data statistik.

Menurut (Sugiyono, 2014), penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang didasarkan pada penalaran positif, digunakan untuk menyelidiki situasi ilmiah objek penelitian dimana peneliti berperan sebagai instrumen utama, menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi (kombinasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan penelitian kualitatif menekankan makna dalam generalisasi hasil.

### **Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada analisis kinerja Program Pusat Pembelajaran Keluarga, mengeksplorasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program tersebut terutama dalam penanganan anak putus sekolah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip layanan yang diterapkan dalam Program Pusat Pembelajaran Keluarga di Kota Surabaya. Pendekatan untuk analisis ini menggunakan kerangka teori William N. Dunn, yang mencakup enam variabel utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti akan melakukan pengamatan, mengumpulkan informasi, dan melakukan wawancara dengan narasumber serta mengumpulkan data. Dalam konteks penelitian ini, lokasi penelitian terletak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3APPKB), serta di Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya. Tempat-tempat ini menjadi sumber informasi utama dan komponen integral dalam kelengkapan penelitian terkait dengan kebijakan yang sedang dipelajari.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Evaluasi Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Wiyung Kota Surabaya**

Suatu kebijakan juga tentunya untuk mengetahui apakah dapat diimplementasikan secara maksimal atau tidak. Kebijakan perlu adanya evaluasi sehingga jika ada kendala di lapangan segera dapat dicari solusinya, untuk itu peneliti dalam hal ini ingin mengetahui sejauh mana kebijakan PUSPAGA diimplementasikan, maka hal ini perlu adanya evaluasi dengan menggunakan teori dari William N. Dunn dan juga mencakup kinerja pelaksanaan program selama program berjalan.

Berdasarkan temuan hasil penelitian di lapangan dalam bentuk wawancara kepada informan dan dokumentasi. Kemudian hasil temuan diolah dan dianalisis, maka pembahasan pada bab ini berdasarkan rumusan masalah yang ada, yakni sebagai berikut:

Dalam hal ini Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Surabaya memberikan pelayanan dalam bentuk unit layanan terpadu satu pintu (*one stop service*) untuk membantu dalam masalah keluarga dan anak

untuk masyarakat Kota Surabaya, dengan menciptakan pelayanan publik dengan wujud baru guna mencapai tujuan dan sasaran pada masyarakat dalam mengoptimalkan Puspaga sebagai tempat untuk pencegahan dan permasalahan yang dialami masyarakat (Akbar et al., 2019). Selain itu dengan adanya program Pusat Pembelajaran Keluarga sebagai tujuan peningkatan kesejahteraan keluarga kepada keluarga-keluarga dan masyarakat Kota Surabaya sesuai dengan kegiatan pelayanan dan peran yang sudah ditetapkan.

Pada evaluasi kebijakan program Pusat Pembelajaran Keluarga dengan sub efisiensi kriteria yakni apa saja usaha yang sudah dilakukan agar program PUSPAGA ini dapat berjalan. Dalam aspek efisiensi, peneliti menemukan bahwa program PUSPAGA telah melakukan upaya tertentu, seperti mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kota Surabaya sebagai penyelenggara kepentingan pemerintahan daerah yang berlandaskan kekuasaan dan perundang-undangan. Pemerintah Kota Surabaya memiliki kewajiban untuk membantu meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui program pendidikan atau pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, dan kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga. Program ini sejalan dengan tujuan menciptakan generasi anak cerdas, ceria, dan berkualitas.

Dalam rangka mencapai cita-cita tersebut, DP3APKB melalui PUSPAGA Balai RW memperluas layanan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dengan kewirausahaan, meningkatkan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan atau pengasuhan anak, menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurunkan angka pekerja anak, serta melakukan pencegahan perkawinan anak. Pemerintah Kota Surabaya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyelenggarakan sosialisasi, pelayanan, edukasi, pendampingan, dan konseling terkait permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui PUSPAGA Balai RW.

Selain itu, hasil di lapangan yang menunjukkan prosedur pelayanan yang cepat, tepat dan mudah untuk diakses dimana dan kapanpun sejalan dengan ukuran kualitas pelayanan menurut Zeithaml, dkk (1990: 58-59). *Tangible* atau berwujud dengan indikator dimana kemudahan dalam proses pelayanan, kedisiplinan petugas dalam melakukan pelayanan, kemudahan masyarakat mengakses dalam permohonan pelayanan.

Keadilan dalam konteks kebijakan pemerintah, khususnya dalam program PUSPAGA, tercermin dari kemampuan program ini untuk dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat melalui layanan offline dan online. Pada aspek perataan, yang mengindikasikan keadilan bagi kelompok sasaran kebijakan publik, program PUSPAGA, terutama dalam menangani kasus anak putus sekolah, dianggap cukup adil dan merata. Proses ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengikuti mekanisme serta prosedur yang telah ditetapkan. Sosialisasi program dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan YouTube, serta secara rutin diadakan melalui platform online seperti Zoom setiap minggunya di seluruh Balai RW di Surabaya. Data menunjukkan bahwa kebijakan PUSPAGA telah efisien dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, mulai dari proses sosialisasi hingga pelayanan akhir, memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Selain untuk meningkatkan kualitas layanan pelaksanaan kebijakan program PUSPAGA juga mampu untuk menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis atau prosedur yang ada. Saat pelaksanaan akan memahami dan mengkoordinasi program PUSPAGA melalui sosialisasi. Sosialisasi menjadi elemen krusial dan perlu mendapat perhatian yang baik dalam menyampaikan tujuan dan peraturan kebijakan, sehingga seluruh masyarakat dapat memahami maksud dari kebijakan tersebut. Sosialisasi dapat berbentuk partisipasi masyarakat, yang sejalan dengan prinsip pelayanan, seperti yang dijelaskan oleh Sinambela, dkk (2011: 6), bahwa partisipasi mendorong aktifnya peran masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik, dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Prinsip kesetaraan hak dan tidak diskriminasi memastikan bahwa tidak ada perbedaan dalam perlakuan berdasarkan status gender atau ekonomi. Keseimbangan hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima layanan publik harus dijaga untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kebijakan ini dirancang untuk mempermudah masyarakat melakukan aduan atau mendapatkan saran masukan atas permasalahan yang terjadi dalam keluarga melalui online maupun offline hasilnya

sama. Keadilan yang diberikan dari suatu kebijakan pemerintah kepada masyarakat dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan suatu kebijakan atau program yang akan dijalankan. Ditinjau pada pelayanan sebelum adanya program PUSPAGA di website, semua kalangan dari usia remaja sampai berumur menggunakan aduan langsung. Berdasarkan kualitas sumber daya manusia pada layanan sebelumnya secara langsung sangat membutuhkan sumber daya manusia yang banyak dan sangat memungkinkan masyarakat untuk antri, serta beberapa masyarakat akan jenuh dengan pelayanan yang lama, sehingga akan memakan banyak waktu, agar program PUSPAGA saat pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar perlu adanya sumber daya manusia yang memadai dari segi keahlian, dan pengetahuan.

Selain itu, konselor program PUSPAGA mempunyai petugas yang ahli di bidangnya. Hal ini sejalan dengan standar pelayanan publik, menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 yaitu kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Berbicara mengenai program Pusat Pembelajaran Keluarga yang termasuk dalam pelayanan publik. Pada poin responsivitas peneliti lebih mengarah untuk mengetahui apakah hasil kebijakan program PUSPAGA memuaskan masyarakat Kota Surabaya. Pendapat masyarakat yang menyatakan bahwa program PUSPAGA sudah cukup memuaskan, meskipun masih ada beberapa yang masih asing dengan adanya program tersebut, sesuai dengan fakta yang terlihat di lapangan dan relevan dengan beberapa pendapat sebelumnya. Dalam pelaksanaan program masyarakat yang menjadi sasaran program sangat antusias namun masih ada masyarakat yang kurang antusias dalam pelaksanaan program.

Ketepatan dalam konteks ini secara dekat terkait dengan rasionalitas substantif, yang mencakup pertimbangan atas satu atau lebih kriteria bersama-sama. Evaluasi ketepatan menitik beratkan pada nilai suatu program dan kuatnya asumsi yang mendasari tujuan kebijakan tersebut. Hubungan antara ketepatan dan rasionalitas substantif terlihat dalam pertanyaan mengenai sejauh mana program kebijakan memenuhi satu atau lebih kriteria secara bersama-sama.

Namun, program yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Kota Surabaya dianggap tidak memenuhi indikator ketepatan menurut penilaian. Dimana program yang dilaksanakan kurang mencapai tujuannya dalam menanggulangi dan mencegah Permasalahan anak putus sekolah. Namun jika dilihat dari hasil penelitian dalam satu kelurahan dalam sebulan bisa mencapai 15-20 orang yang melakukan konsultasi maupun aduan. Jadi bisa dikatakan program ini cukup memberikan manfaat besar bagi masyarakat di Kecamatan Wiyung.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Program PUSPAGA**

Kebijakan program PUSPAGA didukung oleh berbagai faktor. Dukungan tersebut melibatkan beberapa dinas, pelaksana kebijakan yang memiliki tenaga ahli di bidangnya, serta partisipasi aktif masyarakat yang menjadikan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga sebagai pilihan utama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Lalu faktor penghambatnya yakni kurang terbukanya klien terhadap konselor karena mereka menganggap masalah itu aib yang tidak perlu diceritakan ke orang lain.

### **KESIMPULAN**

Program Kebijakan Pusat Pembelajaran Keluarga cukup dikatakan sudah sangat efektif karena dengan adanya program ini dapat membantu memudahkan Masyarakat karena sudah ada di Balai RW setiap kelurahan di Kota Surabaya.

#### **a) Efektifitas**

Adanya program PUSPAGA sudah transparan dan cepat tanggap semua sudah sesuai dengan peraturan atau prosedur dan untuk ketepatan waktu juga sesuai prosedur yang ada.

#### **b) Efisiensi**

Tingkat usaha yang sudah dilakukan yakni adanya dukungan dari berbagai pihak seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana meluncurkan Website SIAP PPAK. Dan usaha yang dilakukan Program PUSPAGA agar dapat berjalan mencakup sosialisasi, edukasi, dan bimbingan masyarakat.

#### **c) Kecukupan**

Program PUSPAGA ini manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat terutama klien keluarga anak putus sekolah. bahwa adanya kebijakan program puspaga di balai RW ini mampu mencukupi pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat bisa langsung melakukan aduan ke balai RW maupun online karena program Puspaga ini prosedurnya tidak berbelit-belit dan dalam jangka waktu yang tidak lama.

d) Pemerataan

Berdasarkan fakta yang ada, program kebijakan ini sudah disosialisasikan di berbagai tempat seperti sekolah, yang diadakan setiap minggunya melalui zoom online seluruh balai RW yang ada di Kota Surabaya. Namun kebijakan program puspaga di balai RW kurang merata karena terbatasnya SDM tenaga psikolog profesional.

e) Responsivitas

Kebijakan Program Puspaga sudah memuaskan masyarakat Kecamatan Wiyung. Bahwa masyarakat mempunyai tanggapan positif serta mempunyai saran positif untuk dapat meningkatkan pelayanan dari tingkat paling rendah meskipun masih ada masyarakat yang masih asing dengan adanya Program Pusat Pembelajaran Keluarga ini.

f) Ketepatan

Masyarakat menjadikan Puspaga untuk pengaduan terkait permasalahan keluarga karena kualitas pelayanannya sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Dapat dilihat bahwa dalam kebijakan program PUSPAGA sudah sangat tepat walaupun program ini lebih ke pencegahan daripada penanganan tapi banyak respon positif dari masyarakat terhadap program pusat pembelajaran keluarga ini.

### Rekomendasi Pengembangan

Adapun rekomendasi bagi dinas atau pembuatan kebijakan program, diantaranya:

- a) Harus sering mengadakan sosialisasi terkait Web Sistem Informasi Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (SIAP PPAK) karena Web ini baru terbentuk di tahun 2023.
- b) Menambah jumlah konselor dari tenaga psikolog profesional.
- c) Perlu adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang teratur untuk memastikan efektivitas program dan memperbaiki kekurangan yang mungkin timbul.

Adapun rekomendasi bagi masyarakat, diantaranya:

- a) Perlunya edukasi dan bimbingan lebih dalam mengenai teknologi terutama bagi masyarakat yang berusia dewasa atau lanjut.
- b) Perlu adanya peran anak muda untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang belum paham tentang adanya program pusat pembelajaran keluarga ini.
- c) Kesadaran betapa pentingnya peran orang tua terhadap pendidikan anaknya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M., Susilowati, E., & Djuanda, P. H. (2019). Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Remaja Beresiko di RW 09 Kebon Pisang Kota Bandung. *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2), 1–14.
- Alves, V. M., & Bataha, K. (2022). Peran Fasilitator Puspaga Dalam Upaya Penanganan Kasus Anak Putus Sekolah (Studi Kasus Kelurahan Dupak). *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), 1483–1490.
- Amini, Q., Rizkyah, K., Nuralviah, S., & Urfany, N. (2020). Pengaruh Globalisasi Terhadap Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, 2(3), 375–385.
- Fitriati, C. A., Pratama, A., & Marefanda, N. (2023). Implementasi Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Dalam Merealisasikan Lingkungan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kabupaten Nagan Raya. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 580–599.
- Manurung, D. A., & Simanjuntak, H. (2021). Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 8(1), 55–70.
- Putra, P. H. (2019). Tantangan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Society 5.0. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(02), 99–110.
- Ramadhan, T., & Diniyah, N. (2022). Efektivitas Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Pada Anak di Tangerang Selatan. *Sahaja*, 1(2), 109–119.

- Rosita, Wijaya, I. S., & Kusuma, R. H. (2021). Implementasi Layanan Konseling Keluarga di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Cinta Syejati Samarinda. *Taujihat: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2(1), 30–45.
- Sinambela, & Lijan, P. (2011). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.



## PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA DENGAN BRUNEI DARUSSALAM

Aizah Dien Putri Ambarizki<sup>1</sup>, Totok Minto Laksono<sup>2</sup>  
Universitas Hang Tuah Surabaya<sup>1</sup>, Universitas Kediri<sup>2</sup>  
aizahdien14@gmail.com<sup>1</sup>, totokminto.shmh@gmail.com<sup>2</sup>  
Correspondence Author: totokminto.shmh@gmail.com

### ABSTRAK

#### Histori Artikel

**Submitted**

4 September 2023

**Reviewed**

17 September 2023

**Accepted**

26 September 2023

**Published**

30 Maret 2024

Negara menjadi sebuah wadah agar manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik dan menjaga kedamaian sosial. Negara Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki karakteristik dan sistemnya sendiri dalam menjalankan roda kehidupan, tentunya terdapat perbedaan-perbedaan dari segi sosial, ekonomi, maupun politik. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dan mendeskripsikan sistem administrasi negara Indonesia dengan Brunei Darussalam. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research). Sumber data berasal dari artikel jurnal, literatur, media massa online, dan Internet. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi, melalui peninggalan tertulis terutama berbentuk arsip dan termasuk buku-buku tentang

pendapat, teori, dalil, konsep, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan dari sistem administrasi negara Indonesia dengan Brunei Darussalam, mulai dari bentuk pemerintahan Indonesia berbentuk Republik sedangkan Brunei Darussalam berbentuk Monarki Absolut. Kepala negara Indonesia adalah presiden sedangkan Brunei Darussalam yaitu Sultan. Pada profil negara yang meliputi letak geografis, demografi, ekonomi, dan akuntansi, kemudian sistem pemerintahan, dan birokrasi terdapat juga perbedaan. Perbandingan tersebut nantinya diharapkan akan bermanfaat untuk pengembangan konsep dan teori Sistem Administrasi Negara.

**Kata Kunci:** Sistem, Administrasi, Indonesia, dan Brunei Darussalam

### ABSTRACT

The state is a place where people can live their lives well and maintain social peace. Indonesia and Brunei Darussalam have their own characteristics and systems in running the wheels of life, of course there are differences in terms of social, economic and political aspects. This research aims to compare and describe the state administration system of Indonesia and Brunei Darussalam. The research was conducted using a qualitative method that is a library study (library research). Data sources come from journal articles, literature, online mass media, and the Internet. The data collection technique in this research is documentation, through written relics mainly in the form of archives and including books on opinions, theories, arguments, concepts, or laws related to research problems. The results showed that there are differences and similarities between the Indonesian and Brunei Darussalam state administration systems, starting from the Indonesian form of government in the form of a Republic while Brunei Darussalam is in the form of an Absolute Monarchy. The head of state of Indonesia is the president while Brunei Darussalam is the Sultan. In the country's profile which includes geographical location, demographics, economy, and accounting, then the government system, and bureaucracy there are also differences. The comparison is expected to be useful for the development of concepts and theories of the State Administration System.

**Keywords:** System, Administration, Indonesia, and Brunei Darussalam

## PENDAHULUAN

Negara adalah suatu organisasi yang berada dalam suatu wilayah dengan kekuasaan hukum tertinggi dan diakui oleh rakyatnya, yang terbagi menjadi beberapa unsur yaitu adanya wilayah, pemerintahan, rakyat dan pengakuan kedaulatan. Sedangkan administrasi merupakan proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang diputuskan bersama. Kemudian, perbandingan adalah dua atau lebih yang dibandingkan dengan hal lain. Keberadaan sebuah institusi yang bernama negara menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari keberadaannya. Hal ini dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan sebuah perangkat yang menjadi sebuah ikatan kebersamaan dalam kontrak sosial antar manusia. Dengan adanya sebuah negara diharapkan menjadi sebuah wadah agar manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga kedamaian sosial.

Sistem administrasi negara (Sistem Public Administration) adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan dalam suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.

Dari uraian di atas, tentu setiap negara memiliki karakteristik dan sistem yang berbeda-beda. Oleh karena itu, artikel ini disusun guna mendeskripsikan dan mengetahui perbandingan dari sistem administrasi serta birokrasi negara Indonesia dengan Brunei Darussalam.

## METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama (Hadi, 1995: 3). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti (Mantra, 2008: 30). Sedangkan penentuan sumber data berasal dari artikel jurnal, media massa, berita, internet. Mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berbentuk arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, konsep, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis). Analisis isi merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu data (Muhadjir, 1998: 49).

## HASIL

### Bentuk Negara Indonesia Dengan Negara Brunei Darussalam

#### Negara Indonesia

Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan. Pada sebuah negara kesatuan, kedaulatan negara tersebut bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan Pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi. Sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat. Dalam negara kesatuan sebagai bentuk negara Indonesia yang menganut sistem desentralisasi, diartikan sistem dimana daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan sebagai daerah otonom. Sedangkan bentuk pemerintahan Indonesia yaitu Republik. Bentuk pemerintahan republik adalah suatu bentuk pemerintahan yang kepala negaranya bukan seorang raja atau ratu melainkan seorang presiden yang memegang pemerintahan melalui pemilihan umum.

### **Negara Brunei Darussalam**

Bentuk Negara dari Brunei Darussalam ialah kesultanan konstitusional namun secara garis besar bentuk negaranya ialah Kesatuan, yang mana Negara ini termasuk dalam 4 distrik administratif (disebut daerah). Setiap distrik dipimpin oleh pejabat yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Setiap Daerah dibagi lagi ke dalam subdistrik (disebut Mukim) yang setiapnya dipimpin seorang Kepala yang diangkat dan disebut Penghulu. Setiap Mukim dibagi lagi ke dalam desa (disebut Kampong) dipimpin Ketua Kampong yang dipilih langsung oleh masyarakat secara luber, dan efektif jika yang terpilih disetujui oleh Pemerintah. negara ini terdiri atas dua bagian yang dipisahkan di daratan oleh Malaysia. Sedangkan bentuk pemerintahannya adalah Monarki Absolut, dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun baginda secara berkesan merupakan pemerintah tertinggi. Media amat memihak kerajaan, dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam negeri.

### **Profil Negara Indonesia dan Negara Brunei Darussalam**

#### **Negara Indonesia**

##### **a. Posisi Geografis**

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Jumlah penduduk Indonesia sebesar 275,77 juta jiwa. Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi.

Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia menjadi 1.9 juta mil persegi. Lima pulau besar di Indonesia adalah: Sumatera dengan luas 473.606 km persegi, Jawa dengan luas 132.107 km persegi, Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia) dengan luas 539.460 km persegi, Sulawesi dengan luas 189.216 km persegi, dan Papua dengan luas 421.981 km persegi.

##### **b. Demografi**

Penduduk Indonesia dapat dibagi secara garis besar dalam dua kelompok. Di bagian barat Indonesia penduduknya kebanyakan adalah suku Melayu, sementara di timur adalah suku Papua, yang mempunyai akar di kepulauan Melanesia. Banyak penduduk Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai bagian dari kelompok suku yang lebih spesifik, yang dibagi menurut bahasa dan asal daerah, misalnya Jawa, Sunda atau Batak. Selain itu juga ada penduduk pendatang yang jumlahnya minoritas diantaranya adalah Etnis Tionghoa, India, dan Arab. Mereka sudah lama datang ke nusantara dengan jalur perdagangan sejak abad ke 8 SM dan menetap menjadi bagian dari Nusantara.

Di Indonesia terdapat sekitar 3% populasi etnis Tionghoa. Angka ini berbeda-beda karena hanya pada tahun 1930-an terakhir kalinya pemerintah melakukan sensus dengan menggolong-golongkan masyarakat Indonesia ke dalam suku bangsa dan keturunannya. Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh sekitar 85,2% penduduk Indonesia, yang menjadikan Indonesia negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Sisanya beragama Protestan (8,9%); Katolik (3%); Hindu (1,8%); Buddha (0,8%); dan lain-lain (0,3%). Kebanyakan penduduk Indonesia bertutur dalam bahasa daerah sebagai bahasa ibu, namun bahasa resmi Indonesia, bahasa Indonesia, diajarkan di seluruh sekolah-sekolah di Negara ini dan dikuasai oleh hampir seluruh penduduk Indonesia.

##### **c. Ekonomi**

Ekonomi Indonesia mengalami kemunduran pada akhir tahun 1990-an akibat krisis ekonomi yang melanda sebagian besar Asia pada saat itu. Ekonominya kini telah lumayan stabil saat ini. Kondisi wilayah negara Indonesia yang terletak diantara benua Asia dan benua Australia menyebabkan corak pada keadaan sosial ekonomi penduduk negara Indonesia. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh

penduduk Indonesia, yaitu:

- Negara Indonesia merupakan suatu negara agraris, di mana kurang lebih 70% penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Bentuk dari kegiatan pertanian negara Indonesia, yaitu sawah (terdiri dari sawah irigasi, sawah tadah hujan, lebak, dan bencah); ladang atau huma; tegalan; dan kebun.
- Merupakan suatu usaha dari rakyat, pemerintah, dan swasta dalam menanam tumbuhan untuk bahan mentah di industri dan barang ekspor.
- Peternakan yang ada di negara Indonesia, terdiri dari peternakan hewan besar (antara lain sapi, lembu, dan kuda), peternakan hewan kecil (antara lain kambing, kelinci, dan babi), dan peternakan hewan unggas (antara lain burung, itik, dan ayam).
- Perikanan darat dan perikanan laut.
- Kehutanan
- Pertambangan, terdiri dari eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan pemasaran.
- Perindustrian, terdiri dari industri kecil, industri sedang, dan industri besar.
- Sektor pertanian menjadi sektor utama dalam kegiatan ekonomi penduduk di negara Indonesia. Hal tersebut menyebabkan Indonesia disebut sebagai negara agraris.
- Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar di luar Jawa, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga dan emas. Indonesia adalah pengekspor gas alam terbesar kedua di dunia. Hasil pertanian yang utama termasuk beras, teh, kopi, rempah- rempah dan karet.
- Rekan perdagangan terbesar Indonesia adalah Jepang, Amerika Serikat dan negara- negara tetangganya yaitu Malaysia, Singapura dan Australia.

#### d. Akuntansi

Indonesia mengikuti standard akuntansi yang ditetapkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Sistem akuntansi ini diangkat dari standar keuangan sesuai dengan International Accounting Standards Board (IASB). Kegiatan ekspor dan impor yang semakin kompleks, dan juga semakin berkembangnya perusahaan asing di Indonesia, menyebabkan standar PSAK saat ini hendak dipersatukan. Tujuannya membuat standar akuntansi di Indonesia serupa dengan standar akuntansi di dunia internasional (Zsazya, 2020). Indonesia telah menggunakan International Financial reporting standards (IFRS) untuk penulisan laporan keuangannya. IFRS telah menjadi patokan dasar untuk menyamakan pembuatan laporan keuangan dunia. IFRS juga telah diterapkan oleh berbagai negara maju serta berkembang. Dengan adanya IFRS, sistem pencatatan laporan keuangan akan serupa dengan negara lain, dan hal ini juga tentu memudahkan pencatatan laporan keuangan perusahaan asing di Indonesia. IAI yang berdiri sejak 23 Desember 1957, bertindak sebagai badan pengaturan dan pembinaan akuntansi di Indonesia dengan pengawasan Departemen Keuangan. Penyusunan SAK dan SPAP dilakukan oleh pihak IAI. Dulunya, sistem tata buku Belanda digunakan oleh Indonesia. Kemudian, setelah kemerdekaan menggunakan pola Amerika tahun 2005. Sejak Januari 1995, standar IASC mulai berlaku dan telah tertulis dalam PSAK (Zsazya, 2020).

### Negara Brunei Darussalam

#### a. Posisi Geografis

Brunei terdiri dari dua bagian yang tidak berkaitan; 97% dari jumlah penduduknya tinggal di bagian barat yang lebih besar, dengan hanya kira-kira 10.000 orang tinggal di daerah Temburong, yaitu bagian timur yang bergunung-gunung. Jumlah penduduk Brunei 383.000 orang. Dari bilangan ini, lebih kurang 46.000 orang tinggal di ibukota Bandar Seri Begawan. Sejumlah kota utama termasuk kota pelabuhan Muara, serta kota Seria yang menghasilkan minyak, dan Kuala Belait, kota tetangganya. Di daerah Belait, kawasan Panaga ialah kampung halaman sejumlah besar ekspatriat, disebabkan oleh fasilitas perumahan dan rekreasi Royal Dutch Shell dan British Army. Klub Panaga yang terkenal terletak di sini.

Brunei Darussalam terletak di Pantai Kalimantan Barat Laut, hanya berbatasan dengan satu negara saja, yaitu Malaysia, di negara bagian Serawak atau terletak antara 5°LU – 4°LS dan 114°BT – 115°30'BT.

Keseluruhan pantai menghadap laut Cina Selatan yang panjangnya sekitar 161 km. Serawak membagi Brunei menjadi dua bagian yaitu bagian barat dan bagian timur. Negara Brunei Darussalam terbagi atas dua bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Bagian barat terdiri atas 3 daerah yaitu daerah Tutong, Belait, dan Brunei, sedangkan bagian timurnya adalah daerah Temburong. Luas wilayah seluruhnya adalah 5,765 km<sup>2</sup>, hampir sama dengan luas Pulau Bali di Indonesia (5.561 km<sup>2</sup>). Brunei mempunyai batas sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan
2. Sebelah timur berbatasan dengan Sabah, Malaysia
3. Sebelah barat berbatasan dengan Serawak, Malaysia

#### **b. Demografi**

Pada umumnya penduduk bertempat tinggal di kota-kota sepanjang pantai Laut Cina Selatan. Mereka terdiri atas orang Melayu sebanyak 50%, Cina sebanyak 18%, orang Kedayan yang diperkirakan berasal dari Jawa dan Sumatera sebanyak 16%, sisanya adalah orang Kedayan dan orang Dayak. Bahasa resmi penduduk Brunei adalah bahasa Melayu. Agama resminya adalah agama Islam.

Negara Brunei Darussalam adalah negara mungil yang sangat kaya akan minyak, terletak di pantai barat laut Pulau Kalimantan. Bagian Barat merupakan dataran pantai yang berawa sedangkan bagian Timur berbukit. Brunei terbagi menjadi 4 distrik, yaitu: distrik Brunei Muara, distrik Tutong, distrik Belait, dan distrik Temburong. Bandar Seri Begawan adalah Ibu Kota yang tertata rapi dengan penduduk hanya sekitar 60,000 jiwa. Salah satu bangunan yang termegah di negara ini adalah Mesjid Raya Omar Ali Saifuddin yang dibangun di atas sebuah laguna buatan dengan interior berhias marmer Italia. Kampung Ayer merupakan kawasan pemukiman umah panggung yang terdiri dari 28 desa dan telah ada selama beberapa abad lamanya. Pulau Rangu yang terletak di tengah sungai dekat Istana Nurul Iman, merupakan habitat beragam monyet khas Kalimantan.

#### **c. Ekonomi**

Ekonomi kecil yang kaya ini adalah suatu campuran kewirausahaan dalam negeri dan asing, pengawalan kerajaan, kebajikan, serta tradisi kampung. Pengeluaran minyak mentah dan gas alam terdiri dari hampir setengah PDB. Pendapatan yang cukup besar pekerjaan luar negeri menambah pendapatan daripada pengeluaran dalam negeri. Kerajaan membekali semua layanan pengobatan dan memberikan subsidi beras dan perumahan. Pemimpin-pemimpin Brunei merasa bimbang bahwa keterpaduan dengan ekonomi dunia yang semakin bertambah akan mempengaruhi perpaduan sosial dalam, walaupun Brunei telah memainkan peranan yang lebih kentara dengan menjadi ketua forum APEC pada tahun 2000. Rancangan-rancangan yang dinyatakan untuk masa hadapan termasuk peningkatan keterampilan tenaga buruh, pengurangan pengangguran, penguatan sektor-sektor perbankan dan pariwisata, serta secara umum, peluasan lagi asas ekonominya. Sistem Penerbangan Brunei Diraja, sistem penerbangan negara, sedang mencoba menjadikan Brunei sebagai pusat perjalanan internasional antara Eropa dan Australia/Selandia Baru. Ia juga mempunyai layanan ke tujuan-tujuan Asia yang utama. Ekonomi Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas dengan pendapatan nasional yang termasuk tinggi di dunia satuan mata uangnya adalah Brunei Dolar yang memiliki nilai sama dengan Dolar Singapura.

Satuan mata uangnya adalah Dolar Brunei yang memiliki nilai sama dengan Dolar Singapura. Selain bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas, pemerintah Brunei mencoba melakukan diversifikasi sumber-sumber ekonomi dalam bidang perdagangan.

##### **1) Potensi Alam**

- a) Kawasan daratan di Brunei didominasi ketampakan alam dataran rendah dengan sedikit perbukitan di bagian Timurnya.
- b) Memiliki sumber daya alam minyak bumi dan gas alam yang sangat besar.
- c) Di bidang pertanian, negara ini adalah penghasil kelapa, karet, dan kelapa sawit yang cukup besar.

##### **2) Potensi Pariwisata**

Bentuk wisata yang dikembangkan pemerintah Brunei Darussalam adalah wisata budaya, misalnya kehidupan masyarakat terapung di daerah yang disebut dengan Kota Air dan

istana kesultanan Brunei yang dihiasi oleh lapisan emas di kubah utamanya.

3) Potensi Industri

Industri minyak adalah industri utama di Brunei Darussalam. Selain itu, terdapat juga industri gas alam. Penambangan minyak dan gas alam ini dilakukan di darat dan lepas pantai.

4) Potensi Sosial Budaya

Penduduk Brunei Darussalam didominasi oleh suku bangsa Melayu, sisanya adalah suku bangsa Cina, Kedayan, Kadazan, dan Dayak. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Namun dalam penggunaan sehari-hari, penduduknya ada yang berbahasa Mandarin dan Inggris.

5) Sektor pertanian menghasilkan padi, jagung, kelapa, dan sagu.

6) Sektor perkebunan menghasilkan karet, kelapa sawit, dan lada.

7) Sektor pertambangan menghasilkan minyak dan gas bumi.

Sumber ekonomi utamanya diperoleh dari sektor minyak dan gas bumi, yaitu mencapai 76% dari pendapatan negara. Minyak bumi merupakan komoditi ekspor tertinggi yaitu 99% dari seluruh ekspor Brunei.

8) Sektor Perhubungan

Untuk perhubungan dibangun transportasi melalui darat, laut, dan udara. Jaringan jalan raya masih terbatas (1.250 km) dan jalan kereta api hanya sepanjang 10 km. Untuk menghubungkan dengan luar negeri dibangun bandar udara internasional Bandar Seri Begawan dan Pelabuhan Samudra di muara Sungai Brunei.

9) Sektor Perdagangan

Ekspor Brunei berupa minyak bumi dan gas alam, kayu serta karet. Negeri ini mengimpor 80% bahan makanan, tekstil, mesin-mesin pertanian dan alat transportasi dari negara lain. Karena itu, dalam jangka panjang Brunei akan berusaha dapat melakukan swasembada pangan.

10) Sektor Kehutanan

Hasil hutan yang bisa diandalkan Brunei adalah kayu, rotan, cengal, dan damar.

**d. Akuntansi**

Brunei Darussalam Accounting Standards-Non Public Interest Entities (BDASNONPIE). Untuk entitas yang memenuhi syarat berdasarkan kerangka kerja NON-PIE untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan BDAS NON-PIE, satu set lengkap laporan keuangan terpisah untuk entitas tersebut mencakup neraca, laporan laba rugi, kebijakan akuntansi dan catatan penjelasan, laporan arus kas. BDAS NON-PIE tidak digunakan dalam pembuatan serta penyajian laporan keuangan konsolidasian (BDASC, 2020). Setiap item material harus disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan. Aset dan kewajiban biasanya tidak boleh saling hapus dalam laporan keuangan. Komparatif informasi harus dimasukkan dalam informasi narasi dan deskripsi pada saat itu berhubungan dengan pengertian mengenai laporan keuangan masa sekarang. Namun, beberapa penggantian kerugian diperlukan atau diizinkan dalam keadaan luar biasa, seperti diamanatkan oleh BDAS NON-PIE. Pengimbangan juga dapat terjadi di mana keuntungan, kerugian dan biaya terkait yang timbul dari transaksi yang sama atau serupa tidak material. Brunei menggunakan dua jenis standar akuntansi dimana yang pertama adalah standar yang diadopsi oleh Brunei yaitu Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. IFRS dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) dan digunakan oleh perusahaan yang memiliki kepentingan publik di Brunei. Standar akuntansi kedua adalah Standar Akuntansi Brunei Darussalam (BDAS) yang dikeluarkan oleh BDASC dan berlaku di Brunei mulai dari tanggal 1 Januari 2018.

## **Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dan Brunei Darussalam**

### **Negara Indonesia**

Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR pernah menjadi lembaga tertinggi negara unikameral, namun setelah amendemen ke-4 MPR bukanlah lembaga tertinggi lagi, dan komposisi keanggotaannya juga berubah. MPR setelah amendemen UUD 1945, yaitu sejak 2004 menjadi lembaga bikameral yang terdiri dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan wakil rakyat melalui Partai Politik, ditambah dengan 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang merupakan wakil provinsi dari jalur independen. Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu dan dilantik untuk masa jabatan lima tahun. Sebelumnya, anggota MPR adalah seluruh anggota DPR ditambah utusan golongan dan TNI/Polri.

Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kabinet di Indonesia adalah Kabinet Presidensial sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen. Presiden Joko Widodo yang diusung oleh PDIP menunjuk sejumlah pemimpin Partai Politik untuk duduk di kabinetnya. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pemerintahan mengingat kuatnya posisi lembaga legislatif di Indonesia. Namun pos-pos penting dan strategis umumnya diisi oleh menteri tanpa portofolio partai (berasal dari seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya).

Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amendemen UUD 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, termasuk pengaturan administrasi para hakim. Meskipun demikian keberadaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap dipertahankan.

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang menganut Ideologi Pancasila dan mempunyai beragam suku dan agama. Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 ditegaskan sebagai berikut:

- Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka
- Sistem konstitusional. Pemerintahan berdasarkan atas konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)
- Lembaga tertinggi adalah MPR
- Presiden adalah penyelenggara tertinggi pemerintah negara di bawah MPR
- Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
- Menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR
- Kekuasaan kepala negara tidak terbatas

### **Negara Brunei Darussalam**

Sistem pemerintahannya adalah kerajaan yang bersendikan pada ajaran Islam, dengan kekuasaan pemerintahan tertinggi berada di tangan sultan. Negara Brunei Darussalam Menganut sistem pemerintahan Presidensial dengan peran Raja yang dominan. Konstitusi Brunei merupakan penggabungan dari konsep pemerintahan Melayu Brunei dan Sistem Westminster/Inggris. Konsep Pemerintahan Melayu Brunei menekankan pada kepemimpinan yang otokratik, ketuhanan dan absolutisme kuasa sultan, namun masih mempersilahkan seluruh warganya untuk tetap berpartisipasi, hal inilah yang disebut dengan “Living Democracy”.

Di bawah konstitusi tahun 1959 ada sebuah Dewan Negara dipilih atau Majelis Masyuarat Negeri, tetapi hanya satu pemilihan umum yang pernah diselenggarakan, pada tahun 1962. Setelah pemilu, majelis dibubarkan setelah deklarasi keadaan darurat yang melihat pelarangan Partai Rakyat Brunei. Pada tahun 1970 Dewan diubah menjadi badan yang ditunjuk oleh Keputusan Sultan. Pada tanggal 13 Februari 1984, Dewan Negara dibubarkan oleh Sultan. Majelis Mesyuarat Negara Brunei didirikan kembali dengan sistem lama pada tanggal 25 September 2004. Majelis itu dibubarkan pada tanggal 1 September 2005 dan didirikan kembali pada tanggal 2 September 2005 sesuai dengan ketentuan baru pada Konstitusi Brunei yang telah diamendemen tahun 2005. Manajemen Majelis Negara Brunei dikelola oleh Panitia Majelis Negara Brunei untuk membantu dan menyarankan Ketua Majelis dalam hal mengatur rapat sesuai dengan aturan rapat. Panitia dan Wakil Panitia mempunyai peran yang sama seperti para Anggota Majelis. Pengelolaan Majelis didukung sepenuhnya oleh seluruh Pejabat dan staf dari Departemen Dewan Negara. Rapat majelis terbuka untuk umum, dan masyarakat dapat melihat sidang majelis dan mengamati mereka bersidang.

Pada diri raja terdapat kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang menyatu dalam ucapan dan perbuatannya. Dimana kekuasaan eksekutif sultan sekaligus perdana menteri hassanal bolkia yang menjabat sejak 5 oktober 1967, sultan adalah sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dan

kekuasaan legislatif bersifat unikamellar yaitu oleh majlis masyuarat negeri yang hanya bertindak sebagai lembaga konsultatif sultan. Lalu untuk kekuasaan yudikatif sendiri berada pada supreme count yang berarti pimpinan dan para hakim diangkat sumpah oleh sultan untuk menjabat 3 tahun. Segala urusan kenegaraan dijalankan oleh Sultan. Namun dalam proses pelaksanaan roda pemerintahan Sultan tidaklah bekerja sendiri, namun sultan dibantu oleh penasihat-penasihat dan menteri-menteri negara.

Sejak memproklamasikan diri sebagai negara merdeka, Brunei telah memastikan konsep “Melayu Islam Beraja” sebagai falsafah negara dengan seorang sultan sebagai kepala negaranya. Melayu Islam Beraja (MIB) merupakan ideologi yang dianut resmi oleh Kerajaan Brunei Darussalam yang secara resmi disahkan pada waktu proklamasi kemerdekaan Brunei Darussalam tanggal 1 Januari 1984. Hal itu dapat dilihat pada teks proklamasi kemerdekaan Brunei Darussalam yang dibacakan Sultan Haji Hassanal Bolkiah yaitu, “Negara Brunei Darussalam adalah dan dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahuwa Taala akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah Melayu Islam Beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik, bersendikan kepada ajaran-ajaran Agama Islam menurut Ahlussunnah Waljamaah”. Dalam konteks Beraja dalam MIB ini, Sultan memiliki 6 kedudukan:

1. Raja sebagai payung Allah di muka bumi
2. Raja sebagai pemimpin tertinggi Agama Islam
3. Raja sebagai kepala negara
4. Raja adalah kepala pemerintahan
5. Raja sebagai pemimpin tertinggi adat istiadat
6. Raja sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata

Brunei memiliki sistem hukum ganda. Yang pertama adalah sistem yang diwarisi dari Inggris, mirip dengan yang ditemukan di India, Malaysia dan Singapura. Hal ini didasarkan pada Common Law Inggris, tapi dengan kodifikasi suatu bagian penting dari itu. The Common Law sistem hukum yang mencakup sebagian besar hukum di Brunei. Sistem lain keadilan di Brunei adalah Pengadilan Syari'ah, membahas terutama di Muslim perceraian dan hal-hal pendukung untuk seorang Muslim perceraian dalam yurisdiksi sipil dan dalam pelanggaran dari khalwat (dekat) dan 'zina (seks ilegal) di kalangan Muslim.

## **Birokrasi Negara Indonesia dan Brunei Darussalam**

### **Negara Indonesia**

Birokrasi di Indonesia adalah Lembaga pemerintahan yang menjalankan tugas pelayanan publik baik ditingkat pusat maupun daerah dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 dan sesuai dengan budaya Indonesia. Namun, birokrasi di Indonesia secara organisasi terlalu gemuk. Peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis. Banyak seorang birokrasi ditempatkan di posisi yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Soal kewenangan yang tumpang tindih atau overlapping sehingga ada kecenderungan penyalahgunaan kewenangan oleh birokrat.

Dalam proses rekrutmen ASN, untuk mengurangi tindakan penyalahgunaan kewenangan yang berbau KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), maka saat ini dalam proses rekrutmen menggunakan sistem tes CAT agar mendapatkan calon peserta yang berkualitas dan memiliki kompetensi dasar yang memadai. Tidak hanya itu saja, cara rekrutmen dengan menggunakan tes CAT ini lebih efisien dan efektif baik ditinjau dari segi waktu dan biayanya, serta tidak terlalu banyak menggunakan tenaga manusia atau panitia penyelenggara. Dengan demikian hasil yang kita harapkan akan dapat terwujud dalam mencari calon PNS yang berkualitas, yang nantinya akan mengisi jabatan di beberapa instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

### **Negara Brunei Darussalam**

Birokrasi keagamaan Brunei mempertahankan monopoli mutlak atas komunikasi- publik yang berkaitan dengan Islam. Tidak ada kelompok sekuler terorganisir atau kelompok Islam oposisi yang pernah secara terbuka menentang pendapat keagamaan yang dikemukakan oleh pemerintah pasca-kolonial. Pembuatan-kebijakan Islam hanya terjadi di antara para pejabat negara, dan di balik pintu tertutup. Organisasi-organisasi Islam non-negara, cendekiawan agama yang independen (ulama), atau



penerbitan Islam yang “liar”, secara umum tidak ada. Ulama Brunei adalah, menurut definisi, pegawai negeri sipil.

Pada negara Brunei Darussalam, cara pemilihan birokrat dilakukan dengan sistem rekrutmen tertutup. Artinya, rekrutmen dilakukan oleh para elit politik yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya. Sehingga, prosedur ini dianggap prosedur tertutup karena hanya ditentukan oleh segelintir orang. Negara Brunei Darussalam rakyatnya mempercayai sepenuhnya pada kepada pihak kerajaan dalam pelaksanaan sistem rekrutmen tertutup.

## DISKUSI

Dari hasil yang telah dipaparkan di atas, terdapat persamaan & perbedaan dari negara Indonesia dengan Brunei Darussalam yaitu sebagai berikut:

**Tabel Perbandingan Sistem Administrasi Negara Indonesia Dengan Brunei Darussalam**

Perbandingan	Persamaan		Perbedaan	
	Indonesia	Brunei Darussalam	Indonesia	Brunei Darussalam
Bentuk Negara	Kesatuan	Kesatuan	-	-
Bentuk Pemerintah	-	-	Republik	Monarki Absolut
Sistem Pemerintah	-	-	Presidensial	Presidensial dengan peran Raja yang dominan
Kepala Negara	-	-	Presiden	Sultan
Lembaga Negara	-	-	1. Lembaga legislatif (MPR, DPR, dan DPD). 2. Lembaga eksekutif (Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri) 3. Lembaga yudikatif (MA, MK, KY)	1. Kekuasaan eksekutif (Sultan) 2. Kekuasaan legislatif bersifat unikameral (Majlis masyuarat negeri) yang hanya bertindak sebagai lembaga konsultatif sultan 3. Kekuasaan yudikatif sendiri berada pada supreme count yang berarti pimpinan dan para hakim.
Kategori Negara	-	-	Berkembang	Maju
Hukum Negara	-	-	Hukum Nasional	Hukum Syariah
Falsafah Negara	-	-	Pancasila	Melayu Islam Beraja (MIB)

Birokrasi Negara	-	-	Sesuai UUD 1945 dan budaya Indonesia.	Monopoli mutlak atas komunikasi-publik yang berkaitan dengan Islam.
Rekrutmen Birokrasi	-	-	Sistem Rekrutmen Tertutup	Sistem tes CAT
Akuntansi	-	-	IFRS	IFRS dan BDAS

Keterangan:

1. Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem pemerintahan Presidensial, dan mempunyai beragam suku dan agama. Sedangkan Brunei Darussalam adalah negara kesatuan Islam dengan corak pemerintahan Monarki Absolut.
2. Kepala negara Indonesia adalah presiden. Dalam pemilihan legislatif dan eksekutif dipilih dengan pemilihan umum yang diadakan dalam lima tahun sekali. Sedangkan Brunei Darussalam mutlak segala pemerintahan dan kepala negara adalah ditangan Sultan, karena parlemen hanya ditunjuk langsung oleh Sultan maka pemerintahanya dikendalikan langsung oleh Sultan (raja) dimana hanya garis keturunan saja yang berhak mengganti dan suksesi hanya oleh raja (sultan) dan untuk keluarga sultan saja yang berhak mengganti kedudukan pemerintahan dan kepala negara tersebut.
3. Negara Indonesia memiliki lembaga legislatif yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Kemudian lembaga eksekutif terdiri Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri. Lalu lembaga yudikatif terdiri dari MA, MK, KY. Sedangkan Brunei Darussalam memiliki sultan sebagai kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif bersifat unikameral yaitu Majelis masyuarat negeri yang hanya bertindak sebagai lembaga konsultatif sultan, dan kekuasaan yudikatif sendiri berada pada supreme count yang berarti pimpinan dan para hakim.
4. Brunei Darussalam termasuk dalam negara maju sedangkan Indonesia adalah negara berkembang. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah yang besar dan dipisahkan lautan, sedangkan Brunei Darussalam bukan negara kepulauan, wilayahnya kecil dan tidak dipisahkan lautan.
5. Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas Islam namun tidak memberlakukan hukum syariah sebagai hukum nasional. Sedangkan Brunei Darussalam adalah negara dengan penduduk mayoritas Islam dengan hukum syariah sebagai hukum nasional.
6. Falsafah negara Indonesia adalah Pancasila, sedangkan Brunei Darussalam yaitu Melayu Islam Beraja (MIB). Bahasa resmi negara Indonesia adalah Bahasa Indonesia, sedangkan Brunei Darussalam yaitu Bahasa Melayu.
7. Birokrasi di Indonesia menjalankan tugas pelayanan publik baik dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 dan sesuai dengan budaya Indonesia. Sedangkan Brunei Darussalam mempertahankan monopoli mutlak atas komunikasi- publik yang berkaitan dengan Islam.
8. Birokrasi di Indonesia pada saat rekrutmen pegawai, dilakukan melalui sistem tes CAT untuk mendapatkan calon peserta yang berkualitas dan memiliki kompetensi dasar yang memadai. Sedangkan Brunei Darussalam, dalam proses rekrutmen dilakukan secara sistem tertutup.
9. Indonesia telah menggunakan International Financial reporting standards (IFRS) untuk penulisan laporan keuangannya. Sedangkan Brunei Darussalam Brunei menggunakan dua jenis standar akuntansi, pertama adalah standar yang diadopsi oleh Brunei yaitu Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. IFRS dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) dan digunakan oleh perusahaan yang memiliki kepentingan publik di Brunei. Standar akuntansi kedua adalah Standar Akuntansi Brunei

Darussalam (BDAS) yang dikeluarkan oleh BDASC dan berlaku di Brunei mulai dari tanggal 1 Januari 2018.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia dengan Brunei Darussalam memiliki sistem administrasi negara yang berbeda dengan negara Indonesia. Mulai dari bentuk negara dan pemerintahan, profil negara, sistem pemerintahan, serta birokrasi. Perbandingan kedua negara tersebut, terlihat jelas pada bentuk pemerintahan Indonesia dengan Brunei Darussalam. Indonesia dipimpin oleh presiden, sedangkan Brunei Darussalam dipimpin oleh seorang Raja atau Sultan. Perbandingan sistem administrasi negara ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep dan teori Sistem Administrasi Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Ahmad. 2016. "*Makalah Administrasi Publik-Perbandingan Negara Indonesia dan Brunei Darussalam*". <http://ahmadarifin7676.blogspot.com/2016/12/makalah-administrasi-publik.html> (diakses pada tanggal 15 April 2023).
- Dominik M. Müller. 2017. "*Wewenang Islam dan Negara di Brunei Darussalam*". <https://kyotoreview.org/bahasa-indonesia/wewenang-islam-dan-negara-di-brunei-darussalam/> (diakses pada tanggal 28 April 2023).
- Hamzah, Ansori. "Makalah SANRI". <https://www.scribd.com/doc/147306593/MAKALAH-SANRI> (diakses pada tanggal 14 Maret 2023).
- Natalis Christian, dkk. 2021. "PERKEMBANGAN AKUNTANSI BRUNEI DARUSSALAM DAN ANALISIS SHENANIGANS DALAM LAPORAN KEUANGANNYA". <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/3017> (diakses 2 Mei 2023).

## PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA KOTA TANJUNG PINANG

Amelia Frista Meliyana<sup>1</sup>, Totok Minto Leksono<sup>2</sup>, Andi Nashwa Intan Salam<sup>3</sup>  
Indah Syifa Rahma Sari<sup>4</sup>, Metasari Putri<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Hang Tuah Surabaya, <sup>2</sup>Universitas Kadiri Kediri, <sup>3,4,5</sup>Universitas Hang Tuah Surabaya  
ameliafrista276@gmail.com<sup>1</sup>, totokminto.shmh@gmail.com<sup>2</sup>, andinashwa00@gmail.com<sup>3</sup>  
indahsyifa30290@gmail.com<sup>4</sup>, metasariputri17@gmail.com<sup>5</sup>  
Correspondence Author: totokminto.shmh@gmail.com

### ABSTRAK

#### Histori Artikel

**Submitted**  
10 Februari 2024  
**Reviewed**  
15 Februari 2024  
**Accepted**  
12 Maret 2023  
**Published**  
30 Maret 2024

Penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Penyimpangan terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang tidak mematuhi norma atau Patokan dan nilai yang sudah berlaku di masyarakat. Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yakni faktor yang berasal dari diri seseorang, dimana faktor internal itu sendiri terdiri dari Faktor Kepribadian, Faktor Keluarga serta Faktor Ekonomi. Sedangkan Faktor Eksternal, yakni faktor yang berasal dari luar seseorang atau remaja yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba. Faktor Eksternal itu sendiri terdiri dari Faktor Pergaulan Dan Faktor

Sosial Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang paling dominan yang mempengaruhi sehingga terjadi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dibedakan atas data primer dan data sekunder dan dianalisa secara kualitatif dengan memberikan gambaran informasi. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa faktor yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah disebabkan karena faktor pergaulan, hal ini didasarkan pada kesimpulan dari hasil wawancara langsung dari informan yang menyatakan bahwa faktor pergaulan dengan teman sebaya yang terlalu bebas dan tidak terkontrol menyebabkan remaja ikut terjerumus melakukan penyalahgunaan narkoba. Agar remaja tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba peran serta orang tua sangat dibutuhkan dengan lebih meningkatkan pengawasan terhadap perilaku anggota keluarganya, para orang tua juga diharapkan untuk selalu meluangkan waktunya untuk selalu berada disisi anak-anaknya dalam kondisi apapun, sehingga remaja tidak terjerumus melakukan hal-hal yang menyimpang terutama melakukan penyalahgunaan narkoba. Selain itu perlu adanya Kerjasama yang baik oleh semua elemen baik pemerintah maupun masyarakat sehingga penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja dapat dicegah sedini mungkin.

**Kata kunci:** Penyalahgunaan narkoba, remaja

### ABSTRACT

Drug abuse among adolescents is an act that is not in accordance with social norms and values that apply in society. Deviance occurs when a person or group of people does not comply with the norms or standards and values that have been applied in society. The cause of drug abuse among adolescents is caused by internal factors and external factors. Internal factors, namely factors that come from a person, where the internal factors themselves consist of Personality Factors, Family Factors and Economic

*Factors. While External Factors, namely factors that come from outside a person or teenager that affect the occurrence of drug abuse. The external factor itself consists of factors of association and social factors of society. This study aims to determine what is the most dominant factor that influences drug abuse among teenagers. The data obtained in this study can be divided into primary data and secondary data and analyzed qualitatively by providing an overview of information. From the results of research that has been carried out, it can be concluded that the most dominant factor that causes drug abuse among adolescents is due to social factors, this is based on the conclusions from direct interviews from informants who stated that the factor of association with peers who were too free and uncontrolled causes teenagers to fall into drug abuse. So that teenagers do not fall into drug abuse, parental participation is needed by further increasing supervision of the behavior of their family members, parents are also expected to always take the time to always be by their children's side in any condition, so that teenagers do not fall into doing things that deviant, especially drug abuse. In addition, it is necessary to have good cooperation by all elements of both the government and society so that drug abuse among teenagers can be prevented as early as possible.*

**Keywords:** Drug abuse, youth

## PENDAHULUAN

Permasalahan Narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masih pula jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam ke langsung hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan stratasosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan.

Narkoba (singkatan dari Narkotika, Psicotropika dan bahan adiktif lainnya) memang diperlukan oleh setiap manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang studi pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produk sinarkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah gunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Narkoba apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional. Masalah penyalahgunaan narkoba ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Dengan melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatif nya yang sangat besar dimasa yang akan datang, maka semua elemen bangsa ini seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan masyarakat dan lainnya untuk itu mulai dari sekarang kita galakkan gerakan perangi narkoba, dan pendekatan preventif maupun represif, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba ini dapat berjalan dengan efektif.

Pendidikan merupakan salah satu pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja. Karena remaja merupakan objek yang secara emosional masih labil, sehingga sangat rentan untuk menggunakan narkoba. Mulai dari rasa ingin tahu, mau coba-coba, ikut-ikutan teman, rasisolidaritas grup yang kuat dan memilih lingkungan yang salah

sampai dengan faktor keluarga yang kurang perhatian dan lain sebagainya. Disamping dari objek sasarannya yang labil, sekolah dan kampus yang menjadi tempat yang rentan untuk peredaran narkoba.

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap narkoba. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam – macam jenis narkoba. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkoba yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk dikalangan generasi muda.

Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Bertolak dari upaya badan – badan Internasional dalam mencegah dan upaya membrantas kejahatan narkoba yang bersifat Internasional tersebut, Indonesia juga telah mengupayakan seperangkat Instrumen pengaturan guna mencegah dan menindak lanjuti kejahatan penyalahgunaan narkoba.

Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkoba telah menjadi isu yang telah mengglobal dimana hal ini telah tercatat dalam siding umum ICPO (International Criminal Police Organization) yang ke 66 pada Tahun 1997 di India yang diikuti seluruh anggota yang berjumlah 177 negara dari benua Amerika, Asia, Eropa, Afrika, dan Australia, bahwa peredaran ecstasy mencapai 400 milyar dollar AS. Di samping itu peredaran psikotropika jenis lain pun semakin besar dan dilengkapi teknologi canggih serta melibatkan orang-orang yang justru harusnya menjadi aparat pemberantas tindak pidana narkoba ini selain itu dengan modus yang beragam dan saat ini Indonesia telah termasuk dalam daftar tertinggi sebagai Negara yang menjadi sasaran peredaran yang bisa di sejajarkan dengan negara-negara seperti Jepang, Thailand, Malaysia, Philipina, dan Hongkong. Perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat, dimana dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat masih banyak dijumpai remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narkoba, yang tentunya hal ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan “Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja?”

## **METODE**

### **Jenis Penelitian**

Dasar penelitian yang akan digunakan adalah studi kasus yaitu penelitian yang digunakan dan dilakukan secara intensif dan menjelaskan fakta secara terinci, faktual, dan akurat. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Umar (2002:38) menyebutkan “tujuan penelitian kualitatif adalah memaparkan atau mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian.”

### **Lokasi penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan terhadap para remaja yang menjadi korban atau pecandu narkoba yang pada saat ini sedang mengikuti proses rehabilitasi berupa pendampingan atau assesmen di Kantor Badan Narkoba Nasional Tanjungpinang.

Jenis Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dibedakan atas data primer dan data sekunder. Data Primer dalam penelitian ini merujuk pada data yang langsung dari informan dalam hal ini para pecandu narkoba yang saa tni dalam proses pendampingan di Kantor BNN KotaTanjungpinang. Data Sekunder, yaitu menurut Umar (2002:81) menyebutkan bahwa “ data sekunder adalah data primer

yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar dan sebagainya sehingga menjadi lebih informatif bagi pihak lain.

1. Populasi dan Sampel Sesuai dengan jenis penelitian bahwa penelitian kualitatif tidak menggunakan pendekatan populasi dan sampel tetapi yang digunakan dengan pendekatan secara intensif ke informan yang akan dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini.
2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data. Observasi, dimana metode ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau bentuk wawancara.

## HASIL

### Tugas Pokok dan Fungsi BNN Kota Tanjungpinang

BNN mempunyai tugas pokok yakni melakukan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberantasan. Bidang Pencegahan melakukan kegiatan Informasi P4GN dan Advokasi, Bidang Pemberdayaan Masyarakat melakukan Pemberdayaan Peran serta masyarakat dan penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif dan bidang Pemberantasan melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Permasalahan narkoba merupakan kejahatan yang terorganisir dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas Negara, maka upaya kerjasama dengan Negara-negara lain termasuk dengan berbagai badan dunia, serta organisasi non pemerintah, juga menjadi tugas baru yang diamanatkan dalam Undang-undang, yang mana peredaran gelap narkoba sangat perlu mendapat perhatian oleh pemerintah oleh karena itu didirikan badan khusus yang menangani permasalahan ini yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN).

Struktur Organisasi BNN Kota Tanjungpinang Struktur Organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Kepala BNN Nomor : 3 tahun 2015 tentang Struktur organisasi dan Tata Laksanan pada Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut Kepala BNN , Kasubbag Umum, Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Rehabilitasi, Kasi Pemberantasan

Karakteristik Korban / Pecandu Narkoba yang terdata di BNN Kota Tanjungpinang. Korban maupun pecandu narkoba merupakan orang yang karena ketidaktauannya akan dampak dari penyalahgunaan narkoba sehingga tergelincir menjadi budak narkoba. Hal ini tentunya menjadi tugas pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional untuk melakukan rehabilitasi diharapkan orang yang sudah menjadi pecandu dapat perlahan-lahan menjadi pulih seperti sedia kala.

Faktor-Faktor Penyebab Remaja melakukan Penyalahgunaan Narkoba Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor, baik factor internal maupun faktor eksternal dari remaja itu sendiri.

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal yakni factor yang berasal dari diri seseorang, dimana faktor internal itu sendiri terdiri Faktor Kepribadian, Faktor Keluarga serta Faktor Ekonomi.

##### a. Faktor Kepribadian

Faktor kepribadian merupakan salah satu factor penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, dimana faktor kepribadian merupakan kondisi dimana seseorang mampu atau tidak mampu untuk memilah-milah baik buruknya suatu tindakan.

##### b. Faktor Keluarga

Faktor internal yang kedua yang mempengaruhi remaja melakukan penyalahgunaan narkoba adalah factor Keluarga. Peran keluarga besar sekali terhadap perkembangan sosial, terlebih pada

awal-awal perkembangan yang menjadi landasan bagi perkembangan seluruh anggota keluarga. Tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau peselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja yang salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja.

c. Factor ekonomi

Kondisi keuangan seseorang yang serba berkecukupan sering disalahgunakan oleh remaja dengan mengikuti gaya hidup yang tidak baik yang salah satunya dengan mencari kesenangan dengan cara mengkonsumsi narkoba, begitu sebaliknya kondisi keuangan yang serba kekurangan serta ditambah sulitnya mencari pekerjaan menimbulkan keinginan seseorang untuk bekerja menjadi pengedar narkoba, dengan tujuan disamping dapat ikut menikmati narkoba itu sendiri, dan juga mendapat imbalan dari hasil menjadi pengedar narkoba

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yakni factor yang berasal dari luar seseorang / remaja yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba. Adapun Faktor Eksternal itu sendiri terdiri dari Faktor Pergaulan Dan Faktor Lingkungan.

a. Faktor Pergaulan

Faktor Eksternal yang mempengaruhi remaja melakukan penyalahgunaan narkoba salah satunya adalah karena faktor pergaulan, dimana pergaulan dengan teman sebaya yang tidak terkontrol dan menyimpang dari norma-norma yang berlaku dimasyarakat dapat mengakibatkan remaja melakukan penyalahgunaan narkoba.

b. Faktor Sosial /Masyarakat

Lingkungan masyarakat yang baik terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, dan sebaliknya jika lingkungan sosial/masyarakat yang kurang baik dan kurangnya kepedulian dari masyarakat dilingkungan sekitar membuat remaja makin bebas melakukan hal-hal yang negative seperti penyalahgunaan narkoba.

Upaya-upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh BNN Kota Tanjungpinang Sesuai dengan amanat pasal 67 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, BNN melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Rehabilitasi dan Seksi Pemberantasan

1) Upaya Preventif Upaya penanggulangan secara preventif dilakukan adalah dengan mengupayakan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba tersebut. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengupayakan optimalisasi kegiatan intern pada institusi BNN khususnya personil dan sarananya

a. Mengadakan pengawasan ditempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkoba, misalnya: di tempat-tempat hiburan malam (karaoke maupun diskotik yang ada di KotaTanjungpinang) dan tidak menutup kemungkinan di pemukiman yang dianggap aman untuk melakukan penyalahgunaan narkoba, bahkan sering kali BNN mengadakan razia di Lapas Narkotika Tanjungpinang karena banyak informasi dari masyarakat Lapas Narkotika justru menjadi sarang peredaran narkoba

b. Melakukan operasi-operasi / Razia dengan cara berpatroli, razia ditempat-tempat yang dianggap Rawan terjadinya penyalahgunaan Narkoba. BNN Kota Tanjungpinang sering mengadakan operasi-operasi / razia yang bersifat operasi mendadak. Adapun operasi yang dilakukan oleh BNN sering disebut Operasi P4GN

1) Upaya Pre-emptif Upaya pre-emptif yang dilakukan oleh beberapa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran menghilangkan factor-factor penyebab yang menjadi pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari penyalahgunaan



narkoba tersebut. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan dan daya tangkal serta terbinanya dan terciptanya suatu kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari narkoba

- 2) Upaya Represif Penanggulangan secara represif dilakukan adalah dengan memberikan tindakan kepada pelaku tindak pidana narkoba ini sesuai hukum yang berlaku. Upaya ini terlihat sudah dilakukan dengan baik, sejak perkara ditangani pihak BNN sendiri, kemudian berkasnya dilimpahkan Pengadilan Negeri untuk proses lebih lanjut.

## KESIMPULAN

Secara garis besar faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja terdiri dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal, yakni faktor yang berasal dari diri seseorang, dimana faktor internal itu sendiri terdiri dari : Faktor Kepribadian, Faktor Keluarga serta Faktor Ekonomi. Selanjutnya Faktor Eksternal, yakni faktor yang berasal dari luar seseorang / remaja yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba. Adapun Faktor Eksternal itu sendiri terdiri dari: Faktor Pergaulan Dan Faktor Sosial/Masyarakat. Dari beberapa faktor tersebut yang terlihat paling dominan yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja adalah disebabkan karena factor pergaulan, dimana karena pergaulan yang terlalu bebas dan tidak terkontrol menyebabkan remaja hilang kendali sehingga mudah terpengaruh dengan mengkonsumsi narkoba. Selain itu kondisi kepribadian remaja yang tergolong masih labil sehingga remaja mudah terbujuk untuk menyalahgunakan narkoba tanpa memikirkan dampak buruk dari narkoba itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Alifia, U, 2008. *Apa Itu Narkotika dan Napza*. PT Bengawan Ilmu, Semarang.
- Budianto. 1989. *Narkoba dan Pengaruhnya*. Ganeca Exact. Bandung.
- Darman, Flavianus. *Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkoba*. Visimedia, Jakarta. 2006.
- Kartini Kartono. 1992. *Patologi Sosial 2. Kenakalan Remaja*. Rajawali Press, Jakarta.
- Libertus Jehani & Antoro dkk. 2006. *Mencegah Terjerumus Narkoba*. Visimedia. Jakarta.
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Simanjuntak, B. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Pantologi sosial*, Tarsino, Bandung.
- Soekanto, Soejono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1986. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung.
- Siahaan, Jokie. 2009. *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*. Jakarta. PT Indeks.